



**TANAM PAKSA DI KERESIDENAN TEGAL: KAJIAN
TENTANG SISTEM, PELAKSANAAN DAN
DAMPAKNYA
(1830-1870)**

SKRIPSI

Oleh:

SETIA HANAFI

NIM 170110301054

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JEMBER
2021**



**TANAM PAKSA DI KERESIDENAN TEGAL: KAJIAN
TENTANG SISTEM, PELAKSANAAN DAN
DAMPAKNYA
(1830-1870)**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Sejarah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Humaniora

Oleh:

**SETIA HANAFI
NIM 170110301054**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JEMBER
2021**

MOTTO

“Manungsa iku mung titah, aja selak karo kodrat seng wes di pésteke, urip iku tanpa pawitan, syukurana kanthi iklas lan sabar, wani ngadépi urip, aja cingek kaya bocah cilik, mlarat ya wani, sugih ya wani, beja ya wani, cilaka ya wani.”

(Manusia itu hanya utusan, jangan menghindari takdir yang sudah dipastikan, hidup itu tanpa awalan, bersyukurlah dengan iklas dan sabar, berani menghadapi hidup, jangan cengeng seperti anak kecil, miskin harus berani, kaya harus berani, mujur harus berani, celaka harus berani)

Nasehat Bratasena kepada Prabu Baladewa menjelang Perang Bratayudha

“Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tanda tanya, tanpa kita bisa menawar. Terimalah dan hadapilah.”

Soe Hok Gie

“.....tapi dalam keputusan terkandung kenikmatan-kenikmatan yang paling dalam, terutama kalau kita sadar sekali bahwa keadaan kita tidak tertolong lagi”

Catatan Dari Bawah Tanah-Fyodor Mikhailovitsy Dostoyevski

PERSEMBAHAN

Karya ini sebagai persembahan untuk:

1. Ibunda Sarti dan Ayahanda Pudjo, sebagai tanda cinta kasih, hormat, dan bakti atas segala dukungan yang telah diberikan.
2. Empat saudara ku Sumarlik, Surini, Siswanto, dan Arifin sebagai tanda terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan.
3. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan namanya yang sudah seperti saudara yang telah direpotkan selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Para dosen yang telah sabar memberikan bimbingan pada penulis.
5. Almamater Universitas Jember.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setia Hanafi

NIM 170110301054

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Tanam Paksa Di Keresidenan Tegal: Kajian Tentang Sistem, Pelaksanaan dan Dampaknya (1830-1870)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2021

Yang menyatakan



Setia Hanafi

NIM 170110301054

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah di setujui untuk di ujikan oleh:

Dosen Pembimbing 1,



Prof. Drs. Nawiyanto, MA. Ph.D
NIP. 196612211992011001

Dosen Pembimbing 2,



Drs. Nurhadi Sasmita, M.Hum
NIP. 196012151989021001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tanam Paksa Di Keresidenan Tegal: Kajian Tentang Sistem, Pelaksanaan dan Dampaknya (1830-1870)” telah diuji dan disahkan oleh Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : 2021

Tempat : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Prof. Drs. Nawiyanto, MA. Ph.D

NIP. 196612211992011001

Drs. Nurhadi Sasmitha, M.Hum

NIP. 196012151989021001

Penguji 1,

Penguji 2

Dra. Latifatul Izzah, M. Hum

NIP. 196606101991032001

Dr. Retno Winarni, M.Hum

NIP.195906281987022001

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. H. Sukarno, M.Litt

NIP. 196211081989021001

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Tanam Paksa Di Keresidenan Tegal: Kajian Tentang Sistem, Pelaksanaan dan Dampaknya (1830-1870)*. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sejarah. Penulis menyadari bahwa dalam hal dibantu oleh banyak pihak dari sejak perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan pada mereka yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sukarno, M. Litt, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember,
2. Dr. Eko Crys Endrayadi, S.S, M. Hum, Ketua Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember,
3. Prof. Drs. Nawiyanto, MA. Ph.D sebagai dosen pembimbing 1 yang penuh kesabaran mengarahkan, membimbing, meluangkan waktu, pikiran serta perhatian dalam penulisan skripsi ini,
4. Drs. Nurhadi Sasmitha, M.Hum sebagai dosen pembimbing 2 yang telah memberikan banyak mitovasi dan meluangkan waktu, pikiran serta perhatian dalam penulisan skripsi ini,
5. Dra. Latifatul Izzah, M. Hum selaku dosen penguji 1 yang memberikan banyak masukan dan kritik yang sangat berharga bagi penulisan skripsi ini,
6. Dr. Retno Winarni, M.Hum selaku dosen penguji 2 yang telah mengarahkan, memberi masukan, kritik, dan diskusi yang sangat berkontribusi bagi penulisan skripsi ini,
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat berharga bagi penulis,

8. Ibu Neneng Ridayanti dan Ibu Siti Fatimah selaku Staf arsiparis di Arsip Nasional Republik Indonesia yang sering direpotkan oleh penulis dalam proses pencarian sumber,
9. Dr. Alamsyah, S.S., M. Hum, dosen pengajar di Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mendapatkan tesis beliau, sehingga penulis mendapatkan pijakan yang lebih baik dalam proses penulisan ini,
10. Pak Heru dan seluruh karyawan dan staf Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, atas segala bantuan dan pelayanan selama ini,
11. Teman-teman angkatan 2017 Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember,
12. Sahabat kontrakan Bu Nur, Karimata, Patrang, diskusi, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan semangat dan mental yang sangat membantu penyusunan skripsi ini.

Untuk kesempurnaan karya ilmiah ini penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
RINGKASAN	xix
SUMMARY	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar Belakang.	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	6
1.4 Ruang Lingkup	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.5 Pendekatan dan Kerangka Teori	13
1.6 Metode Penelitian	15
1.7 Sistematika Penulisan.....	18
BAB 2. KERESIDENAN TAGAL SEBELUM TANAM PAKSA.....	19
2.1 Lingkungan Geografi	19

2.2 Birokrasi Pemerintahan.....	23
2.3 Demografi Pemerintahan.....	28
2.3 Komoditas Pertanian dan Perkebunan Sebelum Sistem Tanam Paksa	35
BAB 3 SISTEM TANAM PAKSA DI KERESIDENAN TAGAL.....	42
3.1 Basis Produksi.....	42
3.1.1 Tanah.....	42
3.1.2 Tenaga Kerja	68
3.2 Produksi Komoditas Perkebunan Dengan Sistem Tanam Paksa	75
3.2.1 Tebu.....	76
3.2.2 Kopi.....	89
3.2.3 Tanaman Perkebunan Lainnya	98
3.3 Dampak Penyelenggaraan Tanam Paksa	101
3.3.1 Timbulnya Sistem Tenaga Kerja Upah	101
3.3.2 Pertambahan Jumlah Penduduk	104
3.3.3 Keuntungan Pemerintah	109
3.3.4 Gerakan Perlawanan Petani.....	113
BAB 4 KESIMPULAN	118
DAFTAR ACUAN.....	122
LAMPIRAN.....	131

DAFTAR SINGKATAN

- ANRI : Arsip Nasional Republik Indonesia
- BKI : *Bidragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde*
- Eindresumé : *Eindresumé van het bij goevernements besluit dd. 10 Juni 1867
No.2 bevolen onderzoek naar de rechten van den Inlander op den
grond op Java en Madoera*
- KITLV : *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde*
- TNI : *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*
- VOC : *Verenigde Oost- Indische Compagnie*

DAFTAR ISTILAH

- Afdeling* : Wilayah administrasi dibawah keresidenan yang setingkat kabupaten di bawah keresidenan yang dikepalai oleh asisten residen
- Bekel* : Istilah yang digunakan untuk menyebut kepala desa di wilayah Keresidenan Tegal.
- Besluit* : Surat keputusan resmi yang memuat kebijakan dari tingkat daerah ataupun pusat semasa zaman Hindia-Belanda
- Cultuurdiensten* : Kerja wajib yang harus ditunaikan kewajiban atas penguasaan tanah pada petani untuk menanam dan merawat berbagai macam tanaman perkebunan sewaktu sistem tanam paksa.
- Distrik* : Wilayah administrasi di bawah kabupaten yang setingkat kecamatan yang dikepalai oleh wedana
- Heerendiensten* : Kerja wajib pada negara yang harus ditunaikan sebagai kewajiban atas penguasaan tanah pada petani dalam bentuk perbaikan jalan, pembangunan bendungan, penjagaan dan perawatan gudang-gudang pemerintah, dll.
- Janggol* : Istilah lain dari *sikep* yang merupakan tuan tanah yang menggarap tanah komunal ataupun tanah pribadi.
- Keresidenan* : Wilayah administrasi yang dikepalai oleh residen
- Mondok* : Istilah yang digunakan untuk menyebut golongan paling bawah dalam stratifikasi sosial masyarakat pribumi yang hidupnya bergantung pada para tuan tanah.
- Oosthoek* : wilayah pojok timur Jawa yang terkenal sangat subur dan menjadi daerah penghasil beras yang terdiri dari Keresidenan Pasuruan dan Keresidenan Besuki
- Pancendiensten* : Kerja wajib ditunaikan sebagai kewajiban atas penguasaan tanah pada petani dalam bentuk kerja untuk pejabat pemerintah kolonial baik pribumi ataupun eropa dalam

aktivitas sehari-hari seperti menyapu rumah-rumah pejabat.

Pasisir Kulon : Wilayah Kerajaan Mataram dari Demak ke barat



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Nama Kepala Pemerintah di Keresidenan Tegal Tahun 1750-1834	28
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Keresidenan Tegal dan Ulujami Tahun 1802/1803	31
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Keresidenan Tegal Tahun 1815	33
Tabel 2.4	Tanaman Kopi di Keresidenan Tegal 1802-1811	37
Tabel 2.5	Budidaya di Keresidenan Tegal Pada Tahun 1815	39
Tabel 3.1	Penguasaan Tanah di Keresidenan Tegal 1868	49
Tabel 3.2	Sawah di Distrik Dukuhwringin 1856-1857	61
Tabel 3.3	<i>Heerendiensten</i> di Keresidenan Tegal 1868	76
Tabel 3.4	Perkembangan Produksi Gula di Keresidenan Tegal 1835-1841	81
Tabel 3.5	Jumlah Produksi Gula Per Pabrik di Keresidenan Tegal Tahun 1849-1857	85
Tabel 3.6	Jumlah Produksi Gula di Keresidenan Tegal Tahun 1858-1862	89
Tabel 3.7	Jumlah Produksi Gula Per Pabrik di Keresidenan Tegal Tahun 1863-1866	91
Tabel 3.8	Jumlah Pohon dan Produksi Kopi di Keresidenan Tegal 1832-1836	93
Tabel 3.9	Jumlah Pohon Kopi dan Produksinya di Keresidenan Tegal Tahun 1837-1841	97
Tabel 3.10	Produksi Kopi di Keresidenan Tegal Tahun 1854-1858	100
Tabel 3.11	Produksi Kopi di Keresidenan Tegal Tahun 1862-1868	101
Tabel 3.12	Produksi Indigo di Keresidenan Tegal	102

	Tahun 1832-1836	
Tabel 3.13	Produksi Indigo dan Teh di Keresidenan Tegal 1837-1841	103
Tabel 3.14	Komposisi Penduduk Di Keresidenan Tegal 1836 dan 1855	110
Tabel 3.15	<i>Cultuur Procenten</i> di Keresidenan Tegal Tahun 1836	113



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran A	Peta Keresidenan Tegal 1863	135
Lampiran B	Pembagian Wilayah Administrasi tahun 1863	136
Lampiran C	Statistik Budidaya Tebu Pada 1832-1841 Di Keresidenan Tegal	137
Lampiran D	Statistik Kopi Pada 1832-1841 Di KeresidenanTegal	138
Lampiran E	Kontrak Penduduk Kemanglen Dan Dukuhwringin Dengan Pabrik Gula Milik Lucassen Pada 1858	140
Lampiran F	Para Pekerja Dan Upah Terhutang Dari Kontraktor Untuk Pengangkutan Tebu Dari Ladang Ke Pabrik Gula Dukuhwringin.	141
Lampiran G	Berita Dari <i>Java-Bode</i> , <i>Nieuwe Amsterdamsche Couran</i> , <i>Dan Oostpost Soerabajasche Courant</i>	142
Lampiran H	Kultur Verlag 1868	143
Lampiran I	Surat Ijin Penelitian Pra-Skripsi di Arsip Nasional Republik Indonesia	144

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang tanam paksa yang diterapkan di Keresidenan Tegal mulai dari sistem, pelaksanaannya dan dampak yang timbul pada masyarakat periode tersebut. Tanam paksa yang diterapkan mulai tahun 1830 hingga tahun 1870 telah menjadi momentum penting bagi perubahan sosial ekonomi masyarakat di Keresidenan Tegal. Garis besar permasalahan yang di kaji dalam skripsi ini meliputi gambaran umum Keresidenan Tegal sebelum tanam paksa, pelaksanaan tanam di Keresidenan Tegal, dan dampak tanam paksa di Keresidenan Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang prosesnya terdiri dari, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan pendekatan sosiologi ekonomi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa latar belakang Keresidenan Tegal telah menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian perkebunan telah ada tetapi belum berkembang dengan baik. Penerapan tanam paksa mendorong perkebunan berkembang secara ekspansional dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia yaitu tanah dan tenaga kerja yang keduanya terkait erat dalam ikatan tradisional. Tingkat produktivitas meningkat untuk komoditas perkebunan seperti tebu, kopi, indigo dan teh dari sebelum penerapan tanam paksa, walaupun untuk indigo dan teh berkembang lebih lambat. Hal ini membawa dampak pada masyarakat dengan munculnya tenaga kerja upah, penambahan jumlah penduduk, keuntungan bagi para pejabat kolonial, dan gerakan perlawanan petani.

Kata Kunci: Keresidenan Tegal, Tanah, Tanam Paksa dan Tenaga Kerja.

ABSTRACT

This study examines discusses the cultivation system applied in the Tegal Residency starting from the system, its implementation and the impact that arose on the community in that period. Cultivation system, which was implemented from 1830 to 1870, has become an important momentum for the socio-economic changes of the people in the Tegal Residency. The outline of the problems studied in this study examines includes an overview of the Tegal Residency before cultivation system, the implementation of planting in the Tegal Residency, and the impact of cultivation system in the Tegal Residency. The research method used is the historical method which consists of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The approach used in the preparation of this study examines is an economic sociology approach. The results obtained indicate that the background of the Tegal Residency has shown that plantation economic activities have existed but have not developed well. The application of cultivation system encourages plantations to develop expansionally by utilizing available resources, namely land and labor, both of which are closely related in traditional ties. Productivity levels increased for both sugar, coffee, indigo and tea plantations from before the implementation of cultivation system, although indigo and tea developed more slowly. This had an impact on society with the emergence of wage labor, population growth, benefits for colonial officials, and peasant resistance movements.

Keywords: Land, Labor, Residency of Tegal, and Cultivation system.

RINGKASAN

Tanam Paksa Di Keresidenan Tegal: Kajian Tentang Sistem, Pelaksanaan Dan Dampaknya (1830-1870)

Setia Hanafi, 170110301054, 2021, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember.

Usaha swastanisasi yang terus gagal dalam meningkatkan produktivitas perkebunan di Jawa sejak dibubarkannya VOC memasuki abad ke-19 membawa perekonomian yang cenderung stagnan. Krisis ini diperparah oleh meletusnya perang Diponegoro dengan pengeluaran biaya sebesar 30 juta gulden oleh pemerintah kolonia. Tanah dan tenaga kerja yang tersedia ternyata gagal dimanfaatkan secara efektif dalam pembangunan perekonomian perkebunan waktu itu hingga hal ini berubah ketika tanam paksa diterapkan. Sistem ini dicap sebagai penggunaan sistem perekonomian VOC yang bertumpu pada penyerahan wajib dari masyarakat, tetapi tidak dapat disangkal pula bahwa sistem ini yang mampu membangun kembali perekonomian pemerintah kolonial hingga menjadi masa yang gemilang. Sejak sistem ini diterapkan pada tahun 1830 perkebunan-perkebunan negara terus mendapatkan tempat yang tinggi dalam produktivitasnya. Berbagai daerah di Jawa menjadi tempat-tempat penanaman tanaman perkebunan pemerintah termasuk di Keresidenan Tegal. Tebu dan kopi telah menjadi tanaman perkebunan yang paling pesat perkembangannya dan membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat hingga tahun 1870.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Menggambarkan kondisi umum di Keresidenan Tegal sebelum masa tanam paksa; (2) Menjelaskan proses pelaksanaan tanam paksa di Keresidenan Tegal; (3) Mengkaji dampak penerapan sistem tanam paksa bagi kehidupan sosial-ekonomi di Keresidenan Tegal. Dua manfaat yang diharapkan adalah manfaat teoretis yaitu memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam mengenai kebijakan tanam paksa dan dampaknya bagi kehidupan sosial ekonomi petani di Keresidenan Tegal dari latar belakangnya, penerapannya, dan dampak yang timbul, dan Manfaat praktis yaitu

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi petani dalam skala regional maupun nasional.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang prosesnya terdiri dari, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan pendekatan sosiologi ekonomi. Sumber yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer berada di Arsip Nasional Republik Indonesia terutama pada koleksi Arsip Residensi Tegal, sedangkan sumber sekunder yaitu, Perpustakaan Jurusan Sejarah, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Pusat Universitas Jember.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa latar belakang Keresidenan Tegal telah menunjukan bahwa aktivitas perekonomian perkebunan telah ada tetapi belum berkembang dengan baik. Penerapan tanam paksa mendorong perkebunan berkembang secara ekspansional dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia yaitu tanah dan tenaga kerja yang keduanya terkait erat dalam ikatan tradisional. Tingkat produktivitas meningkat untuk komoditas perkebunan seperti tebu, kopi, indigo dan teh dari sebelum penerapan tanam paksa, walaupun untuk indigo dan teh berkembang lebih lambat. Hal ini membawa dampak pada masyarakat dengan munculnya tenaga kerja upah, penambahan jumlah penduduk, keuntungan bagi para pejabat kolonial, dan gerakan perlawanan petani.

Penerapan tanam paksa memang tidak dapat disimpulkan dengan sederhana, karena pada tiap-tiap wilayah memiliki dampak yang berbeda-beda. Penerapan tanam paksa di Keresidenan Tegal memberikan dampak yang tidak sederhana sehingga harus dilihat pada bagian-bagian yang perlu dimunculkan. Tanam paksa telah membuat petani bergantung pada ekonomi uang, penambahan jumlah penduduk yang besar, keuntungan bagi para pejabat pribumi, namun pada kondisi ini kriminalitas juga tidak hilang atau pada peristiwa insidental tertentu bahkan menguat ke arah yang merugikan karena tanam paksa justru memperburuk keadaan.

SUMMARY

Cultivation System in the Residency of Tegal: A Study of the System, Its Implementation and Impact (1830-1870)

Setia Hanafi, 170110301054, Historical Studies Program, Faculty of Cultural Sciences, University of Jember

The privatization efforts that continued to fail in increasing plantation productivity in Java since the dissolution of the VOC into the 19th century brought the economy to a stagnation. This crisis was exacerbated by the outbreak of the Diponegoro war with the colonial government spending 30 million guilders. The available land and labor failed to be used effectively in the development of the plantation economy at that time until this changed when cultivation system was implemented. This system was labeled as the use of the VOC economic system which relied on mandatory submission from the community, but it cannot be denied that this system was able to rebuild the colonial government's economy to become a glorious period. Since this system was implemented in 1830 state plantations have continued to occupy a high place in productivity. Various areas in Java have become places for planting government plantations, including the Tegal Residency. Sugarcane and coffee had become the fastest growing plantation crops and had a considerable impact on society until 1870.

The objectives of this study are: (1) To describe the general conditions in the Tegal Residency before the cultivation system period; (2) Explaining the process of implementing cultivation system in the Tegal Residency; (3) Assessing the impact of the implementation of the cultivation system on the socio-economic life of the Tegal Residency. The two expected benefits are theoretical benefits, namely obtaining a more complete and in-depth understanding of the cultivation system policy and its impact on the socio-economic life of peasant in Tegal Residency from their background, application, and impacts, and practical benefits,

which can be used as consideration in making decisions. Formulate policies related to the socio-economic life of peasant on a regional and national scale.

The research method used is the historical method which consists of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The approach used in the preparation of this thesis is an economic sociology approach. The sources used in the preparation of this thesis are primary and secondary sources. The primary sources are in the National Archives of the Republic of Indonesia, especially the Tegal Residency Archives collection, while the secondary sources are the History Department Library, the Faculty of Cultural Sciences Library, the Jember University Central Library.

The results obtained indicate that the background of the Tegal Residency has shown that plantation economic activities have existed but have not developed well. The application of cultivation system encourages plantations to develop expansionally by utilizing available resources, namely land and labor, both of which are closely related in traditional ties. Productivity levels increased for both sugar, coffee, indigo and tea plantations from before the implementation of forced cultivation, although indigo and tea developed more slowly. This had an impact on society with the emergence of wage labor, population growth, benefits for colonial officials, and peasant resistance movements.

The application of cultivation system cannot be concluded simply, because in each region it has a different impact. The implementation of cultivation system in the Tegal Residency has an impact that is not simple, so it must be seen in the parts that need to be raised. Cultivation has made peasant dependent on the money economy, large population growth, profits for indigenous officials, but in this condition crime also does not disappear or in certain incidental events it even strengthens in a detrimental direction because cultivation system actually worsens the situation.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang datang setelah pemerintah Hindia-Belanda berkuasa menggantikan VOC di Jawa ialah cara meningkatkan produksi komoditas perkebunan supaya lebih menguntungkan untuk negara induk. Dua pilihan yang muncul ialah bertumpu pada pemerintah atau swasta. Semangat liberalisme yang sedang melanda Eropa ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan ini. Pandangan Dirk Van Hogendorp yang berintikan pada kebebasan perdagangan dan kepemilikan tanah secara individu oleh petani ternyata belum mampu dilaksanakan. Penyebabnya adalah kondisi perekonomian pemerintah yang tidak siap bersaing dengan swasta dalam hal perdagangan dan realitas bahwa tanah sebagai basis produksi sebagian besar masih dikuasai oleh elite pribumi. Hal yang ditakutkan jika swastanisasi ini dipaksakan akan mengguncang kewibawaan para elite pribumi hingga mengakibatkan keadaan lebih buruk lagi.¹

Pada zaman pemerintahan Daendels (1808-1811) kebijakan yang diambil dalam upaya mengembangkan komoditas ekspor di Jawa dengan meningkatkan intensitas pembukaan perkebunan kopi milik pemerintah, dan untuk pengembangan industri gula menjadi satu-satunya alasan penjualan desa oleh

¹ D.H. Burger, *Perubahan-Perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1983), hlm. 2 .

pemerintah pada pihak pemodal. Pada 1807 tercatat 100.000 *pikul* kopi dan 1808 tercatat 95.000 *pikul* gula di produksi di Jawa.²

Pada pemerintahaan Raffles (1811-1816) terjadi perombakan yang penting mengenai status penguasaan tanah dan penyetoran pajak. Petani dibebaskan atas berbagai kewajiban yang harus dikerjakan untuk pemerintah dan diberi kehendak yang bebas untuk membudidayakan tanaman selain padi. Pada masa Raffles produktivitas kopi maupun gula mengalami penurunan. Produktivitas kopi hanya sebesar 50.000 *pikul* dan pada 1815 produksi gula hanya sebesar 20.000 *pikul*. Menurut Creutzberg waktu dari dibubarkannya VOC hingga berakhirnya masa pemerintahan Raffles merupakan periode yang suram dari segala segi, kebijakan yang berubah-ubah tetapi kebanyakan merupakan suatu usaha ke arah liberalisasi ternyata terbukti gagal untuk memperbaiki perekonomian di Jawa.³

Pada tahun 1827 Gubernur Jendral Du Bus (1826-1830) melaporkan bahwa di Jawa tingkat impor ternyata lebih besar dibandingkan ekspornya, sedangkan pada masa tersebut harga kopi dan gula sedang naik. Permasalahan inti yang menjadi perhatian adalah kesuburan tanah serta tenaga kerja yang banyak tersedia ternyata gagal meningkatkan produktivitas ekspor. Perkiraan hanya sekitar 1/5 atau 1/6 jumlah keseluruhan tanah di Jawa yang telah dibudidayakan, sedangkan rakyat hidup berdesakan dalam kemiskinan.⁴ Permasalahan ini menurut perumusan Du Bus dapat diatasi dengan mengubah kepemilikan tanah komunal ke tanah individu, dan mengizinkan pembukaan modal lebih banyak lagi oleh swasta untuk memaksimalkan pengelolaan tanah.⁵

² J.S. Furnivall, *Hindia Belanda Studi Ekonomi Tentang Majemuk* (Jakarta: Freedom Institute, 2009), hlm. 79.

³ Pieter Creutzberg dan J.T.M van Laanen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor, 1987), hlm. 134.

⁴ D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, penerjemah Prajudi Admosudirdjo (Jakarta: J.B. Wolters, 1957), hlm.180.

⁵ Robert Van Niel, *Sistem Tanam Paksa Di Jawa* (Jakarta: LP3ES, 2003) hlm. 112.

Pada masa Du Bus di Jawa sedang terjadi Perang Diponegoro yang berlangsung pada tahun 1825-30. Perang ini menghabiskan biaya sebesar 30 juta gulden ditengah kondisi perekonomian yang tidak kunjung membaik di tanah jajahan.⁶ Kondisi keuangan Kerajaan Belanda di Eropa juga tidak jauh beda dengan Jawa karena pada tahun yang sama terjadi pelepasan Belgia dari wilayahnya, padahal Belgia merupakan pusat industri pada waktu itu. Kondisi yang demikian membuat usulan Du Bus ditolak oleh Raja William dan menyepakati usulan Van Den Bosch yang intinya adalah monopoli negara atas komoditas ekspor perkebunan yang diharuskan ditanam oleh petani sebagai pengganti atas pajak yang harus mereka bayar pada pemerintah kolonial. Hal ini tentu lebih menjanjikan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat, usulan inilah yang menjadi dasar dari sistem yang dikenal dengan *cultuurstelsel* kedepannya. Van Den Bosch kemudian diutus oleh Raja William pada tahun 1830 ke Hindia-Belanda dengan menjadikannya sebagai Gubernur Jendral menggantikan Du Bus untuk merealisasikan usulannya.

Cultuurstelsel jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebenarnya berarti “sistem pembudidayaan” yang mengacu pada aturan yang harus diterapkan pada petani sebagai pembudidayaan tanaman komoditas yang laku dijual di pasaran Eropa dengan ketentuan yang tercantum dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* tahun 1834 No. 22. Historiografi nasional mengartikan *cultuurstelsel* berbeda, “sistem pembudidayaan” hanyalah bagian normatif yang jauh dari realisasi, karena itu yang lebih cocok untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi pada era itu digunakan nama sistem tanam paksa untuk menyebutnya.⁷

Sistem tanam paksa pernah dianggap sebagai penggunaan kembali sistem pengelolaan daerah jajahan zaman VOC yang didasarkan atas pajak natura yang ditarik lewat perantara birokrasi tradisional dan monopoli yang dilakukan pada

⁶ Clive Day, *The Policy and Administration Of The Dutch in Java* (London: Macmillan Company & CO., LTD, 1904), hlm. 245.

⁷ R.Z. Leirissa, dkk, *Sejarah Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI,1996), hlm. 53.

berbagai kegiatan perdagangan hasil bumi oleh pemerintah. Terbukti bahwa kedepannya justru sistem inilah yang mampu memecahkan persoalan mengenai peningkatan produksi komoditas ekspor perkebunan dengan bersumber pada usaha petani. Pajak tanah yang harus dibayar oleh para petani dengan hasil tanaman komoditas ekspor berhasil membuat petani lepas dari kebiasaan menanam padi untuk dikonsumsi sendiri (subsisten), meskipun terdapat konsekuensi-konsekuensi yang mesti ditanggung.

Komoditas yang dikembangkan untuk tanaman perkebunan ini beragam tergantung kecocokan kondisi wilayah, tetapi setidaknya tidak ada yang benar-benar baru yang didatangkan dari luar wilayah Hindia-Belanda.⁸ Salah satu wilayah di Jawa yang menjadi pusat perkebunan adalah Keresidenan Tegal. Upaya untuk mengembangkan komoditas perkebunan negara telah ada sebelum sistem tanam paksa diterapkan tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah ekspansi perkebunan untuk pertama kali tidak pernah sebesar ketika sistem tanam paksa diterapkan terutama untuk perkebunan tebu dan kopi.

Mulai tahun 1830 terjadi perubahan dengan cepat di Keresidenan Tegal, gula sebagai orientasi ekspor berkembang menjadi industri utama, sedangkan kopi menjadi komoditas kedua setelah gula dalam kuantitas produksi.⁹ Pada tahun 1831 terdapat perkebunan kopi dengan jumlah tanaman di Kabupaten Brebes 720.070 pohon, Kabupaten Tegal 223.466 pohon, dan Kabupaten Pemalang 659.442 pohon dengan produksi pada tahun 1832 sejumlah 8.769,67 *pikul*.¹⁰ Perkebunan tebu di Keresidenan Tegal pada tahun 1833 menempati lahan seluas 500 *bahu*¹¹ dengan hasil produksi 4.000 *pikul* gula dengan dua pabrik pengelola

⁸ Soegijanto Padmo, "Beberapa Hal Mengenai Kajian Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia: Sebuah Survai" dalam *Humaniora*, 10 Januari-April 1999, hlm. 11.

⁹ G.R. Knight, "Kuli-Kuli Parit, Wanita Penyang dan Snijvolk : Pekerja-pekerja Industri Gula Jawa Utara Awal Abad Ke-20", dalam Thomas Lindblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru*, penerjemah M.Rohman dan Bambang Purwanto (Jakarta:LP3ES, 2000), hlm. 104.

¹⁰ "Statistiek der Residentie Tegal 1836", Arsip Residensi Tegal No. 133, ANRI.

¹¹ 1 *bahu* = 0,7096 ha

yang berada di Kabupaten Tegal (Pabrik Pangka) dan Kabupaten Pemalang (Pabrik Comal).¹² Pada tahun 1868 luas lahan tercatat menjadi 2.950 *bahu* dengan rincian Pabrik Banjardawa 400 *bahu*, Pabrik Comal 300 *bahu*, Pabrik Pagongan 150 *bahu*, Pabrik Adiwerna 400 *bahu*, Pabrik Dukuhwringin 400 *bahu*, Pabrik Kemanglen 400 *bahu*, Pabrik Pangka 500 *bahu*, Pabrik Jatibarang 400 *bahu*.¹³ Pada tahun yang sama daerah yang menjadi tempat penanaman kopi berada di Distrik Gantungan, Distrik Mandiraja, Distrik Bongas, Distrik Boemieajoe, Distrik Lebaksiu, dan Distrik Salem.¹⁴ Ekspansi dari perkebunan tebu dan kopi ketika sistem tanam paksa diterapkan telah membawa perubahan sosial ekonomi di Keresidenan Tegal yang tentunya menjadi masalah yang menarik jika dikaji.

Bersarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk menuliskan skripsi dengan judul “Tanam Paksa Di Tegal: Kajian Tentang Sistem, Pelaksanaan dan Dampaknya (1830-1870)” diambil sebagai judul dengan pengertian bahwa sistem tanam paksa sebagai sistem yang dirancang sesuai dengan acuan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* tahun 1834 No. 22 dalam penerapannya ini di Keresidenan Tegal telah membawa dampak bagi masyarakat karena masifnya pembudidayaan tanaman perkebunan, mulai dari lepasnya petani dari kebiasaan menanam padi, tendensi komunalisasi sawah untuk kepentingan perkebunan, peningkatan jumlah penduduk akibat dari dorongan beban kerja, munculnya tenaga kerja upahan, keuntungan bagi pemerintah, dan gerakan perlawanan petani.

Alasan penulis memilih Judul “Tanam Paksa Di Keresidenan Tegal: Kajian Tentang Sistem, Pelaksanaan dan Dampaknya (1830-1870)” didasarkan pada beberapa pertimbangan, yakni:

1. Ketersediaan sumber yang cukup untuk mendukung penulisan topik ini.
2. Sistem tanam paksa telah menjadi momen penting bagi perubahan kehidupan masyarakat di Keresidenan Tegal.

¹² “Statistiek Tegal 1832”, Arsip Residensi Tegal No. 211.5. ANRI

¹³ “Residentie Tegal Kultur Verslag 1868”, Arsip Residensi Tegal No. 18.5, ANRI.

¹⁴ *Ibid.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis mencoba merumuskan permasalahan yang untuk menjadi dasar untuk pembahasan di bab yang selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana gambaran umum Keresidenan Tegal sebelum penerapan sistem tanam paksa?
2. Bagaimana proses pelaksanaan tanam paksa di Keresidenan Tegal?
3. Apa dampak sistem tanam paksa bagi kehidupan sosial-ekonomi di Keresidenan Tegal?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

- 1) Menggambarkan kondisi umum di Keresidenan Tegal sebelum masa tanam paksa.
- 2) Menjelaskan proses pelaksanaan tanam paksa di Keresidenan Tegal.
- 3) Mengkaji dampak penerapan sistem tanam paksa bagi kehidupan sosial-ekonomi di Keresidenan Tegal.

1.3.2 Manfaat

- 1) Manfaat teoretis untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam mengenai kebijakan tanam paksa dan dampaknya bagi kehidupan sosial ekonomi petani di Keresidenan Tegal dari latar belakangnya, penerapannya, dan dampak yang timbul.
- 2) Manfaat praktis kajian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi petani dalam skala regional maupun nasional.

1.4 Ruang Lingkup

Penulisan sejarah memiliki ciri utama yaitu lingkup spasial, lingkup temporal, dan lingkup kajian sebab berbeda dengan ilmu lain yang sibuk mencari generalisasi justru sejarah sangat memperhatikan aspek keunikan di setiap peristiwa. Pada

dasarnya dengan adanya lingkup spasial, lingkup temporal, dan lingkup kajian juga akan membuat kajian juga akan lebih fokus.

Lingkup spasial kajian ini adalah wilayah Keresidenan Tegal. Keresidenan Tegal pada waktu sistem tanam paksa menjadi salah satu daerah di Jawa yang menjadi lokasi pengembangan secara intensif berbagai tanaman perkebunan, terutama tebu dan kopi. Keresidenan Tegal terbagi dalam tiga Kabupaten yaitu Tegal, Pemalang, dan Brebes. Pada keresidenan ini peningkatan luas perkebunan tebu hampir enam kali lipat, dari awalnya 500 *bahu* pada tahun 1833¹⁵ kemudian di akhir dasawarsa sistem tanam paksa menjadi 2.950 *bahu*. Jumlah pabrik gula juga meningkat dari 1 pabrik yaitu Pangka pada kemudian meningkat menjadi 8 pabrik gula, yaitu terdapat di Kabupaten Tegal (Pabrik Pangka, Pabrik Kemanglen, Pabrik Dukuhwringin, Pabrik Adiwerna, dan Pabrik Pagongan), Kabupaten Pemalang (Pabrik Comal dan Banjardawa) dan Kabupaten Brebes (Pabrik Jatibarang).¹⁶ Kopi ditanam di setiap kabupaten yang ada di Keresidenan Tegal. Pada akhir sistem tanam paksa tercatat di Kabupaten Tegal kopi ditanam di Distrik Gantungan, di Kabupaten Pemalang kopi ditanam di Distrik Mandiraja, dan Distrik Bongas, dan di Kabupaten Brebes kopi di tanam di Distrik Bumiayu, Distrik Lebaksiu, dan Distrik Salem.¹⁷

Lingkup temporal yang diambil yaitu pada tahun 1830-1870. Tahun 1830 dipilih sebab menjadi tonggak awal ditetapkannya tanam paksa dan tanam paksa ini yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial ekonomi petani di Keresidenan Tegal. Pada tahun 1870 dipilih karena merupakan waktu penghapusan sistem tanam paksa, perkebunan yang dikuasai pemerintah kolonial dihentikan dan disewakan ada swasta Belanda atau pihak non pemerintah lainnya.¹⁸ Pada tahun 1870 ini dikeluarkan *Suikerwet* (Undang-Undang Gula) dan *Agrarisch wet*

¹⁵ “Statistiek Tegal 1832”, *loc. cit.*

¹⁶ “Residentie Tegal Kultuur Verslag 1868”, *loc. cit.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ong Hok Ham, *Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara* (Jakarta:Kompas, 2002), hlm. 63.

(Undang-undang Agraria), yang berisi penarikan diri pemerintah kolonial dari pengelolaan perkebunan tebu, jaminan hukum bagi swasta dalam memperoleh akses terhadap hak tanah yang awalnya dimonopoli, serta kesempatan pada petani untuk dapat menjadi tenaga kerja bebas.¹⁹ Kendati masih terdapat proses dalam peralihan tersebut dan variasi dari masing-masing pabrik di Jawa tetapi tidak dapat ditolak bahwa dua undang-undang tersebut merupakan katalis dari masuknya swasta secara besar-besaran kedalam perekonomian perkebunan di Hindia-Belanda.

Kajian ini mencoba menjelaskan bagaimana perkebunan muncul, berkembang dan membawa dampak sosial ekonomi. Kajian ini dapat dimasukkan dalam lingkup kajian sejarah sosial-ekonomi. Kuntowijoyo mengkategorikan sejarah ini dalam sejarah sosial, yaitu sejarah yang wilayah garapannya paling luas, dalam hal ini sejarah ini tidak hanya membicarakan petani dan sejarahnya tetapi masyarakat desa dalam arti sosial-ekonomi.²⁰ Persoalan yang diperhatikan dalam sejarah sosial ekonomi adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan struktur dan perubahan, kelas golongan sosial dan dimensi-dimensi sosial ekonomi.²¹ Membicarakan sejarah sosial ekonomi di Indonesia sendiri tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang ekonomi perkebunan, politik ekonomi pemerintah kolonial selama abad XIX dan XX bergeser dari politik perdagangan ke politik produksi telah membawa penduduk pribumi kedalam tatanan ekonomi dunia. Proses yang demikian membuat penduduk yang memiliki tanah dan tenaga kerja digabungkan modal dan keterampilan yang ikut di bawa oleh bangsa Eropa. Interaksi antara faktor ini mewarnai dinamika perkembangan yang terjadi pada sejarah sosial ekonomi di Indonesia.²²

¹⁹ D.H. Burger, 1957, *op.cit.*, hlm.250.

²⁰ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogya: PT. Tiara Wacana, 2003), hlm. 39.

²¹ Djoko Suryo, *Transformasi Masyarakat Indonesia dalam Historiografi Indonesia Modern* (Sleman: STPN Press, 2009), hlm. 64.

²² Soegijanto Padmo, "Beberapa Hal Mengenai Kajian Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia: Sebuah Survai" dalam *Humaniora*, 10 Januari-April 1999, hlm.10.

1.5 Tinjauan Pustaka

Berbagai studi telah dihasilkan mengenai sistem tanam paksa. Banyak pendapat mengenai pengaruh sistem tanam paksa ini bagi kehidupan sosial ekonomi di Jawa. J.H. Boeke membuat konsep “dualisme ekonomi” yaitu munculnya sistem ekonomi kapitalis yang dibawa oleh kolonialisme yang berdampingan dengan sistem ekonomi tradisional. Sistem yang bertolak belakang ini akhirnya membawa perubahan pada suprastruktur pedesaan di Jawa.²³ Geertz mengembangkan konsep “Involusi Pertanian” untuk menggambarkan pertumbuhan penduduk tetapi tidak dibarengi oleh perluasan kesempatan kerja pada sektor perkebunan pemerintah sehingga semua angkata kerja itu masuk kedalam sektor pertanian petani, dengan demikian cara untuk menampungnya adalah dengan memperumit pertanian sehingga muncul model pertanian yang terwujud dalam rumitnya sistem hak milik, sewa menyewa semakin rumit, dan, pengaturan kerja gotong royong semakin rumit.²⁴ Berbeda dengan beberapa orang yang telah disebutkan sebelumnya, Elson yang juga telah mengkaji sistem tanam paksa berpendapat bahwa sistem tersebut tidak mungkin menyebabkan kemunduran ekonomi dan mungkin telah memajukan pembangunan pedesaan.²⁵ Berdasarkan pengamatan Elson terdapat perbedaan cukup besar di setiap daerah tempat tanah dan tenaga kerja dimobilisasi pada masa sistem tanam paksa, sehingga sulit untuk menyimpulkan dengan sederhana sebagai satu sistem.²⁶ Pada konteks Jember,

²³ J.H. Boeke dan D.H. Burger, *Ekonomi Dualistis* (Jakarta: Bharata,1973), hlm. 27-28.

²⁴ Clifford Geertz, *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia* (Jakarta:Bathara Karya Aksara, 1983), hlm 86

²⁵ R.E. Elson, “Kemiskinan dan Kemakmuran Kaum Petani pada Masa Sistem Tanam Paksa di Pulau Jawa”, dalam Anne Booth, William J.O ‘Malley, dan Anna Weideman (penyunting) , *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta:LP3ES, 1988), hlm. 51-73.

²⁶ R.E. Elson, *Village Java Under Cultivation system, 1830-1870* dikutip oleh Pierre van der Eng, “Change Challege: Current Themes in Economic History of Indonesia”, *NEHA Bulletin* 10 (2), hlm. 89-113.

Nawiyanto juga menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang perkebunan dapat beriringan dengan peningkatan kemampuan daerah dalam menghasilkan surplus beras untuk ekspor.²⁷ Jawa adalah wilayah yang luas dan berbagai kajian tersebut baru memberikan gambaran secara parsial. Lebih banyak kajian perlu dilakukan dan skripsi ini dimaksudkan sebagai upaya ke arah ini sehingga akan diperoleh gambaran yang lebih lengkap.

Satu tesis yang penulis temukan karya Alamsyah berjudul "Perkembangan Perkebunan Dan Pelabuhan Di Keresidenan Tegal 1830-1900" yang membahas hubungan antara perkembangan perkebunan yang berada di *hinterland* dengan interrelasinya pada perkembangan pelabuhan di Keresidenan Tegal yang bersifat mutualisme sehingga mampu menjadi pelabuhan impor dan ekspor dalam skala internasional yang didorong oleh kebijakan pemerintah kolonial.²⁸ Pembahasan yang luas dari kajian ini seakan lebih banyak memperhatikan perkembangan dari pelabuhan di Keresidenan Tegal. Pembahasan perkebunan pada periode sistem tanam paksa mekipun telah ada dalam kajian ini namun belum memberikan suatu gambaran yang utuh mengenai penerapan sistem tanam paksa di Karesidenan Tegal misal, belum dibahas mengenai sistem kepemilikan tanah dan kecenderungan yang muncul waktu penerapannya di Keresidenan Tegal, sistem sosial dan pengorganisasian sistem kerja, catatan kriminalitas semisal perampokan, pencurian, hingga berpuncak pada meletusnya gerakan perlawanan dari petani. Hal yang telah disebutkan sekaligus dapat dimengerti sebagai pembeda dari kajian yang telah dilakukan oleh Alamsyah.

Buku Tanto Sukardi yang berjudul *Tanam Paksa Di Banyumas: Kajian Mengenai Sistem, Pelaksanaan, dan Dampak Sosial Ekonomi*, buku ini membahas penerapan sistem tanam paksa di Banyumas untuk seluruh komoditas dari mulai

²⁷ Nawiyanto, S. "Perubahan Ekonomi di Jember masa Kolonial", dikutip dalam Nawiyanto, "Trends In Economic Historiography Of Indonesia Since 1990", dalam J. Thomas Lindblad dan Bambang Purwanto, *Merajut Sejarah Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta:Ombak, 2010), hlm. 93.

²⁸ Alamsyah, "Perkembangan Perkebunan Dan Pelabuhan Di Karesidenan Tegal (1830-1870)", *Tesis* pada Program Magister Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2004, hlm. 244-245.

awal penerapan hingga akhir periode sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa menurut penulis telah membawa perbaikan kualitas hidup masyarakat Banyumas dengan parameter kenaikan jumlah penduduk. Kenaikan jumlah penduduk ini ternyata juga membawa masalah turunan yaitu semakin banyaknya jumlah pencari kerja sedangkan pekerjaan terbatas bahkan dalam sektor industri gula yang merupakan sektor yang paling padat karya pada masa tersebut.²⁹ Oleh karena itu angkatan kerja yang tidak terserap kedalam sektor industri hanya mampu menekan kebutuhan hidup sampai batas minimum. Kelebihan dari kajian ini terletak pada pengungkapan sektor kerajinan yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat yang tidak terserap kedalam sektor industri, yang diabaikan dari banyak penulis mengenai sistem tanam paksa yang menganggap secara umum masyarakat Jawa hanya bertumpu pada sektor agraris. Perbedaan kajian ini dengan yang dikaji oleh penulis jelas berada pada skop spasial yang dibahas tetapi kurang lebih kajian ini memberikan gambaran yang memadai tentang sistem tanam paksa dalam tingkat lokal. Kelemahan-kelemahan pada kajian Sukardi terdapat pada penggunaan data yang justru setelah sistem tanam paksa terutama seperti data-data kriminalitas yang mestinya jika dianggap sebagai dampak langsung harus berada dalam satu waktu dengan penerapan sistem tersebut.

Buku selanjutnya adalah hasil karya Edi Cahyono yang berjudul *Pekalongan 1830-1870: Transformasi Petani Menjadi Buruh*, buku ini membahas tentang perubahan yang terjadi di Pekalongan akibat hadirnya industri gula mulai dari struktur sosial, kemudian penyerapan tenaga kerja yang didasarkan dari dampak pembagian tanah pada awal sistem tanam paksa yang dengan tendensi mengistimewakan golongan tertentu misal, kerabat para birokrasi lokal, sehingga para petani yang tidak memiliki tanah tidak mendapat jatah akhirnya harus bekerja kedalam sektor industri gula. Pucaknya adalah demonstrasi yang diakibatkan upah

²⁹ Tanto Sukardi, *Tanam Paksa Di Banyumas: Kajian mengenai Sistem, dan Dampak Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Paelajar, 2014), hlm. 142-143.

yang telalu kecil yang diterima oleh *planter* (penanam tebu).³⁰ Kelebihan dari kajian ini memberikan suatu perjalanan historis yang lengkap mengenai industri gula di Jawa, khususnya di Keresidenan Pekalongan, dengan memberikan data yang cukup memadai. Kekurangan dari kajian ini terletak pada pembahasan mengenai demonstrasi yang dilakukan oleh *planter* yang kurang mendapat penekanan sehingga seperti terkesan biasa saja. Perbedaan yang nampak adalah apa yang dikaji oleh Cahyono hanya berkisar pada dinamika industri gula, sedangkan kajian mengenai Keresidenan Tegal ini mengambil pembahasan yang lebih luas.

Buku Jan Breman yang berjudul *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial* membahas mengenai cara pemerintah kolonial dalam menguasai basis produksi untuk melancarkan sistem tanam paksa. Basis produksi ini adalah tanah dan tenaga kerja yang dalam sistem produksi tradisional terkait erat. Tanggung jawab dari para penguasa tanah ini juga berarti harus membayar pajak dalam bentuk uang dan kerja wajib. Para penguasa tanah ini harus melakukan berbagai kerja wajib pada penguasa tetapi juga dalam menunjang aktivitas perkebunan. Bagi yang tidak menggarap tanah umunya hidup bergantung pada para penguasa tanah ini, dan mereka sering kali dimanfaatkan untuk mengatikan para pemilik tanah dalam memenuhi layanan kerja wajib.³¹ Kelebihan dari kajian ini mampu memberikan suatu pembahasan jelas mengenai strategi penyerapan angkatan kerja ke dalam sistem perekonomian perkebunan yang didukung oleh birokrasi dari tingkat paling bawah (desa) hingga tingkat atas (bupati) secara jelas yang menandakan bahwa semua dalam prosesnya dengan sistem sistem tanam paksa sama-sama mencari untung. Kelemahan dari kajian ini terletak pada penjelasan yang kurang mengenai porsi sejauh apa dampak ekonomi yang timbul dari berbagai penyerapan angkatan kerja ini sehingga kurang

³⁰ Edi Cahyono, "Pekalongan 1830-1870: Transformasi Petani Menjadi Buruh Industri Perkebunan", hlm 90, <https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/09/edi-cahyono-pekalongan-1830-1870.pdf> diakses pada 17/09/2020.

³¹ Jan Breman, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonia* (Jakarta:L P3ES, 1986), hlm. 10.

mendapatkan suatu kajian yang utuh, padahal intinya sistem tanam paksa sebenarnya adalah suatu model pembangunan ekonomi. Perbedaan yang ada di dalam kajian Breman dengan yang dikaji penulis terletak pada lingkup bahwa Breman hanya membatasi pada masalah sosial yang timbul sedangkan penulis juga sampai ke permasalahan ekonomi.

Buku Latifatul Izzah yang berjudul *Keresidenan Madiun Pada Masa Cultuurstelsel 1830-1870*, yang membahas mengenai tanam paksa di Madiun. Buku ini menguraikan mengenai keberhasilan penanaman tebu dan kopi, yang didorong dari banyak segi mulai dari komunalisasi tanah, tenaga kerja yang semakin banyak akibat naiknya jumlah penduduk, perubahan petani menjadi buruh, dan peranan para *bekel* yang cukup penting bagi pemerintah kolonia.³² Kelebihan dari buku ini adalah penonjolan peran wanita dalam sistem tanam paksa yang bagi banyak penulis bahkan tidak disinggung sama sekali karena banyak penulis hanya melihat periode ini hanya merupakan periode kerja keras yang hanya mungkin dikerjakan bagi para pria. Kelemahan buku ini terletak pada pembahasan yang kurang bagi dampak negatif yang timbul dari pesatnya kenaikan jumlah penduduk pada periode sistem tanam paksa. Perbedaan dengan kajian yang dilakukan Izzah terletak pada skop spasial berikut dengan koreksi pada bahwa dalam jangka waktu yang lama penambahan penduduk ini juga menciptakan masalah-masalah krusial terutama mengenai kebutuhan ekonomi.

1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori

Penulisan sejarah mutakhir menghendaki kemampuan untuk menjelaskan peristiwa dan proses sejarah secara memadai. Untuk tujuan ini penulisan sejarah membutuhkan pendekatan dan teori dari ilmu lain sebagai ilmu bantu.³³ Teori dibutuhkan karena merupakan instrumen yang berperan dalam mengidentifikasi hubungan-hubungan yang berpotensi penting dalam peristiwa sejarah, dengan

³² Latifatul Izzah, *Karesidenan Madiun Pada Masa Cultuurstelsel 1830-1870* (Yogyakarta:Best Publisher, 2018), hlm. 80.

³³ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 23.

menggunakan teori dapat dirumuskan mengenai kecocokan antara kecenderungan dengan data-data yang diamati.³⁴

Pendekatan menentukan dimensi dari kajian yang diteliti. Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi. Menurut Damsar dan Indrayani sosiologi ekonomi dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu: pertama sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antar masyarakat, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dan ekonomi, sedangkan yang kedua pendekatan sosiologi dalam rangka memahami fenomena ekonomi.³⁵ Merujuk pada pengertian pertama maka proses yang dikemukakan adalah bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi dan ekonomi mempengaruhi masyarakat atau dapat dikatakan interaksi kedua komponen tersebut. Masyarakat sebagai realitas eksternal-objektif akan menuntun individu melakukan kegiatan ekonomi seperti apa yang boleh diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan dimana memproduksinya. Tuntutan tersebut dapat berdasarkan budaya, agama, dan hukum. Aturan sistem tanam paksa berdasarkan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* tahun 1834 No. 22 telah memberikan batas-batas mengenai pekerjaan yang harus dikerjakan petani di Keresidenan Tegal dalam mekanisme produksinya, meskipun kerap kali terjadi penyelewengan oleh birokrasi tradisional. Sistem feodal diperkuat kembali mendorong petani menjadi rentan dieksploitasi dalam posisinya sebagai tenaga kerja yang merupakan faktor produksi. Hal ini memicu pada keadaan yang tidak diuntungkan dari petani sehingga meletus suatu peristiwa sosial yaitu gerakan perlawanan yang terjadi di Keresidenan Tegal pada 1864.

Teori merupakan abstraksi dari kenyataan yang menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial. Tingginya tekanan sosial ekonomi yang terjadi selama sistem tanam paksa berlaku petani meresponya dengan menaikkan jumlah anak dalam keluarga untuk memenuhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk

³⁴ Heater Sutherland, "Meneliti Sejarah Penulisan Sejarah", dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptarini, *Perfektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 53.

³⁵ Damsar, dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 11.

kewajiban kerja pada pemerintah kolonial dan tenaga kerja untuk perawatan tanaman subsisten, teori ini disebut dengan, *Labour-demand* yang dicetuskan oleh Benjamin White.³⁶ Menurut Benjamin White variable naiknya jumlah penduduk ini dapat dilihat berdasarkan tersedianya tanah untuk kaum tani, perkembangan industri kerajinan yang terhambat, dan tenaga kerja wanita. Tersedianya tanah untuk kaum tani sangat penting karena dengan demikian mereka masih memiliki sumberdaya untuk melakukan produksi tanaman pertanian yang mendukung kehidupan subsistensi. Perkembangan industri kerajinan yang terhambat menjadi ciri karena pada saat itu daripada menciptakan tenaga kerja ahli yang membutuhkan waktu lebih lama lebih baik menjadi kuli pada perkebunan atau pabrik karena lebih menawarkan keuntungan yang mendukung perekonomian keluarga dengan upah yang diterimanya. Upah yang ini berguna sebagai pendapatan tambahan pada keluarga tani. Terakhir adalah tenaga kerja wanita menjadi penting hadirnya karena pada dasarnya ketika kaum lelaki menjadi tenaga kerja wajib pada saat yang sama untuk urusan subsisten mereka yang menggantikannya, sehingga perawatan kedua tanaman tersebut tetap terpelihara dengan baik dan kuantitas produksinya terjaga.³⁷

1.7 Metode Penelitian

Sejarah sebagai ilmu membutuhkan metode. Menurut Garraghan, metode sejarah merupakan suatu kumpulan yang sistematis yang berasal dari prinsip-prinsip dan peraturan yang bermaksud membantu dengan efektif untuk pengumpulan sumber sejarah, pengujian sumber secara kritis, dan menyajikan sintesa dalam bentuk tertulis.³⁸ Louis Gottschalk menyatakan bahwa metode sejarah adalah proses

³⁶ Benjamin White, "Demand for Labour and Population Growth in Colonial Java" dalam *Human Ecology*, Vol. 1, No. 3, 1973, hlm. 217-236.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Gilbert J. Garraghan, *A guide to Historical Method*, dikutip oleh Wasino dan Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan* (Yogyakarta: Magnum Pusaka Utama, 2018), hlm. 11.

menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.³⁹ Pengertian metode sejarah dengan demikian dapat disederhanakan sebagai langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh kebenaran sejarah.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah yang dikemukakan oleh Louis Gottschalk. Rekonstruksi sejarah dapat dilalui dengan empat tahap, yaitu: (a) pengumpulan sumber (heuristik), (b) Menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik (kritik sumber), (c) interpretasi, (d) menyusun menjadi sebuah kisah (historiografi).⁴⁰

Heuristik adalah usaha mencari dan mengumpulkan sumber sejarah. Upaya yang dilakukan penulis dalam tahap heuristik ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis yang memiliki keterkaitan dengan tema. Dokumen adalah jejak pikiran dan perbuatan oleh orang-orang zaman dulu.⁴¹ Hal ini dilakukan karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di abad ke-19 hanya meyisakan dokumen tertulis.

Pada dasarnya sifat dokumen ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu dokumen sezaman dikategorikan sebagai sumber primer dan dokumen yang telah lewat dari skup peristiwa dikategorikan sebagai sumber sekunder.⁴² Pada sumber primer dalam kajian ini meliputi arsip dan catatan sezaman yang memiliki relevansi dengan penyelenggaraan tanam paksa di Keresidenan Tegal. Tempat yang dituju penulis untuk mencari sumber primer yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia terutama koleksi Arsip Residensi Tegal. Penulis berhasil mendapat arsip seperti *Algemeen Verslag 1824*, *Algemeen Verslag 1828*, *Statistiek 1832*, *Statistiek der Residentie Tegal 1836*, *Statistiek der Residentie Tegal 1836-1842*,

³⁹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Penerjemah Nugroho Notosusanto (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975) hlm. 32.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴¹ Charles Seignobos dan Charles-Victor Langlois, *Introduction To The Study of Histori: Pengantar Ilmu Sejarah*, penerjemah H. Suprianto Abdullah (Temanggung:Desa Pustaka Indonesia, 2019), hlm. 25.

⁴² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), hlm. 75.

Algemeen Verslag 1845, Algemeen Verslag 1850, Algemeen Verslag 1855, Kontrakten met indlandsche bevoking tahun 1858, Stukken den suiker onderneming te Kemanglen, Dukuhwringin; Adiwerna, tahun 1848, Heerendiensten en Tegal Besluiten tahun 1861, dan Residentie Tegal Kultuur Verslag tahun 1868. Sumber yang kedua yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder disini berupa buku dan jurnal. Tempat yang akan dituju untuk menggali sumber sekunder yaitu, Perpustakaan Jurusan Sejarah, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Pusat Universitas Jember.

Tahap kedua yaitu kritik sumber atau verifikasi sumber sejarah. Kritik sumber dilakukan agar dapat memperoleh otentisitas dan kredibilitas dari sumber yang didapatkan. Terdapat dua macam kritik sumber yaitu kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal dilakukan dengan mengkritik sumber dari bentuk fisiknya untuk membuktikan keaslian sumber (otentik)⁴³ sedangkan kritik internal dilakukan dengan mengkritik sumber dengan melihat isi substansinya untuk membuktikan bahwa sumber dapat dipercaya (kredibel).⁴⁴

Tahap ketiga yakni interpretasi yang merupakan upaya penafsiran dari sumber yang telah didapatkan setelah melalui kritik sumber. Pada tahap inilah proses analisis dari sumber sejarah dilakukan. Pada tahap ini juga peran dari pendekatan dan teori berguna sebagai alat analisis yang dapat menjabarkan suatu peristiwa sejarah.

Tahap yang terakhir yaitu historiografi. Pada tahap ini, dilakukan untuk penyusunan sumber-sumber yang telah melalui berbagai tahapan hingga diperoleh data yang valid (heuristik, kritik Sumber dan interpretasi), dan disusun menjadi sebuah tulisan. Historiografi bertujuan mengupayakan untuk menyajikan peristiwa sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bentuk dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, sebagai bentuk penulisan yang berupaya memaparkan permasalahan yang menjadi topik kajian ini yang terbentuk dalam

⁴³ Louis Gottschalk, *op.cit.* hlm. 81.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

hubungan kausalitas yaitu 5W+1H.⁴⁵ Penyajian secara teknis kajian ini mengacu pada pedoman penulisan yang berlaku dari Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.⁴⁶

1.8 Sistematika Penulisan

Kajian ini terbagi dalam empat bab, yaitu:

Bab 1 Pendahuluan, memuat bahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, tinjau pustaka, pendekatan dan kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab 2 menguraikan berbagai kondisi di Tegal sebelum penerapan sistem tanam paksa. Dalam hal ini dibahas Latar Belakang Keresidenan Tegal, bab ini terdiri dari sub bab kondisi geografis, birokrasi pemerintahan, demografis sebelum sistem tanam paksa, dan komoditas pertanian dan perkebunan sebelum tanam paksa di Keresidenan Tegal.

Bab 3 Sistem Tanam Paksa di Keresidenan Tegal, bab ini terdiri dari sub bab basis produksi, produksi komoditas perkebunan dengan sistem tanam paksa yang untuk penyelenggaraan sistem tanam paksa, dan dampak penyelenggaraan tanam paksa pada petani.

Bab 4 Kesimpulan, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan pada Bab 1.

⁴⁵ Sartono Kartodirjo, *op.cit.*, hlm. 10.

⁴⁶ Nurhadi Sasmita, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember* (Yogyakarta: Lembah Manah, 2012), hlm. 24-29.

BAB 2 KERESIDENAN TEGAL SEBELUM TANAM PAKSA

2.1 Lingkungan Geografis

Keresidenan Tegal merupakan salah satu wilayah yang berada di Jawa Tengah Bagian Utara (*Pasisir*). Panjang wilayah ini dari barat ke timur 58 *paal* dan utara ke selatan 36 *paal*, dengan luas 2.088 *paal* persegi.¹ Keresidenan Tegal bagian barat berbatasan dengan Keresidenan Pekalongan; bagian utara berbatasan dengan Keresidenan Banyumas; bagian timur berbatasan dengan Keresidenan Chirebon; dan bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa. Selain memiliki batas administratif daerah ini juga memiliki batas alam yang berupa, Sungai Losari di sebelah barat, Sungai Ulujami sebelah timur, Gunung Slamet di sebelah selatan, dan Laut Jawa di sebelah utara.² Bagian paling utara keresidenan ini merupakan pantai yang diikuti oleh lahan aluvium yang luas. Lahan aluvium ini dapat berubah menjadi lahan kwartier. Bagian tengahnya terdiri atas perbukitan tersier yang termasuk tanah campuran. Bagian paling selatan merupakan dataran tinggi dengan

¹ A. J. van der Aa, *Nedelandsch Oost-Indie: Beschrijving der Nedeerlandsche Bezittingen in Oost-Indie* (Amsterdam, J. F. schleijs, 1851), hlm. 256.

² P.P Roorda van Eysinga, *Handbukk der Landen, En Volkenkunde, Geschied, Taal, Aardrijks-Te Staatkunde van Netherlandsch Indie* (Amasterdam: L. Van Bakkenes, 1850), hlm 3.

puncaknya Gunung Slamet (dalam dokumen sering disebut juga Gunung Slamet dan Gunung Tegal).³

Gunung Slamet merupakan gunung kedua tertinggi di Jawa setelah Gunung Semeru. Gunung ini menjadi batas alami antara Keresidenan Banyumas dan Keresidenan Tegal. Gunung Slamet merupakan gunung aktif yang cukup tenang. Kondisi yang demikian cukup menguntungkan karena bencana akibat letusan gunung jarang terjadi di Keresidenan Tegal. Tercatat erupsi besar hanya sekali terjadi pada 1772 bersamaan dengan Gunung Cireme dan Papandayan di Jawa Barat. Tidak diketahui mengenai korban jiwa yang muncul pada tahun tersebut, tetapi ini adalah letusan paling besar karena pada tahun berikutnya di gunung ini hanya mengalami erupsi kecil. Pada tahun 1825 terjadi semburan asap. Pada tahun 1835 gunung ini memuntahkan sedikit lava pijar. Pada tahun 1849 kembali lagi terjadi semburan asap.⁴

Pada daerah selatan Keresidenan Tegal terdapat beberapa pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Slamet. Pegunungan Mandala di tenggara yang berada di Distrik Bongas, Pegunungan Koembang yang berada di Distrik Losari dan berbatasan dengan Chirebon, Pegunungan Kindong yang memanjang dari Distrik Losari, Bumiayu, Lebaksiu dan Bongas, Pegunungan Bankong yang berada di Distrik Losari berbatasan dengan Dayeuhluhur di Banyumas, dan Chirebon. Deretan pegunungan ini merupakan daerah yang tertutup hutan dengan tanah hitam subur yang cocok untuk ditanamai kopi.⁵

Hutan lainnya juga menyebar di bagian selatan Kabupaten Brebes, dan Pemalang dengan luas 340 mil persegi. Pada masa tersebut juga terdapat beberapa hutan jati yang luas yang dikenal dengan nama hutan jati Kali Wijin, Semingkir,

³ D.G. Stibbe dan F.J.W.H. Sandbergen, *Encyclopaediae van Nederlandsch Indie, Tweede Drunk Zevende Deel*, dikutip dalam Alamsyah, "Perkembangan Perkebunan Dan Pelabuhan Di Karesidenan Tegal (1830-1870)", *Tesis* pada Program Magister Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2004, hlm.45.

⁴ Frans Junghuhn, *Java, Zijne Gedaante, Zijn Plantentooi en inwendige bouw, twee afdeeling* ('s-Gravenhage: C.W. Mieling, 1853), hlm. 252.

⁵ A. J. van der Aa, *op.cit.*, hlm. 268.

Karang Asem, Ledok, Sanguem dan Babakan. Hutan jati ini mampu menghasilkan arang pertahun dengan kuantitas 40.000 *pikul*, selain itu hutan ini juga masih menghasilkan 7.000 vadem kayu yang diserahkan ke pemerintah.⁶ Adanya hutan ini tentu sangat mendukung bagi kebutuhan operasional pabrik gula terutama untuk kebutuhan pembakaran.

Keresidenan Tegal memiliki banyak sungai baik yang besar atau kecil. Salah satu sungai yang besar adalah sungai Comal, bahkan jika disusuri dengan perahu mayang membutuhkan waktu selama dua puluh jam.⁷ Sungai ini mengalir melewati Desa Moga dan Desa Randu Dongkal di Distrik Mandiraja, Desa Karang Asem di Distrik Bongas, lalu melewati Distrik Comal hingga bermuara di Laut Jawa. Sungai ini merupakan sungai besar yang menjadi tempat pertemuan banyak anak sungai seperti Polaga, Lumeneng, Suwakong, Sodong, Granggang, Painggang yang bersumber dari lereng Gunung Slamet. Sungai Comal menjadi salah satu sungai yang penting terutama untuk irigasi sawah tempat penanaman tebu di Distrik Comal pada waktu diterapkannya sistem tanam paksa.⁸

Sungai-sungai penting lainnya yaitu Waluh yang bersumber dari Pegunungan Pakambarang, Kali Gung yang bersumber dari Pegunungan Bentong, Pamali yang bersumber dari Pegunungan Tembok, Sungai Heran yang bersumber dari Pegunungan Geger Tiga, dan Kaboejoetan yang bersumber dari Pegunungan Kembang.⁹ Setidaknya terdapat 43 sungai yang tercatat di Keresidenan Tegal mengalir ke dataran rendah yang digunakan cocok untuk irigasi dalam kegiatan pertanian. Oleh sebab ini Keresidenan Tegal merupakan tempat yang subur yang telah dikenal sebagai lumbung padi yang mampu bersaing dengan ujung timur jawa (*Oosthek*).¹⁰

⁶ A. J. van der Aa, *op.cit.*, hlm.260.

⁷ P.P Roorda van Eysinga, *loc. cit.*

⁸ “Statistiek Tegal 1832”, Arsip Residensi Tegal No. 211.5. ANRI

⁹ A. J. van der Aa, *op.cit.*, hlm. 270-277.

¹⁰ Peter Boomgaard, *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880* (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 132.

Iklim pada daerah ini saat kemarau sangat panas dan derajat panasnya lebih tinggi dari Batavia. Angin pada saat kemarau sangat merugikan tanaman muda dan kesehatan orang yang baru saja pindah ke daerah ini. Angin ini datang dari arah barat daya dan timur laut. Angin ini dikenal dengan Angin Kumbang yang datang dari Pegunungan Kumbang kemudian melewati rawa-rawa di daerah Brebes. Hujan di Keresidenan ini turun pada bulan Oktober. Pada musim hujan angin mereda, tetapi hujan hampir setiap hari pada jam 4 sore disertai guntur. Guntur menyerang banyak orang di sini, biasanya korbannya sekitar dua puluh orang dalam setahun.¹¹

Catatan mengenai peran Keresidenan Tegal sebagai tempat penghubung telah ada sejak masa Kerajaan Mataram Islam. De Haan pada tahun 1622 yang melakukan perjalanan dari Tegal ke ibu kota Kerajaan Mataram di Kerta melaporkan bahwa dari Batavia ke Tegal jalur yang ditempuh menggunakan jalur laut, selanjutnya dari Tegal menuju ibu kota Mataram menggunakan jalur darat, dengan mengendarai kuda. Perjalanan dari Tegal ke Pemalang merupakan jalan yang bagus dengan dilingkupi hutan. Jalan dari Tegal ke Mataram merupakan jalur yang paling terkenal pada masa itu.¹² Hal ini menunjukkan bahwa pelabuhan yang berada di Tegal serta jalan telah menjadi kebutuhan bagi lalu lintas yang menghubungkan antara Batavia dan Mataram. Pelabuhan di Tegal menjadi penghubung yang penting untuk mengangkut berbagai tanaman komoditas dari Keresidenan Tegal. Pelabuhan ini berkembang hingga menjadi pelabuhan tingkat internasional di akhir abad ke-19. Ketika proyek pembangunan jalan raya pos dikerjakan pada masa Daendels, keresidenan ini menjadi salah satu daerah yang dilewati. Jalan besar ini membentang dari barat ke timur dengan panjang 59 *paal* yang memiliki sekitar 12 kantor pos, selain jalan raya pos ini terdapat juga jalan yang membentang dari utara ke selatan yang menghubungkan dengan

¹¹ P.P Roorda van Eysinga, *loc. cit.*

¹² Endah Sri Hartatik, *Dua Abad Jalan Pantura: Sejak Era Kerajaan Mataram Islam hingga Orde Baru* (Yogyakarta: Nurmahera, 2018), hlm. 47.

Banyumas.¹³ Jalan ini membuat Keresidenan Tegal menjadi simpul bagian barat bagi perkembangan perekonomian di Pantai Utara Jawa Tengah kedepannya.¹⁴

Lingkungan geografis yang demikian menunjukkan bahwa Keresidenan Tegal merupakan daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah perkebunan dalam skala yang luas. Faktor lingkungan alam maupun buatan mendukung bagi perkembangan sektor tersebut. Oleh karena ini ketika sistem tanam paksa diterapkan Keresidenan Tegal menjadi salah satu pusat perkebunan tebu dan kopi dalam skala yang luas.

2.2 Birokrasi Pemerintahan

Tegal awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Mataram. Tegal menempati posisi yang cukup penting yaitu sebagai tempat wedana bupati *Pasisir Kulon* mengawasi daerah *Pasisir* yang berada di barat kerajaan Mataram.¹⁵ Pada tahun 1600 daerah ini menjadi pusat pengumpulan persediaan untuk menyerang VOC di Batavia. Pada masa pemerintahan Amangkurat I, VOC mendapatkan keleluasaan untuk ikut campur dalam pergantian penguasa di Tegal sejak tahun 1680 karena jasanya dalam menumpas pemberontakan Tunojoyo di Jawa. Pada tahun 1743 muncul perjanjian baru antara raja Mataram dan VOC yang menyatakan bahwa VOC berhak untuk memiliki sedikit daerah yang ada di pesisir di sepanjang sungai yang menembus Laut Jawa.¹⁶ Pada tahun yang sama Tegal memiliki dua bupati yaitu Tumenggung Raksa dan Wiranegara sedangkan Pemasang dipimpin oleh seorang bupati yaitu Raden Aria Tjkranegara, masing-masing dari wilayah ini harus menyerahkan sejumlah beras pada VOC yang telah mendirikan kantor di Brebes,

¹³ P.P Roorda van Eysinga, *op. cit.*, hlm. 2-3.

¹⁴ Endah Sri Hartatik, *op. cit.*, hlm. 37.

¹⁵ B. Schrieke, *Indonesia Sociological Studies II, Ruler and Realism in Earlyn Jawa* (Bandung: The Huge, 1957), hlm. 205.

¹⁶ MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jkarta:IKAPI) 2008), hlm. 213.

Tegal, dan Pernalang.¹⁷ Perjanjian ini kemudian diperbaharui pada tahun 1746 yang menyatakan bahwa VOC memiliki hak yang mutlak dalam mengatur seluruh wilayah *pasisir*.¹⁸

Pada tahun 1782 Tagal masih dipimpin oleh dua bupati. Salah satunya adalah Tumenggung Tjakranegara. Pemecahan ini dilatar belakangi oleh perceraian antara Tumenggung Tjakranegara dengan anak dari Mangkunegara yaitu Raden Ayu. Raden Ayu kemudian menikah kembali dengan patih Djojonegoro yang mengakibatkan patih ini berhak mendapatkan sebagian kekuasaan di Tagal. Pada 1789 Pernalang memiliki bupati yang bernama Tumenggung Djayanegara, sedangkan Brebes memiliki bupati yang bernama Tumenggung Puspanegara.¹⁹ Bupati pada masa ini tidak memiliki hak dalam kegiatan politik dan perdagangan dengan asing. Kewenangan bupati pada tiap-tiap daerah adalah menjaga keamanan, mengumpulkan dan menyerahkan produk-produk yang telah dijadikan pajak yang ditetapkan VOC, yang pada masa itu hal ini disebut dengan pajak beras.²⁰

Sejak masa VOC telah ada jabatan residen yang merupakan agen politik yang mengawasi cara kerja pemerintah pribumi, dan menggunakan pengaruhnya sebagai representasi kekuasaan kompeni pada wilayah yang telah jatuh ke teritorialnya.²¹ Para residen ini juga didampingi oleh komandan (kepala militer), dan pengawas pertanian dalam mengurus wilayahnya.²² Jabatan residen ini diisi oleh para *onderkoopman* (saudagar junior), *koopman* (saudagar),

¹⁷ F.W. Stapel, "Corpus Diplomaticus Niderlando-Indicum (1726-1752)", *Vijfde Deel*, dalam *BKI, deel 96* ('s Gravenhage: Martinius Nijhoff, 1938), hlm. 380.

¹⁸ MC. Ricklefs, *loc. cit.*

¹⁹ J. Hageman, "Geschied- En, Aardrijkskundig, Overzicht van Java", dalam *TNI, deerde serie* (Batavia: Lange & Co, 1860), hlm. 308-309

²⁰ Peter Boomgaard, *op.cit.*, hlm. 53.

²¹ Clive Day, *The Policy and Administration of the Dutch in Java* (The Macmillan Company: New York 1904), hlm. 113.

²² Yuliati, Dewi. "Terbentuknya Propinsi Jawa Tengah", dalam *Jurnal Citra Leka dan Sabda*, 2010, hlm. 133.

opperkoopman (saudagar senior), ini merupakan hal yang biasa sebab dapat di pahami bahwa kepentingan awal dari VOC adalah untuk melakukan perdagangan.²³ Pada masa Daendels terjadi perombakan dalam sistem birokrasi, muncul sistem pembagian wilayah *prefectuur* yang dipimpin oleh *prefect* sebagai pengganti residen dengan tingkat yang sejajar.²⁴ Tegal waktu itu merupakan *prefectuur* tersendiri. Pada masa pemerintahan Raffles perubahan kembali terjadi dengan penghapusan sistem pembagian wilayah *prefectuur* dan mengembalikan sistem pembagian wilayah keresidenan dengan pemecahan Jawa menjadi 17 keresidenan.²⁵

Pada tahun 1816 di Keresidenan Tegal dipimpin oleh seorang residen yang juga berpangkat militer yang bernama Lieutenant A. A. Homer, dengan didampingi seorang asisten yang bernama William Ivatts.²⁶ Pada tahun 1822 jabatan residen diduduki oleh Mr. Jan Pieter Hulft v. Hoorn, sedangkan sekretaris diduduki oleh G.F. Koch, Bupati Tegal Raden Adipati Aria Reksanegoro, Bupati Brebes Raden Adipati Singa Sarie Penata Yoedo, dan Bupati Pemalang Mas Tumenggung Soera Laya. Kelengkapan lain dari birokrasi kolonial yaitu petugas pendapatan daerah C. G. Goldman, G. H. F. van Teylingen, dan F.A. Loth. Pada bagian kehutanan terdapat dua pegawai yaitu P.C. Koch dan C.F. Schmidgall.²⁷

²³ Berbagai jabatan pada masa VOC yaitu *klerk* (juru tulis), *boekhouder* (tenaga pembukuan), *onderkoopman* (saudagar junior), *koopman* (saudagar), *opperkoopman* (saudagar senior), *tweede opperkoopman* (saudagar senior kelas dua), dan *eerste opperkoopman* (saudagar senior kelas satu). Jabatan *eerste opperkoopman* memiliki peluang untuk menjadi anggota dewan luar biasa Dewan Hindia (*Ordinaris van Raad van Indie*) dalam *Hoge Regering* dan memiliki peluang menjadi Gubernur Jenderal. Lilie Suratminto, "Belajar Sejarah Melalui Pameran Koleksi Lukisan Jadoel", dalam *Paradigma: Kajian Budaya*, Vol.1, No.1, 2010, hlm. 63.

²⁴ Retno Winarni, *Modernisasi Birokrasi Di Keresidenan Besuki Abad XIX*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2018), hlm.3.

²⁵ Endah Sri Hartatik, *op. cit.*, hlm.55., dan Winarni, Retno. "Bertahan di Tengah Mekuatnya Kekuasaan Kolonial dan Moderniasi: Bupati-Bupati di Keresidenan Besuki Jawa Timur". *Disertasi* pada Program Doktorat Ilmu-Ilmu Humaniora Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2012. hlm. 2.

²⁶ *The Java Annual Directory and Almanac 1816*.

²⁷ *Staatsalmanak 1822*.

Pada tahun 1824 daerah Ulujami yang awalnya merupakan bagian dari Keresidenan Pekalongan bergabung dengan Keresidenan Tegal yang berada di bawah administrasi daerah Kabupaten Pemalang. Pemindahan ini berdasarkan ketetapan resolusi dari gubernur jendral tertanggal 13 Januari 1824 yang isinya Sungai Genteng, Desa Andar, sampai Sungai Laijang, Tumpang, dan Ulujami dimasukkan ke wilayah administrasi Keresidenan Tegal sekaligus menjadi batas paling barat Keresidenan Tegal.²⁸ Daerah ini awalnya merupakan daerah yang dihuni banyak orang China dibandingkan daerah lainya di Tegal.

Pada tahun 1827 jabatan residen diduduki oleh Van de Poel, sedangkan sekretaris dipegang oleh J. Verschuir, Bupati Tegal dan Brebes masih diduduki oleh orang yang sama tetapi untuk Bupati Pemalang diduduki oleh Raden Tumenggung Soemo Negoro. Kelengkapan dari pejabat kolonial yaitu tiga pegawai kantor pos J. F. Bloemhard, J. Woning, dan J. Faber (merangkap petugas gudang), pengawas pertimbangan L. Meuldyk, dan satu pengawas jalan kuda J. Mackenberg dan seorang dokter juga pengawas vaksinasi M. Degent, terdapat juga seorang pengawas budidaya kopi tetapi pada tahun tersebut kosong padahal satu tahun sebelumnya dijabat oleh J. A. Rombout.²⁹

Pada tahun 1832 Keresidenan Tegal secara administratif terbagi menjadi tiga Kabupaten, yakni Tegal, Brebes dan Pemalang. Pertama, Kabupaten Tegal dengan luas 460 *paal* persegi yang terdiri atas Distrik Tegal, Distrik Krandon, Distrik Maribaija, Distrik Kalisoka, Distrik Balamoa, dan Distrik Gantungan. Kabupaten Tegal menjadi pusat pemerintahan Keresidenan, sedangkan pusat pemerintahan Kabupaten terdapat di Distrik Tegal. Kedua Kabupaten Brebes dengan 956 *paal* persegi yang terdiri atas Distrik Brebes, Distrik Lebaksiu, dan Distrik Bumiayu. Ketiga, Kabupaten Pemalang dengan luas 672 *paal* persegi yang terdiri atas Distrik Pemalang, Distrik Comal, Distrik Mandiraja, Distrik Bongas, dan Distrik Comal Kidol.

²⁸ *Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1824, No.2.*

²⁹ *Staatsalmanak 1826 dan Staatsalmanak 1827*

Pada tahun tersebut Keresidenan Tegal memiliki jumlah total desa sebanyak 1.325.³⁰ Pada tahun 1834 akibat hadirnya perkebunan tebu dari Pabrik Pangka di beberapa wilayah seperti di Distrik Gantungan, Maribaija dan Balamoa, membuat daerah yang menjadi tempat penanaman ini kemudian berubah menjadi distrik tersendiri yang bernama Distrik Pangka.³¹ Hingga tahun 1845 telah masih terjadi perubahan administrasi di Kabupaten Tegal yaitu Distrik Kalisoka yang statusnya tidak lagi menjadi distrik lalu muncul distrik baru yaitu Distrik Dukuhwringin. Pada Kabupaten Brebes terdapat penambahan dua distrik baru yaitu Distrik Losari dan Distrik Salem. Pada Kabupaten Pemalang, Distrik Comal berubah nama menjadi Distrik Comal-lor.³² Hingga tahun 1869 tidak terdapat perubahan pada distrik-distrik yang telah terbentuk, tetapi jumlah desa telah berkurang menjadi 1.059³³ yang menandakan bahwa hal tersebut telah terjadi penyusutan dari 1832, yang disebabkan oleh pencatatan yang lebih baik atau pengintegrasian desa-desa kecil ke desa yang lebih besar.

³⁰ “Statistiek Tegal 1832”, *op., cit.*

³¹ S. Van Deventer, *op.cit.*, hlm. 635.

³² “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”, Arsip Residensi Tegal No. 12.8, ANRI.

³³ *Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1869*

Tabel 2.1
Nama Kepala Pemerintah di Keresidenan Tegal Tahun 1750-1834

Nama	Masa Jabatan	Jabatan
Gustaf Falck	1750- 1763	<i>Koopman / Residen</i>
Mathijs Willem de Man	1763- 1770	<i>Koopman / Residen</i>
Isaac Reijnst	1770- 1771	<i>Koopman / Residen</i>
Isaac Cornelis Domis	1771- 1776	<i>Koopman / Residen</i>
Alexander Cornabe	1776- 1777	<i>Koopman / Residen</i>
Issac Cornelis Domis	1777- 1784	<i>Koopman / Residen</i>
Godfried Carel Goekinga	1784- 1785	<i>Koopman / Residen</i>
Fredriek Jacob Rothenbuhler	1785- 1787	<i>Onderkoopman</i>
Johan Lubbert Umbgrove	1787- 1791	<i>Koopman</i>
Jacob Klaagman	1791- 1793	<i>Koopman</i>
Theodorus van Teylingen	1793- 1804	<i>Koopman / Residen</i>
Herman Adriaan Nederburg	1804- 1805	<i>Koopman / Residen</i>
Adriaan Pietersz Ez	1805- 1806	<i>Onderkoopman</i>
Andreas Hartsinck	1806- 1808	<i>Opperkoopman / Residen</i>
Adries van Braam	1808	<i>Prefect</i>
J.A van Middelkoop	1808- 1810	<i>Prefect</i>
Pieter Veeris	1810- 1811	<i>Prefect</i>
Wm. Davies	1811- 1812	Residen
Johan Fredrik Zhaclzcky	1812- 1813	Residen
Johan Palmer Keasbery	1813- 1814	Mayor Residen
Arthur Asthon Homer	1814- 1816	Mayor Residen
W.H. Forssten	1816- 1816	Letnan Kolonel Residen
Willem Bloem Rz	1816- 1818	Residen
Germain Felix Meylan	1818- 1821	Residen
Mr. Jan Pieter Hulft v. Hoorn	1821- 1822	Residen
Hr. B. Hendrik Alex Bester	1822- 1828	Residen
Pieter Van de Poel	1828- 1834	Residen

Sumber: J.A. Vriesman, "Hoofden van gewestelijk bestuur van Tegal", dalam *TNI, derde serie* (Batavia: Lange & Co, 1860), hlm. 75-76.

2.3 Demografi Sebelum Sistem Tanam Paksa

Tidak ada catatan yang akurat mengenai demografi di Keresidenan Tegal yang pada masa kerajaan Islam hingga awal datangnya bangsa Eropa ke Jawa. Gambaran mengenai demografi di Tegal yang tergolong cukup tua dapat ditemukan dalam catatan perjalanan Tome Pires pada awal abad ke-16. Pada persinggahannya di Tegal dia menyebutkan bahwa setidaknya daerah ini dihuni oleh penduduk dengan jumlah 4000 jiwa, dengan tambahan sekitar 1500 jiwa

yang tersebar di desa pedalaman sekitar daerah ini.³⁴ Pencatatan mengenai penduduk yang selanjutnya merupakan pencatatan yang lebih umum lagi yaitu Jawa secara keseluruhan, dan meskipun ada pencatatan yang lebih khusus tetapi itu bukan di Tegal.

Pada awalnya pencatatan kependudukan dilakukan oleh birokrasi VOC lantaran adanya ketidakpercayaan dari laporan yang diperoleh dari birokrasi tradisional yang seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Usaha pencatatan kependudukan ini pertama kali dilakukan di daerah kekuasaan VOC yaitu di Batavia dan sekitarnya pada tahun 1624, 1632, dan 1638.³⁵ Pada masa tersebut pencatatan ini sangat terbatas bahkan pada beberapa periode selanjutnya, tidak ada yang secara rinci menyebutkan angka penduduk setiap daerah di Jawa, termasuk Tegal.

Pencatatan kependudukan juga dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang kerap kali terjadi antara penguasa pribumi terkait wilayah kekuasaan dan penduduk supaya kedamaian tetap terpelihara dan kepentingan VOC tetap berjalan semestinya.³⁶ Masalah ini pernah terjadi pada tahun 1782 di Tegal, ketika daerah ini diputuskan dipimpin oleh dua bupati. Pemecahan ini dilatarbelakangi oleh perceraian antara Tumenggung Tjakranegara dengan anak dari Mangkunegara yaitu Raden Ayu. Raden Ayu kemudian menikah kembali dengan patih Djojonegoro yang mengakibatkan patih ini berhak mendapatkan sebagian kekuasaan di Tegal. Pembagian kekuasaan ini dilakukan dengan kesepakatan Mangkunegara dan Gubernur Wilayah Pantai Utara Jawa yang saat itu dijabat oleh Siberg. Tumenggung Tjakranegara yang awalnya memiliki kekuasaan yang membawahi 3300 *cacah* berdasarkan hal ini harus membaginya menjadi dua. Tumenggung Tjakranegara akhirnya mendapatkan

³⁴ Tome Pires, *The Suma Oriental of Tome Pires*, penerjemah Armando Cortisio (London: Te Hakluyt Society, 1944), hlm. 184.

³⁵ JC. Breman, *Djawa Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Demografis* (Jakarta: Bhatara, 1971), hlm. 14.

³⁶ JC. Breman, *op.*, *cit*, hlm. 14-15.

kekuasaan sebesar 1800 *cacah*, sedangkan patih Djojonegoro mendapatkan 1500 *cacah*.³⁷ Tidak diketahui berapa *cacah* yang berada di bawah kekuasaan bupati Brebes ataupun Pemasang.

Penggunaan istilah *cacah* memang menimbulkan masalah yang cenderung rumit, Nedenburg mengatakan bahwa satu keluarga terdiri dari dua orang laki-laki yang mampu memanggul senjata, dua orang anak, dan dua orang perempuan.³⁸ Persamaan dari kata *cacah* adalah keluarga (*huisgeizen*) yang biasanya terdiri dari 4-6 orang. *Cacah* juga dapat dipahami sebagai sejumlah tanah garapan ketika berlangsungnya survei penduduk di Pantai Utara Jawa pada tahun 1795. Awalnya *cacah* digunakan untuk merujuk pada jumlah orang yang menggarap tanah dalam suatu desa.³⁹ Lain halnya Boomgard yang menunjukkan bahwa *cacah* merupakan jumlah tanah yang digarap oleh rumah tangga yang terikat dengan wajib kerja pada penguasa.⁴⁰ Terlepas dari kedua definisi sebelumnya fungsi *cacah* diduga digunakan untuk alat ukur pajak dari penguasa dari satu daerah yang diberikan sebagai *apanage* atau *lungguh* (tanah jabatan).⁴¹

Survei penduduk yang dilakukan di Jawa pada tahun 1795 menghasilkan penduduk Pantai Utara Jawa 1.495.908 jiwa (tanpa menyertakan Ulujami, Besuki, Panarukan dan Bawean), penduduk Jakarta dan Priangan 206.494, Jakarta dan sekitarnya 144.026 jiwa.⁴² Pada permulaan abad ke-19 Engelhard selaku Gubernur Pantai Timur Laut Jawa mengawali pencatatan penduduk yang lebih memadai. Engelhard menyebutkan bahwa jumlah penduduk Jawa pada tahun 1802 tercatat

³⁷ J. A. Van Der Chrijs, *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 160-1811, deel 1776-1787* (Batavia: M. Nijhoff, 1892), hlm. 608.

³⁸ S.G. Nederburgh, *Verhandeling over de Vragen enz* (Den Haag: IN' S Haage , 1802), hlm. 159.

³⁹ Soemarsaid Moertono, *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX* , (Jakarta: KPG,2017), hlm.178.

⁴⁰ Peter Boomgard, *op.cit.*, hlm. 354-355.

⁴¹ Soemarsaid Moertono, *op.cit.* hlm.179.

⁴² S.G. Nederburgh, *op. cit.*, 160. ; JC. Breman, *loc. cit.* ; J. Hageman, *op. cit.*, hlm. 267.

sebesar 3,5 juta jiwa.⁴³ Pada Tabel 2.2 dapat dilihat jumlah penduduk di Keresidenan Tegal pada waktu itu

Tabel jumlah penduduk di bawah merupakan gambaran pada permulaan abad ke-19. Berdasarkan hipotesis dari Gerrith Knaap jumlah penduduk untuk daerah yang telah disebutkan lebih banyak 10-20% dari tahun 1775 dengan acuan pertumbuhan penduduk berada pada angka sekitar 0,5%. Berdasarkan hipotesis ini, kepadatan jumlah penduduk pada tahun 1775 di Keresidenan Tegal berada pada angka 45- 50 jiwa/km persegi, Ulujami berada pada angka lebih dari 100 jiwa/km persegi, sedangkan Brebes dan Pemalang tidak sampai pada angka 50 jiwa /km persegi.⁴⁴

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk
Keresidenan Tegal dan Ulujami Tahun 1802/1803

Nama Daerah	Luas area (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
			Jawa	China ⁴⁵
Brebes	1.657	483	59.516	212
Tegal	913	807	102.259	259
Pemalang	900	498	41.290	94
Keresidenan Tegal	3.470	1.788	203.065	563
Ulujami ⁴⁶	96	150	13.632	216

Sumber: Van Niel dikutip oleh Gerrith Knaap, "Maritime trade in small-town Java around 1775; The cases of Tegal and Pekalongan" dalam Peter Boomgaard, Dick Kooiman dan Henk Schulte Nordholt (Editor), *Linking Destinies: Trade, Towns And Kin In Asian History* (Leiden: KILTV,2008), hlm. 87. Tabel ini di seleksi sesuai dengan kebutuhan.

⁴³ Pieter Creutzberg dan J. T. M. van Laanen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor, 1987), hlm. 26.

⁴⁴ Gerrith Knaap, "Maritime trade in small-town Java around 1775; The cases of Tegal and Pekalongan" dalam Peter Boomgaard, Dick Kooiman dan Henk Schulte Nordholt (Editor), *Linking Destinies: Trade, Towns And Kin In Asian History* (Leiden: KILTV, 2008), hlm. 87.

⁴⁵ Jumlah penduduk China yang dimasukan dalam tabel tidak termasuk golongan China Peranakan.

⁴⁶ Masih menjadi bagian wilayah Pekalongan

Berdasarkan data yang tersedia dalam tabel kepadatan penduduk dari orang Jawa di Keresidenan Tegal berada pada angka 59 jiwa/km persegi, dengan rincian yang paling sedikit berada di Brebes dengan 40 jiwa/km persegi, diikuti dengan Pemalang 46 jiwa/km persegi. Tegal menjadi tempat paling padat yaitu 112 jiwa/km persegi meskipun masih kalah dengan Ulujami dengan angka 142 jiwa/km persegi. Perhitungan ini berdasarkan perhitungan sederhana (*crude population density*) yang menunjukkan bahwa di Keresidenan Tegal, pada Kabupaten Brebes yang merupakan daerah yang masih sepi penduduk. Sedangkan perbandingan antara orang Jawa dengan China dalam satu daerah dapat dinyatakan dalam angka berikut; Brebes 281 : 1 ; Tegal 395 : 1 ; Pemalang 440 : 1 ; Keresidenan Tegal 357 : 1 ; Ulujami 64 : 1.

Berdasarkan perhitungan ini maka Pemalang dan Tegal menjadi daerah yang paling sedikit jumlah orang China jika dibandingkan dengan dengan orang Jawa, diikuti oleh Tegal dan Brebes. Ulujami menampati posisi yang paling atas oleh karena hal ini tidak mengagetkan karena menjadi daerah yang disewakan pada Tan Leko. Kehadiran China yang relatif tinggi juga dapat diartikan sebagai indikasi tingkat komersialisasi ekonomi yang lebih tinggi. Pada 1802-1803 dari 150 desa di Ulujami berada di bawah kendali bisnis dari orang China.⁴⁷

Pencacatan kependudukan selanjutnya dilakukan oleh Raffles. Berdasarkan tabel diatas Jumlah penduduk yang diperoleh jika dibandingkan dengan tahun 1802/3 maka jumlah ini jauh lebih sedikit. Angka yang diperoleh Raffles memang sering kali dianggap tidak menunjukkan data yang lengkap dari kenyataanya, karena dianggap angkanya terlalu rendah.⁴⁸ Permasalahannya adalah belum ada alternatif yang dapat diandalkan mengenai masalah kependudukan di Jawa pada periode tersebut. Berdasarkan hal ini maka data berdasarkan pencacatan Raffles yang dijadikan pijakan dalam gambaran demografi tahun 1815. Jumlah penduduk di Keresidenan Tegal dapat dilihat pada tabel 2.3. Berdasarkan jumlah penduduk di Keresidenan Tegal yang tertera pada tabel di

⁴⁷ Gerrith Knaap, *op. cit.*, hlm.88

⁴⁸ Pieter Cruetzberg dan J. T. M. van Laanen, *op. cit.*, hlm. 27.

bawah Brebes masih menjadi daerah yang jarang penduduknya, di ikuti oleh Pemalang. Tegal masih menjadi tempat yang paling padat penduduknya. Hal ini tidak berubah jika dilihat pada tahun 1802/1803, tetapi terkait dengan pertumbuhan penduduk hanya Tegal yang mengalami kenaikan jumlah penduduk, Pemalang dan Brebes yang terjadi adalah sebaliknya, walaupun jumlah pada tahun 1802/03 hanya menyangkut orang Jawa dan China.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Keresidenan Tegal Tahun 1815

Kabupaten	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pekerjaan (jiwa)		Jawa (jiwa)		China (dan Asing) (jiwa)	
		Petani	Selain Petani	Pria	Wanita	Pria	Wanita
Tegal	123.208	11.693	7.990	57.224	64.014	518	507
Brebes	24.833	5.546	1.143	9.118	15.111	220	363
Pemalang	30.374	16.342	1.549	13.823	16.123	177	219
Total	178.415	22.766	10.682	80165	95.248	915	1.089

Sumber: Thomas Stamford Raffles, *The History Of Jawa, Vol. II* (London: John Murray, 1830), hlm. 287.

Pada sektor pekerjaan untuk menyederhanakan angka dalam tabel pada tiap daerah antara petani dan pekerjaan di luar petani dapat dinyatakan pada perbandingan sebagai berikut: Tegal 2 : 1 ; Brebes 5 : 1 ; Pemalang 11 : 1. Hal ini menunjukkan bahwa daerah Pemalang merupakan daerah yang paling besar dalam jumlah penduduknya yang bergantung pada sektor pertanian, hal ini juga didukung oleh kepemilikan ternak (kerbau dan alat pembajak) 0.33 per keluarga (Brebes 0.32 dan Tegal 0.16)⁴⁹, sedangkan Tegal menjadi daerah yang sebaliknya. Perbandingan lainnya antara orang China dan Jawa dapat di sederhanakan sebagai berikut: Tegal 1 : 119 ; Brebes 1: 42 ; Pemalang 1 : 76. Hal ini menunjukkan bahwa Tegal dan Pemalang merupakan tempat bagi China (dan Asing) menjadi kelompok yang paling minor terkait dengan jumlah penduduk.

⁴⁹ Thomas Stamford Raffles, *The History Of Jawa, Vol. II*, (London: Jhon Murray, 1830, hlm. 873.

Pada bulan Oktober hingga November 1820 Keresidenan Tegal diserang oleh wabah cacar air yang merenggut 1200 jiwa.⁵⁰ Pada tahun 1821 di Jawa sedang terjadi wabah penyakit kolera yang menewaskan banyak penduduk di tiap daerah termasuk Keresidenan Tegal. Kolera ini mulai menyerang pada bulan Mei hingga tanggal 8 Juni tercatat kolera telah membunuh 180 orang perhari di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes 40-50 orang per hari, dan Kabupaten Pemalang 20 orang perhari. Wabah ini mulai mereda pada akhir juli.⁵¹ Kondisi ini juga diperparah dengan naiknya harga beras.⁵² Penyakit ini ditangani oleh pemerintah dengan memberikan 14.000 obat yang dibagikan pada penduduk.⁵³ Dua penyakit tersebut tetap menjadi wabah yang mengerikan pada abad tersebut.

Pada tahun 1823 tercatat sebanyak 5000 keluarga dari Distrik Gantungan di Kabupaten Tegal dan Distrik Losari di Kabupaten Brebes melakukan migrasi. Pada tahun 1824 sepertiganya dari penduduk yang melakukan migrasi ini telah kembali. Wabah kolera masih menyerang pada bulan Juli dan Juni di Kabupaten Tegal dan Pemalang, selain itu pada November dan Desember demam juga menyerang penduduk di keresidenan ini. Tidak disebutkan berapa korban jiwa yang jatuh dalam angka tetapi pada tahun 1824 laporan pemerintah menyebutkan bahwa taraf hidup penduduk merosot dan tidak ada pertambahan jumlah penduduk yang berarti.⁵⁴

Pada tahun 1826 jumlah penduduk 122.641 jiwa, Pada tahun 1827 jumlah penduduk 135.420 jiwa, pada tahun 1828 jumlah penduduk 147.692 jiwa, pada tahun 1829 jumlah penduduk 153.780 jiwa, pada tahun 1830 jumlah penduduk

⁵⁰ C. L. Blume, *Over de Asiatische Cholera* (Amsterdam: C. G. Sulpke, 1830), hlm. 124

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 51.

⁵² *Bredasche Courant*, No. 47, Sabtu 24 November 1821, hlm. 1.

⁵³ C. L. Blume , *op cit.*, hlm. 259

⁵⁴ "Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1824", Arsip Residensi Tegal No. 11.4. ANRI

168.644 jiwa.⁵⁵ Angka kependudukan ini bersumber pada data statistik pemerintah yang ditulis oleh seseorang yang tidak diketahui namanya dan dimuat dalam *TNI*, angka tersebut menunjukkan bahwa dibandingkan pada tahun 1815 jumlah penduduk di Keresidenan Tegal jauh lebih sedikit. Hal lain yang dapat dilihat adalah sejak tahun 1826-1830 kenaikan rata-rata pertahun sebesar 11.500 jiwa.

Mengenai jumlah penduduk pada tahun 1830 ada beberapa perbedaan dengan penulis lain yaitu Sturler berada jumlah penduduk pada tahun 1830-1835 berada pada angka 230.000 jiwa sedangkan menurut Blekker berada pada angka 179.078 jiwa.⁵⁶ Perbedaan ini memang didasari oleh interpretasi yang berbeda dengan faktor yang khas dari para penulis mengenai penyebab penambahan jumlah penduduk. Mengingat hal ini maka angka dari tahun 1830 menggunakan angka yang dimuat dalam *TNI* yang berdasarkan data pemerintah, karena bersifat lebih netral meskipun dengan keterbatasannya.

Berdasarkan hal ini maka dapat diamati bahwa sejak tahun 1802-1830 jumlah penduduk yang berada di Keresidenan Tegal mengalami penurunan dari titik awal pada tahun 1802/1803 hingga pada tahun 1826, kemudian mengalami penambahan hingga tahun 1830. Pertambahan tersebut meskipun konsisten tetapi jumlah yang di capai tidak pernah menyamai tahun 1815. Sederhanya dapat dikatakan bahwa kenaikan jumlah penduduk bukan kecenderungan yang berada di Keresidenan Tegal sebelum sistem tanam paksa diterapkan.

2. 4 Komoditas Pertanian dan Perkebunan Sebelum Sistem Tanam Paksa

Tegal telah dikenal sebagai daerah yang mengandalkan beras sebagai komoditas utama. Perekonomian di daerah Tegal dapat dilihat dalam gambaran Tome Pires yang menyatakan bahwa daerah ini merupakan tempat yang memiliki beras lebih banyak dari pada tempat lainnya yang dipasok dari daerah pedalamannya dan

⁵⁵ “Bevolking van Java en Madura” dalam *TNI, Eerste Deel* (Batavia : Ter Lands-Drukkerij, 1839), hlm. 162.

⁵⁶ Sturler dikutip J.C. Breman, *op cit.*, hal. 35. Bandingkan dengan P. Bleeker, *Nieuwe Bijdragen Tot De Kennis Der Bevolking statistiek van Java* (‘s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1870), hlm. 62.

dijual di daerah pesisir.⁵⁷ Selanjutnya pada tahun 1743 ketika perjanjian mengenai penyerahan daerah Pasisir para bupati harus menyerahkan sejumlah pajak beras dengan kuota yang telah ditentukan VOC. Bupati Brebes dan Wiradesa harus menyerahkan 800 *koyang*⁵⁸, Bupati Tegal harus menyerahkan 600 *koyang*, dan Bupati Pemalang harus menyerahkan 200 *koyang* pertahun.⁵⁹

Pada 1754 VOC juga menarik pemasukan dari para syahbandar yang ada di Tegal dengan hasil sebesar 265 real. Beberapa tahun berikutnya tercatat bahwa selain beras pada 1762 Tegal juga harus menyerahkan 10 *pikul* katun pada mereka.⁶⁰ Hal ini tidak mengejutkan karena pada dasarnya Tegal telah memainkan peran penting sebagai tempat pengiriman tekstil yang telah di mulai sejak abad ke-16.⁶¹ Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa perekonomian daerah pesisir mampu berkembang tentunya di tompang oleh adanya daerah pedalaman (sebagai tempat penghasil beras) yang keduanya memiliki kontribusi bagi perkembangan perekonomian domestik, pedagang asing, maupun VOC.

Berdasarkan peraturan dari Gubernur Jenderal pada tahun sejak tahun 1769 tentang kuantitas penyerahan yang baru, tertera bahwa daerah Brebes barang yang harus diserahkan sejumlah 1000-500 balok kayu, 45-50 *koyang* beras, dan untuk Tegal dan Pemalang 24 *pikul* kain katun menjadi maksimal 16 *pikul* kain katun. Pada tahun 1780, Brebes yang dipimpin oleh Tumenggung Puspanegara menyerahkan 50 *koyang* beras, 5 *pikul* katun, dan 5 *pikul* indigo, serta 500 balok kayu, dengan uang *cacah* yang harus diserahkan sebesar 243.45 *rds*.⁶² Tegal yang dipimpin oleh Bupati Tjakranegara harus menyerahkan 200 *koyang* beras, 13 *pikul* katun, uang *cacah* sejumlah 771,42 *rds*. Pemalang yang dipimpin Bupati

⁵⁷ Tome Pires, *loc. cit.*

⁵⁸ 1 *koyang* = 1.729,32 kg

⁵⁹ F.W. Stapel, *loc. cit.*

⁶⁰ J. A. Van Der Chrijs, *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 160-1811, zesde deel 1750-1754* (Batavia: M. Nijhoff, 1892), hlm. 672.

⁶¹ Gerrith Knaap, *op. cit.* hlm. 83.

⁶² 1 *rds* (*rijkdaalder*) = f 2,5

Reksanegara harus menyerahkan 250 *koyang* beras, 6 *pikul* kain katun, 7 *pikul* indigo dan uang *cacah* sebesar 308,36 *rds*.⁶³ Selanjutnya masing-masing barang yang diserahkan ini juga mendapatkan pembayaran dari VOC meskipun jumlahnya dibawah harga normal pasar pada saat itu. Pembayaran yang diterima oleh bupati Tegal sebesar 2.090 *rds*, Tegal 10.825 *rds*, Pemalang 4.481 *rds*.⁶⁴

Penyerahan barang di keresidenan ini juga menyertakan indigo sebagai salah satu sebagai komoditas daerah. Tanaman ini memang berkembang di daerah pesisir sejak zaman VOC, salah seorang yang berhasil mengembangkannya tanaman ini adalah bupati pekalongan Djayadiningrat I, yang membudidayakan tanaman ini di daerah Pekalongan dan Pemalang yang kemudian menyebar ke beberapa daerah lainnya, misalnya Brebes.⁶⁵ Mengenai perkembangan tanaman perkebunan lainnya misalnya kopi baru dikembangkan di daerah ini memasuki abad ke-19.

Tabel 2.4
Tanaman Kopi di Keresidenan Tegal 1802-1811

Tahun	Jumlah Pohon		
	Brebes	Tegal	Pemalang
1802-03	-	-	87.631
1803-04	-	-	9.600
1804-05	-	-	8.540
1805-06	-	-	-
1806-07	-	-	-
1807-08	-	2.749	-
1808-09	594.400	536.400	368.000
1809-10	685.600	1.406.800	368.000
1810-11	637.200	637.200	368.000

Sumber: L. A dan L. B dalam Staat Der Nederlandsche Oostindische Bezittingen Onder Het Bestuur Van Den Gouverneur-Generaal Herman Willem Daendels, Ridder , Luitenant- Generaal In De Jaren 1808 – 1811, 's Gravenhage, 1814.

⁶³ J.K.J De Jonge, *De Opkomst van Nederlandsch Gezag in Oost-Indie* ('s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1884), hlm. 419-421.

⁶⁴ Gerrith Knaap, *op.cit.*, hlm. 89

⁶⁵ Taufiq Ismail, dll., *Ensiklopedi Tokoh Pekalongan* (Pekalongan: Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2015), hlm. 170.

Kopi pertama kali tercatat dibudidayakan di daerah Pemalang pada tahun 1802-03 kemudian menurun pada dua tahun berikutnya dan tidak tercatat lagi. Kopi memang sudah mendapat perhatian di beberapa tempat, Priangan utamanya. Pada masa Daendels perluasan penanaman wajib kopi diperluas lebih lanjut dengan pengawasan negara.⁶⁶ Terbukti sejak masa pemerintahan Daendels jumlah pohon kopi yang ditanam melonjak di Keresidenan Tegal, sesuai dengan tabel diatas. Pada tahun 1808 jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam penanaman kopi sebesar 9.803 keluarga dengan jumlah panen yang diserahkan 1.363 *pikul* pada tahun 1810-11 jumlahnya tenaga kerja meningkat menjadi 10.356 keluarga dengan penyerahan panen sebesar 2.510 *pikul*.⁶⁷

Sementara itu atas berbagai penyerahan berbagai macam barang kepada pemerintah yang dilakukan oleh para bupati, mereka masing-masing masih mendapatkan sejumlah uang pembayaran. Bupati Brebes mendapatkan uang sebesar 1400 *rds*, Bupati Tegal yang pertama mendapatkan uang sebesar 4000 *rds*, Bupati Tegal yang kedua mendapatkan uang sebesar 1400 *rds*, dan Bupati Pemalang mendapatkan uang sebesar 2000 *rds*.⁶⁸ Jumlah ini yang lebih besar dari pada sekitar tahun 1775.

Pada masa Raffles pencatatan mengenai tanaman yang dibudidayakan dengan perkiraan hasil yang diperoleh dalam bentuk uang terlihat lebih jelas. Meskipun banyak mendapatkan kritik⁶⁹ tetapi informasi yang termuat tetap

⁶⁶ D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia* penerjemah Prajudi Admosudirdjo (Jakarta:J.B. Wolters, 1957), hlm. 143.

⁶⁷ L. A, L. B dan L. C, dalam “Staat Der Nederlandsche Oostindische Bezittingen Onder Het Bestuur Van Den Gouverneur -Generaal Herman Willem Daendels, Ridder , Luitenant- Generaal In De Jaren 1808 – 1811”, ‘s Gravenhage, 1814.

⁶⁸ Adrian Martitius Theodorus de Salis, *Korte Aantooning Van De Notabelste Verbeteringen En Redressen, Welke Sedert Den 1 Januari 1808 In Verschillede Vakken Van Regering En Administratie, In Hollandsch Indie Zijn Ingevoerd* (Batavia: C.Niemands VE,1809), hlm.123.

⁶⁹ Peter Boomgaard, “Merubah Ukuran dan Perubahan Ukuran: Pertumbuhan Pertanian di Pulau Jawa 1815-1875” dalam Anne Booth , William J.O ‘Malley, dan Anna Weideman (Penyunting), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm.169-170.

berharga terutama dalam menunjukkan tanaman apa saja yang sedang berkembang di Keresidenan Tegal serta nilai ekonomi yang di dalamnya..

Tabel 2.5
Budidaya di Keresidenan Tegal Pada Tahun 1815

Distrik	Sawah (jung ⁷⁰)	Tegal (jung)	Lahan Kopi (jung)	Produksi (Amat ⁷¹)			Nilai (Rupiah ⁷²)		
				Padi	Jagung	Kopi	Padi	Jagung	Kopi
Brebes	3.024	394	159	152.354	31.520	2.740	223.453	11.820	26.305
Tegal	5.920	204	21	367.198	16.335	541	538.557	6.125	5.198
Pemalang	2.817	293	145	114.820	23.499	2.551	168.403	8.812	24.491

Sumber: Thomas Stamford Raffles, *The History Of Jawa, Vol. II* (London: John Murray, 1830), hlm. 286.

Berdasarkan tabel 2.6 padi masih mengungguli tanaman lainnya dalam luas lahan produksi dan estimasi hasil. Berdasarkan tabel tersebut dengan asumsi sawah hanya lahan untuk padi, Tegal hanya untuk jagung dan lahan khusus kopi dikhususkan maka jika di cermati tiap-tiap daerah akan memiliki jumlah rata-rata produksi padi sebesar 51,05 *amat*. Jagung rata-rata tiap daerah mampu menghasilkan 80,09 *amat*. Kopi seharusnya Brebes dan Pemalang dapat menghasilkan 17,2-17,5 *amat* dan Tegal 25,7 *amat*. Nilai tukar dari masing-masing jenis barang jika dikalkulasikan dari kedua tabel estimasi produksi dan nilai maka akan menunjukkan harga tiap *amat* untuk beras 1,46 rupiah, jagung 0,37 rupiah, dan kopi 9,6 rupiah. Atas dasar ini dengan mengambil nilai rata-rata tiap jenis tanaman ini hasil yang diperoleh dalam satu *jung* untuk beras sebesar 74,53 rupiah, jagung sebesar 29,95 rupiah, dan kopi 193,2 rupiah.

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya kopi mampu menghasilkan nilai lebih banyak dalam daripada tanaman lain, tetapi petani Jawa umumnya memang dikenal dengan petani yang lebih sering menanam padi karena berhubungan

⁷⁰ 1 *Jung* = 2,8 Ha

⁷¹ 1 *Amat* = 122 kg

⁷² Mata uang ini digunakan pada masa raffles yang nilainya setara dengan gulden, Peter Boomgaard (2004), *op. cit*, hlm. 212.

dengan corak kehidupan yang subsisten.⁷³ Pada masa Raffles terdapat kebebasan untuk menanam tanaman lain karena lebih menguntungkan tapi bukan berarti hal ini menarik minat para petani dengan perekonomian tradisionalnya, dan justru berakibat buruk dengan dibarengi ditetapkannya sistem sewa tanah.⁷⁴

Pada tahun 1823 penerimaan daerah atas pajak tanah sebesar f 420.541 jumlah ini lebih tinggi daripada tahun 1824 dengan besar f 418.244. Belum terhitung hasil dari Daerah Ulujami, yang telah ditambahkan ke tempat tinggal ini pada awal tahun 1824 dari Keresidenan Pekalongan, dan yang penilaiannya untuk tahun 1824 berjumlah f 34.313. Sementara itu, untuk jumlah pendapatan daerah dari pajak kepemilikan seharusnya sebesar f 414.824, tetapi yang didapatkan pada Desember tahun tersebut hanya sebesar f 116.559,19. Hal ini dikarenakan kondisi buruk dari desa-desa akibat penyebab kolera dan demam yang memakan banyak korban.⁷⁵

Budidaya padi dalam laporan pemerintah pada waktu itu disebutkan dalam keadaan buruk karena adanya kekeringan panjang dan serangan hama belalang. Perihal budidaya kopi terdapat penanaman baru sebanyak 212.679 pohon, tetapi terkait hal ini pada daerah penanaman di Losari dan Bongas tidak ada penambahan pohon baru karena diinformasikan terdapat beberapa wilayah yang tidak cocok. Sementara itu untuk penanaman di daerah Gantungan sementara dihentikan karena banyaknya penduduk yang bermigrasi karena wabah kolera, bahkan karena hal ini pemerintah harus memberikan bantuan beras untuk yang masih tinggal di daerah tersebut. Selama setahun terakhir daerah ini menghasilkan

⁷³ Irhash Ahmady dkk, *Java Collpase: Dari Kerja Paksa Hingga Lumpu Lapindo* (Jakarta: Insistst press, 2010), hlm. 78

⁷⁴ Terbukti cara Raffles ini tidak mampu mendorong meningkatkan produksi tanaman perkebunan, dan lebih rendah dari zaman Daendels, pada sisi lainnya dengan adanya sewa tanah petani hanya punya beras sebagai komoditas untuk di jual akhirnya hal ini menjadi permainan tengkulak. Furnivall, *op.cit.*, hlm. 79., dan D.H. Burger, *op.cit.* hlm. 173-174.

⁷⁵ “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1824”, *op.cit.*

kopi sebesar 269.422 *pond* amsterdam yang dikirim ke Batavia, dengan harga yang diberikan atas pertukaran kopi ini sebesar dari f 33.1 per *pond*.⁷⁶

Menjelang penerapan sistem tanam paksa, pada tahun 1827 Keresidenan Tegal berhasil mengekspor beras dengan kapasitas 700 *koyang* dan kopi dengan kapasitas 5000 *pikul*. Pada tahun 1828, ekspor beras meningkat 2743 *koyang* kendati pada Kabupaten Pemalang dan Tegal tanaman ini masih banyak diserang oleh hama belalang. Ekspor kopi juga meningkat dengan kapasitas 19.990,5 *pikul* dengan kualitas yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Pendapatan daerah juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 1824, yaitu sebesar f 379.840,48.⁷⁷

Hingga tahun 1828 tercatat dalam laporan kepala komisi pertanian, bahwa tanaman tebu lebih banyak dibudidayakan di daerah Batavia lahan seluas 600 *jung*, Jepara 550 *jung*, dan Pasuruan 500 *jung*. Keresidenan Tegal hanya tercatat hanya membudidayakan tanaman ini dengan luas lahan 16 *jung*.⁷⁸ Tanaman ini dibudidayakan oleh para pengusaha China dalam skala kecil dan dalam produksinya berada di bawah pengawasan para pengusaha ini secara mandiri.⁷⁹ Jumlah gula yang diproduksi tidak diketahui tetapi berdasarkan laporan ini, produksi dari pabrik gula ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik, tidak untuk dikirim ke daerah lainnya.⁸⁰

Berdasarkan hal tersebut menjelang diterapkannya tanam paksa, tanaman komoditas perkebunan telah dibudidayakan meskipun dalam skala yang terbatas. Pada perkembangan tanaman-tanaman perkebunan selanjutnya ini akan diperluas secara signifikan, dan membawa dampak yang besar dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1828”, Arsip Residensi Tegal No. 11.6. ANRI.

⁷⁸ *Algemeen Verslag Wegen de Staat van Den Landbouw 1828*, Bijlage B.

⁷⁹ Anne Booth, William J.O ‘Malley, dan Anna Weideman, *op. cit.*, hlm. 104.

⁸⁰ *Algemeen Verslag Wegen de Staat van Den Landbouw 1828*, *loc.cit.*

BAB 3

SISTEM TANAM PAKSA DI KERESIDENAN TEGAL

3.1 Basis Produksi

3.1.1 Tanah

Jawa pada masa sebelum datangnya bangsa barat merupakan wilayah yang dimiliki para raja-raja yang berkuasa.¹ Amangkurat I pada tahun 1656 sebagai penguasa Kerajaan Mataram menyatakan bahwa rakyatnya tidak memiliki hak penguasaan atas benda apapun yang berada di wilayahnya. Segalanya yang berada di wilayahnya tersebut merupakan hak raja yang sedang berkuasa, termasuk tanah.² Interpretasi ini sederhananya menyatakan hak untuk menguasai tanah bergantung pada perijinan dari pihak kerajaan dan dalam pelaksanaannya raja berhak memungut pajak dari hasil tanah yang dikerjakan oleh rakyatnya. Kendati demikian hak atas tanah yang dimiliki raja pada dasarnya hanya bersifat politis bukan mutlak secara pribadi.³ Pada gilirannya muncul interpretasi tandingan yang

¹ Pigeaud, *Java in 14th Century, Vol. IV* (The Hague: Martinus Nijhoof, 1962), hlm. 525.

² H. J. de Graaf, *Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I* (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), hlm. 22-23.

³ Schrieke, *Sedikit Uraian Tentang Pranata Perdikan*, dikutip Tanto Sukardi, *Tanam Paksa di Banyumas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 24.

mengklaim bahwa hak untuk menguasai tanah ini hanya bergantung pada tanggung jawab kaum tani secara kolektif.

Dua interpretasi ini tidak mungkin saling dihadapkan dalam suatu sistem agraris yang rumit di Jawa. Akan tetapi, keduanya tetap memberikan uraian yang sama yang menyatakan bahwa hak dari para penggarap tanah ini bergantung pada organisasi yang lebih tinggi dari penggarap itu sendiri yaitu kaum tani secara kolektif ataupun kerajaan. Barulah sejak awal tegaknya negara kolonial pada abad ke 19 basis agraria memperjelas dirinya dengan watak komunal yang jelas di Jawa terutama ketika diberlakukan sistem tanam paksa.⁴ Kendati masih terdapat tanah-tanah yang dikuasai pribadi.

Sebagian besar penelusuran informasi dari pola penguasaan tanah yang berlaku di Keresidenan Tegal pada abad ke-19, mengacu pada laporan komisi Bergsma pada tahun 1868 yang dikenal sebagai *eindresumé* yang diterbitkan pada tahun 1876, 1880, dan 1896.⁵ Pada *eindresumé* jumlah desa Keresidenan Tegal yang diteliti sebanyak 32 desa, meskipun dapat dikatakan ini hanya jumlah yang kecil tetapi laporan tiga jilid ini berisi banyak informasi penting yang sangat berguna bagi penulis, terutama untuk menemukan kecenderungan yang terjadi di Keresidenan Tegal selama penerapan sistem tanam paksa.

Tanah yang ada di Keresidenan Tegal dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan penggarapnya yaitu tanah yang dikuasai birokrasi desa, tanah pribadi, dan tanah komunal. Penguasaan tanah ini terkait erat dengan struktur sosial masyarakat pada waktu itu. Golongan yang memiliki hak penguasaan atas tanah

⁴ Jan Breman, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonia* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 9-10.

⁵ *Eindresumé van het bij Goeverment Besluit dd. 10 Juni 1867 No.2, Eerste Gedeelte* (Batavia: ERNST & CO, 1876), *Eindresumé van het bij Goeverment Besluit dd. 10 Juni 1867 No.2, Tweede Gedeelte* (Batavia: ERNST & CO, 1880), *Eindresumé van het bij Goeverment Besluit dd. 10 Juni 1867 No.2, Derde Gedeelte* (Batavia: ERNST & CO, 1896). Tiga jilid buku ini kemudian dikenal dengan nama *Eindresumé*. Khusus jilid III ini tidak digunakan. Selanjutnya untuk jilid I dan II disingkat dengan nama *Eindresumé I dan II*.

adalah birokrasi desa dan *janggol/sikep*.⁶ Birokrasi desa mendapatkan posisi istimewa karena memiliki wewenang dalam mengatur urusan pertanahan di desanya seperti mengatur pembagian dan mengurus tanah yang ditinggalkan penggarapnya. *Janggol* adalah golongan petani kaya yang menggarap tanah pribadi atau tanah komunal yang menanggung beban kewajiban atas tanah yang dikuasainya. *Janggol* merupakan anggota inti desa yang biasanya dari keturunan para pendiri desa, pada golongan inilah sebenarnya penguasaan tanah terpusatkan.⁷

Birokrasi desa terdiri dari kepala desa yang biasanya disebut bekel dan para perangkat desa. Golongan ini mendapatkan tanah tersendiri sebagai gaji dari posisi mereka. Pada saat terjadi pergantian orang yang menjabat sebagai bekel atau perangkat desa tanah ini akan diberikan pada bekel atau perangkat desa yang baru. Di Keresidenan Tegal tanah yang digarap oleh birokrasi desa disebut dengan *bakon* yang berbentuk sawah. Besarnya tanah *bakon* untuk bekel biasanya ditentukan oleh pemerintah kolonial, sedangkan tanah *bakon* perangkat desa ditentukan oleh bekel. Selain tanah *bakon* para birokrasi desa biasanya juga memiliki tanah pribadi yang cenderung luas, dan pada pergiliran tanah komunal jika menghendaknya mereka dapat mengambil bagian dari sawah komunal.⁸ Jelas bahwa birokrasi desa ini telah menjadi golongan yang kuat dalam penguasaan tanah di pedesaan keresidenan Tegal.

Pada dasarnya mereka yang membuka tanah pertama kali mempunyai hak untuk menguasainya secara permanen dan mewariskannya pada anak cucunya. Siapapun berhak untuk membuka tanah, dan memiliki hak untuk menguasai tanah yang dipilihnya.⁹ Terdapat istilah yang berbeda untuk tanah yang akan dibuka,

⁶ Istilah *Janggol* digunakan untuk daerah Brebes dan Tegal, sedangkan *sikep* digunakan untuk daerah Pemalang.

⁷ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie, eerste deel* (Leiden:E.J. Brill, 706), hlm. 18.

⁸ *Eindresumé II, op. cit*, hlm. 88-95.

⁹ Desa Jatibarang kidul yang dibuka oleh orang arab yang memiliki gelar Panemahan Soero.

bubak/tetroeha untuk tanah yang akan dijadikan tegalan, *tetruka/dukoh* untuk tanah yang akan dijadikan pemukiman, *bera/ngabera* jika digunakan untuk pembukaan sawah.¹⁰

Langkah awal dalam membuka tanah ini dilakukan dengan pembangunan irigasi terlebih dahulu untuk daerah yang dilalui oleh air. Selanjutnya ditentukan batas-batas untuk tanah yang akan digarap oleh para pembukanya. Baru kemudian pembersihan lahan dari pohon dan semak belukar, setelah itu hak penguasaan atas tanah ini dapat dimiliki oleh para pembukannya. Pada tanah *bera* hak atas tanah ini dapat diperoleh jika pembangunan untuk irigasi telah selesai, tetapi jika tanah *bera* yang di buat merupakan tanah tadah hujan maka hak atas tanah ini dapat diperoleh jika tanah telah dibagi menjadi beberapa bagian (*galengan*), sedangkan pada tanah selain sawah hak diberikan setelah pembersihan dari pohon dan semak. Kecuali di desa Bantarbolang hak atas tanah ini baru diperoleh ketika tanah telah benar-benar diolah sepenuhnya. Penyebutan untuk sawah yang dibuka ini disebut dengan sawah *yoso/tjokrah*, sedangkan untuk tegalan disebut *taloen* atau tegal *yoso*.¹¹

Sawah *yoso* ditemukan pada 19 desa dan tegal *yoso* ditemukan pada 3 desa dari semua desa yang tercatat dalam *eindresumé*. Sawah *yoso* dan tegal *yoso* dapat diwariskan pada keturunannya dengan syarat yaitu mampu menjalankan kerja wajib *heerendiensten* atau *cultuurdiensten*, telah menikah, dan memiliki rumah. Syarat terakhir dapat tidak begitu dipertimbangkan asalkan syarat pertama mampu dipenuhi. Sawah *yoso* diwariskan terutama pada anak laki-laki tertua, atau jika terdapat anak perempuan dalam keluarga ini bagian dari anak laki-laki harus dua kali lebih besar daripada anak perempuan. Sawah yang telah diwariskan ini dikenal juga dengan *sawah warisan*. *Sawah warisan* jika terlalu kecil untuk diwariskan pada masing-masing keturunannya maka dapat digarap secara bergilir hingga pada generasi berikutnya ditetapkan siapa penggarap sah dari sawah ini. Jika penggarap sawah ini meninggalkan seorang janda harusnya mendapatkan

¹⁰ *Eindresumé II, op.cit*, hlm. 75.

¹¹ *Eindresumé II, Ibid*, hlm.76.

bagian dari 1/3 luas tanahnya, sawah yang dimiliki janda ini dikenal dengan *barang goena kaja toenggal sekajur*.¹²

Sejak zaman kompeni langkah yang diambil oleh bangsa asing sering kali berdampak pada perubahan penguasaan tanah yang ada di daerah ini, contohnya pada Desa Gintoeng, Distrik Comal Kidul yang telah dikontrakkan pada orang China membuat sawah yang awalnya sawah *yoso* diubah menjadi sawah *playangan*.¹³ Sawah *playangan* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut sawah komunal. Perubahan sawah *yoso* ke sawah *playangan* kerap dilakukan karena tanah *yoso* ditinggalkan pergi oleh penggarapnya, seperti yang telah terjadi pada tahun 1825 akibat dari gagal panen, tanah yang tidak subur, dan pengerahan penduduk untuk pembagununan jalan militer pada wilayah Banyumas dan Bagelen membuat para *janggol* ini tidak kembali ke Keresidenan Tegal, sawah *yoso* yang ditinggalkan ini kemudian dirubah menjadi sawah *playangan*.¹⁴ Penyebab lainnya yang membuat perubahan ini adalah meninggalnya *janggol* tanpa diketahui siapa ahli warisnya, seperti yang terjadi di Desa Kemandoran, Soerodadi, Tjegok Woengoe, Tegalandong, Tegalsawah, Karangmalang, Jatibarang Kidul, Kaliwangi, Sengon, dan Taraban. Kondisi ini kebanyakan disebabkan oleh epidemi yang menyebabkan banyaknya kematian serta diikuti oleh migrasi dari para penduduknya.¹⁵

Tanah *yoso* yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya dapat dijadikan sebagai tanah *playangan* jika telah memenuhi syarat waktu hingga dapat dikatakan ditelantarkan atau jika terdapat ahli waris tetapi belum memiliki cukup umur maka tanah ini dapat digarap terlebih dahulu oleh kerabat mereka dan dikembalikan setelah dewasa. Pada daerah Brebes tanah dapat dijadikan tanah *playangan* jika telah ditinggalkan oleh pemiliknya selama 10 tahun tanpa

¹² *Eindresumé I, op. cit.*, hlm, 57.

¹³ Terdapat 77 bahu sawah yang semuanya merupakan komunal, tanpa memiliki sawah pribadi di desa ini

¹⁴ *Eindresumé II, op. cit.* hlm. 71.

¹⁵ *Eindresumé II, Loc. cit.*

diketahui ahli warisnya, sedangkan di daerah Tegal, bervariasi dari 4, 5 bahkan hingga diatas 10 tahun. Pada daerah Pemalang jika pemilik tanah tidak memenuhi kewajibannya yang melekat pada penggarapan tanah tersebut, maka tanah yang awalnya *yoso* akan langsung dirubah menjadi tanah komunal, dengan batas waktu tidak sampai tiga tahun. Meskipun demikian jika pemilik tanah kembali ingin menggarap tanah tersebut, dapat dilakukan kapan saja asalkan menunaikan kewajiban yang melekat sebagai *janggol*.¹⁶

Sawah *playangan* yang digarap oleh *janggol* dinamakan *bakon koeli*, *djanggolan*, *bagian janggol*, dan *bagian tjarik*. Pada Keresidenan Tegal tidak ditemukan tegalan dengan penguasaan komunal, karena memang tanah tegalan bukan tanah yang di tanami oleh tanaman pokok. Penduduk yang ingin menggarap sawah *playangan* ini dapat disetujui asalkan telah memenuhi syarat supaya sawah *yoso* dapat diwarisi, terutama untuk kerja wajib yang menjadi penekanan. Kerja wajib menjadi salah satu pertimbangan paling penting dalam hal ini, bahkan seorang *janggol* dapat memperoleh bagian sawah yang lebih besar jika mampu memberikan tenaga kerja untuk kerja wajib yang lebih berat atau lebih banyak. Oleh karena ini *janggol adjeg* yang melakukan kerja wajib lebih berat (karena intensitas yang lebih tinggi) seharusnya mendapatkan bagian sawah yang lebih banyak *janggol sedeng*. Kerja wajib ini tidak harus dilakukan oleh *janggol* sendiri tetapi dapat juga dilakukan oleh keluarganya seperti anak laki-laki dan menantunya, atau bahkan numpang dan bujang yang bergantung pada *janggol*.¹⁷ Lebih lanjut penguasaan tanah di Keresidenan Tegal dapat dilihat pada Tabel 3.1.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 76-77.

¹⁷ *Eindresumé I*, *op. cit.* 69.

Tabel 3.1 Penguasaan Tanah di Keresidenan Tagal 1868

Distrik	Desa	No	Sawah (<i>bahu</i>)				Tegalan (<i>bahu</i>)		
			Sawah Pribadi	Sawah Komunal	Penggunaan lembaga desa		Kepemilikan Khusus	Tegal Pribadi	Tegal Komunal
					Kepala Desa	Perangkat Desa			
Tegal	Kemandoeran	1	-	41 $\frac{3}{8}$	3	6	20 ⁽¹⁾	-	-
	Kraton Lor	2	-	8 $\frac{3}{4}$	3	4 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{3}{4}$ ⁽²⁾	-	-
Krandon	Deboeng Lor	3	-	28 $\frac{3}{8}$	3	4 $\frac{1}{2}$	25 ⁽²⁾	-	-
	Pasarejan	4	-	4 $\frac{3}{4}$	6	5 $\frac{1}{2}$	49 ⁽²⁾	-	-
Maribaja	Soerodadi	5	420 $\frac{1}{2}$	190	4	13	-	-	-
	Tjegok	6	-	90	8	16 $\frac{1}{2}$	-	-	-
Doekoewringin	Woengoe	6	-	90	8	16 $\frac{1}{2}$	-	-	-
	Goemajoen	7	120 $\frac{3}{8}$	403	12	17	140 ⁽¹⁾	-	-
Pangkah	Tegalandong	8	31	241	12	14	130 ⁽¹⁾	-	-
	Pagirikan	9	-	44	4	10 $\frac{1}{2}$	43 ⁽²⁾	-	-
Gantoengan	Karang Woeloe	10	137 $\frac{1}{8}$	108 $\frac{1}{8}$	9	24	-	-	-
	Karang Malang	11	101 $\frac{5}{8}$	154	6	21	-	-	-
Brebek	Blabat	12	43	-	-	-	-	-	-
	Djatibarang	13	-	131 $\frac{1}{2}$	13	19 $\frac{1}{2}$	-	-	-
Losari	Kidoel	14	31 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{7}{8}$	5	8	-	-	-
	Kaliwangi	14	31 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{7}{8}$	5	8	-	-	-
Boemiajoe	Mandalajoe	15	180	-	-	-	-	-	-
	Sengon	16	1	49 $\frac{1}{2}$	7	32 $\frac{1}{2}$	36 ⁽³⁾	-	-
Lebaksioe	Taraban	17	279	5 $\frac{1}{4}$	5	4 $\frac{1}{4}$	-	-	-
	Tegalsawah	18	24	66 $\frac{1}{2}$	3	4 $\frac{1}{2}$	-	-	-
Salem	Goetji	19	-	-	-	-	-	95	-
	Pengarasan	20	167 $\frac{1}{4}$	23 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{3}{4}$	-	-	-	-
Pamalang	Pekaoeman	21	$\frac{1}{2}$	32	7	34 $\frac{1}{2}$	-	-	-

	Padoeroengan	22	-	147 $\frac{7}{8}$	6 $\frac{3}{4}$	24 $\frac{1}{4}$	-	-	-
	Pengarit	23	6 $\frac{3}{4}$	143	15	30	-	-	-
Tjomal Lor	Pekaoman	24	-	42 $\frac{1}{8}$	8 $\frac{5}{8}$	12 $\frac{1}{2}$	-	-	-
	Sitjeleng	25	15	97 $\frac{1}{4}$	16 $\frac{1}{4}$	13	-	-	-
Tjomal Kidoel	Lobaja	26	-	43 $\frac{3}{8}$	5 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{3}{8}$	-	-	-
	Gintoeng	27	-	77	7	17 $\frac{3}{4}$	-	-	-
Mandiradja	Karangmontjol	28	30	290	(4)	(4)	2 ⁽⁵⁾	-	-
	Bantarbolang	29	89	-	-	-	-	-	-
	Moga	30	143 $\frac{7}{8}$	3 $\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	-	1 ⁽⁵⁾	-	-
Bongas	Koeta	31	224 $\frac{1}{8}$	1	4 $\frac{1}{2}$	2	-	13 $\frac{1}{8}$	-
	Tenakir	32	-	-	-	-	-	168 $\frac{1}{8}$	-

Sumber: Bijlage A, *Eindresumé van het bij Goeverment Besluit dd. 10 Juni 1867 No.2, Eerste Gedeelte*, (Batavia: ERNST & CO, 1876), hlm. 14-15.

Keterangan :

1. Sawah desa ini telah diberikan pada desa lain.
2. sawah milik desa lain yang telah diberikan pada desa ini.
3. Sawah Pabrik Lemahabang.
4. Sawah milik kepala desa dan juru tulis yang tidak diketahui jumlahnya tetapi lebih dari 290 *bahu*.
5. Sawah digunakan oleh penghulu distrik.

Jumlah *janggol* akan dilakukan jika diperlukan dengan membagikan sawah secara lebih merata pada pergiliran tahunan sawah komunal. Desa-desanya seperti Pasarejan, Soerodadie, Goemajoen, Pangirikan, Pengarasan, Gintoeng, dan Karangmontjol masih dapat melakukan hal ini, tetapi tentu saja dengan mempertimbangkan kondisi atas ketersediaan sawah *playangan*. Hal yang sebaliknya terjadi pada desa Debong lor, Tjegok wongoe, Tegalandong, Kaliwangie, Tegalsawah karena terlalu luas sawah *playangan* telah terlalu kecil maka tidak memungkinkan untuk menambah jumlah janggol baru.¹⁸ Kondisi seperti ini bukan suatu masalah yang tidak dapat dipecahkan, terutama pada daerah yang menjadi tempat penanaman tanaman wajib. Cara lain untuk menambah jumlah *sikep* dapat dilakukan dengan membuka tanah komunal baru, seperti yang dilakukan pada tahun 1844 pada Desa Bantarbolang yang membuka area sawah baru untuk menambahkan 1600 keluarga dari golongan orang mondok yang asalnya terutama dari Distrik Bongas dan Distrik Mandiraja yang merupakan tempat penanaman kopi.¹⁹ Hal yang sama juga dilakukan pada Desa Sitjeleng yang membuka 29 *bahu* sawah baru yang digunakan untuk menambah jumlah Janggol. Penambahan jumlah janggol ini sebenarnya merupakan salah satu cara untuk memasukan jumlah tenaga kerja yang lebih besar dalam kerja wajib.²⁰

Pada desa yang terlalu sempit luas sawahnya dilakukan pemindahan sawah dari suatu desa ke desa lain. Hal ini terjadi pada Desa Kraton Lor (3.25 *bahu*), Desa Deboeng Lor (25 *bahu*), Desa Pesarejan (49 *bahu*), yang digunakan untuk membantu desa-desa di Krandon yang memiliki sedikit lahan yang tidak sebanding dengan budidaya tebu yang terkena pada *janggol*. Sawah ini dinamakan dengan *sawah potong legger*. Hal yang harus dipenuhi untuk hal ini adalah sawah yang terdapat pada desa-desa tersebut memang sepenuhnya tidak

¹⁸ *Ibid*, hlm. 66-67.

¹⁹ S. Van Deventer, *Bijdragen Tot De Kennis Van Het Landelijk Stelsel op Java, derde deel* (Zalt-Bommel, 1866), hlm.134.

²⁰ Robert Van Niel, *Sistem Tanam Paksa Di Jawa* (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 14.

digarap oleh penduduk desa itu, atau dapat dikatakan sisa kelebihan dari desa tersebut.²¹

Tanaman wajib di Kersidenan Tegal yang produksinya menonjol adalah kopi dan tebu. Tebu merupakan tanaman yang dibudidayakan bergantian dengan padi di sawah, sedangkan kopi ditanam ditanah yang reaktif kering (*woste gronden*).²² Berdasarkan *eindresumé* daerah yang cocok memiliki kategori *woste gronden* terdapat pada Distrik Gantungan, Losarie, Bumiayu, Lebaksiu, Salem, Bongas, dan Mandiraja.²³ Tebu merupakan tanaman yang membutuhkan irigasi yang baik yang ditanam pada prosedur penyisihan lahan seperlima dari lahan warga seperti dalam aturan.²⁴ Hasil panen tebu dari penanaman kemudian di angkut ke pabrik penggilingan yang didirikan dengan kesepakatan antara kontraktor dan pemerintah. Pabrik penggilingan tebu yang ada di keresidenan ini yaitu: Pabrik Pangka, Kemanglen, Dukuhwringin, Adiwerna, dan Pagongan, Pabrik Comal dan Banjardawa dan Pabrik Jatibarang.²⁵

Di Kabupaten Tegal berdirinya Pabrik Kemanglen, Dukuhwringin, Adiwerna, dan Jatibarang, memerlukan tindakan luar biasa terkait dengan penguasaan atau distribusi sawah di antara penduduk karena jarak yang berdekatan. Pada Pabrik Kemanglen, Dukuhwringin, dan Adiwerna kondisi ini disebabkan oleh penggunaan sungai yang sama untuk keperluan penggilingan tebu. Distrik Dukuhwringin menjadi tempat dua perusahaan beroperasi yaitu Kemanglen dan Dukuhwringin, tetapi karena Pabrik Adiwerna, di Distrik Krandon, tidak dapat beroperasi tanpa penggunaan tanah dari Dukuhwringin

²¹ *Eindresumé II, op. cit.* hlm.50.

²² Peter Boomgard, *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880* (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 146.

²³ *Eindresumé I, op.cit.*, hlm. 14-15.

²⁴ Clifford Geertz, *Agricultural Involution: The Process Of Ecological Change In Indonesia* (Barkeley : University Of California Press, 1963),. hlm. 55.

²⁵ P.J. Veth, *Aardrijkskundig En Statistisch Woordenboek Van Netherland Indie III* (Amsterdam: P.N. Van Kampen. 1869), hlm. 480.

menyebabkan penyesihan sawah dari Dukuhwringin ke Krandon. Hal ini diperparah dengan keadaan tanah di Distrik Krandon sendiri yang kurang subur yang akhirnya membuat daerah ini harus mendapatkan sawah dari Dukuhwringin sebesar 557 *bahu*, Tegal sebesar 160 *bahu*, dan Pangka sebesar 65 *bahu*.²⁶

Penanaman tebu di Kabupaten Brebes dan Pemasang, tidak mendapatkan masalah dalam hal distribusi sawah seperti yang terjadi di Tegal. Pada daerah ini sawah yang dimilikinya masih luas, dengan perkebunan yang tidak lebih dari 400 *bahu* dengan jarak yang berbeda dengan yang ada di Tegal. Desa yang memiliki banyak ladang menyerahkan sebagian untuk pergantian lahan yang ditanami tebu dengan desa lain, baik yang ikut tanam maupun tidak. Penyerahan sawah di sini hanya berlangsung sementara, atau hanya untuk menukar sawah yang ditanami tebu, dan untuk desa yang terlalu sedikit jumlah sawahnya.²⁷

Akibat hadirnya perkebunan tebu di Kabupaten Tegal, diputuskan untuk mendistribusikan sawah secara lebih merata kepada penduduk sedemikian rupa hingga pada mereka yang sebelumnya tidak mendapatkan jatah sawah komunal ataupun pribadi. Jumlah petani penanam tebu, dibandingkan dengan jumlah luas sawah yang ada, menunjukkan setiap rumah tangga akan berjumlah paling sedikit mendapatkan 1 atau 2 *bahu* tetapi hal ini masih memungkinkan untuk munculnya perbedaan.²⁸ Hal ini memang benar jika dilihat pada tahun 1841 di Kabupaten Tegal pada lokasi penanaman tebu sawah-sawah diubah menjadi sawah *playangan* dan dibagikan pada setiap kepala keluarga dengan besar 1 *ewoe* atau 2/5 *bahu*. Jumlah dari lahan yang bahkan di bawah satu *bahu* terjadi juga di Desa Jatibarang

²⁶ *Overzicht Betrekkelijk den Staat der Suikercultuur in Verband tot Het Voorkomende bij de Monographien der Reidentie Tegal dalam Stukken Betreffende Het Onderzoek Bij Besluit van den Gouverneur-Generaal an Nederlandsch Indie van 08 december 1853, no 10* (Batavia: Benomde Commisie (Commisie Umbgrove), 1857), hlm. 3.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁸ *Loc cit.*

Kidul dan Pengarit ketika sawah *playangan* dibagikan pada penggarap yang telah memenuhi syarat hanya sebesar setengah *bahu*.²⁹

Sawah-sawah komunal yang tidak dapat dikerjakan oleh penduduk desa dinamakan *kosong*, sawah ini dapat digarap oleh orang dari desa lainnya selama mau menanggung beban pajak seperti yang terjadi di desa Mandalajoe dan Tjikoja yang penduduknya menggarap sawah di Desa Banjar Kidul, Banjar lor, Pariagong, dan Tegalsawah, kegiatan ini dinamakan *mratang*.³⁰

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat bahwa sebenarnya total dari penanaman tebu untuk kebutuhan pabrik gula sebenarnya tidak lebih dari seperlima atau 20 % dari jumlah sawah yang ada di Distrik ini. Jumlah total sawah yang dimiliki oleh Distrik Dukuhwringin sebesar 8949 $\frac{1}{2}$ *bahu*. Pada tahun 1856 presentase untuk masing-masing kegunaan sawah di Distrik ini adalah 6,26 % untuk digunakan Krandon, 9,55 % untuk digunakan penanaman tebu (jumlah yang lebih besar jika dibandingkan jumlah keseluruhan yang digunakan untuk penanaman tebu seluruh Jawa dengan persentase 5 %, Pasuruan 12 %, Banyumas 8 % dan Kedu 1-2 %)³¹, dan 84.18 % untuk digunakan penanaman lainnya, sedangkan sawah komunal diketahui berkisar 83.7 %.

Pada Distrik Dukuhwringin jumlah persentase di atas tidak serta merta menunjukkan bahwa pada tiap desa yang ada didalamnya dapat mencukupi kebutuhan sawah. Kegiatan *mratang* menjadi jalan keluar bagi desa yang kekurangan sawah ini. Lebih lanjut lagi pada distrik ini terdapat 36 desa yang kekurangan sawah dengan rincian 25 desa tanpa penanaman tebu dan 11 desa dengan penanaman tebu, sedangkan disamping itu terdapat 31 desa dengan sawah yang memiliki sisa kelebihan dengan rincian 25 desa tanpa penanaman tebu dan 6 desa dengan penanaman tebu. Desa-desa yang kekurangan sawah tanpa penanaman tebu merupakan desa yang memang dari awal tidak dapat memenuhi

²⁹ Eindresumé II, *op. cit.* hlm. 72.

³⁰ Eindresumé I, *op. cit.*, hlm. 83.

³¹ Robert Van Niel, *op. cit.*, hlm. 142.

kebutuhan sawah dalam desanya yang dikarenakan adanya penyisihan sawah untuk Krandon atau memang luas sawahnya yang memang sempit.

Di Keresidenan Tegal penanaman tebu hampir menempati semua sawah milik petani akhirnya mereka harus mendapatkan ganti di daerah lainnya yang cukup jauh.³² Contoh dari kasus ini terdapat pada Desa Tegalandong sawah untuk penanaman tebu pada tahun 1856 seluas 279 *bahu* dan penggunaan sawah oleh petani desa tersebut adalah 223 $\frac{3}{4}$ dengan 100 *bahu* yang akan ditanami padi, tetapi jumlah tanah yang dapat digunakan di desa ini hanya sebesar 379 *bahu*, sehingga terdapat kekurangan sawah sebesar 123 $\frac{3}{4}$ *bahu*, untuk menutupi kekurangan desa ini *mratjang* sawah di desa lainnya dengan luas sebagai berikut: Slarang 90 *bahu*, Bloeboek 10 $\frac{1}{4}$ *bahu*, Slawie 2 $\frac{1}{2}$ *bahu*, Lebakgowak 8 *bahu*, Kaliesapoe 1 *bahu*, Kambangan 3 $\frac{1}{4}$ *bahu*, Djatiewala 2 $\frac{1}{4}$ *bahu*, dan Doekoewaroe 6 *bahu*. Kasus serupa juga terjadi di Desa Kagok, Kedaile, Pakembaran, Temboklor, Tembokkidul, dan Tembokwetan yang sawahnya kekurangan akibat ekspansi lahan penanaman tebu. Hal ini menunjukkan bahwa tanah komunal yang digunakan untuk kegiatan *mratjang* telah melewati batas lingkungan desanya sendiri, yang berarti sawah ini tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh penduduk desa tersebut saja.³³

Jumlah *janggol* akan dilakukan jika diperlukan dengan membagikan sawah secara lebih merata pada pergiliran tahunan sawah komunal. Desa-desa seperti Pasarejan, Soerodadie, Goemajoen, Pangirikan, Pengarasan, Gintoeng, dan Karangmontjol masih dapat melakukan hal ini, tetapi tentu saja dengan mempertimbangkan kondisi atas ketersediaan sawah *playangan*. Hal yang sebaliknya terjadi pada desa Debong lor, Tjegok wongoe, Tegalandong, Kaliwangie, Tegalsawah karena terlalu karena luas sawah *playangan* telah terlalu kecil maka tidak memungkinkan untuk menambah jumlah *janggol* baru.³⁴ Kondisi

³² D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, penerjemah Prajudi Admosudirdjo (Jakarta:J.B. Wolters, 1957), hlm. 218

³³ *Overzicht Betrekkelijk den Staat der Suikercultuur in Verband tot Het Voorkomende bij de Monographien der Reidentie Tegal, op. cit.*, hlm. 5.

³⁴ *Ibid*, hlm. 66-67.

seperti ini bukan suatu masalah yang tidak dapat dipecahkan, terutama pada daerah yang menjadi tempat penanaman tanaman wajib. Cara lain untuk menambah jumlah *sikep* dapat dilakukan dengan membuka tanah komunal baru, seperti yang dilakukan pada tahun 1844 pada Desa Bantarbolang yang membuka area sawah baru untuk menambahkan 1600 keluarga dari golongan orang mondok yang asalnya terutama dari Distrik Bongas dan Distrik Mandiraja yang merupakan tempat penanaman kopi.³⁵ Hal yang sama juga dilakukan pada Desa Sitjelijeng yang membuka 29 *bahu* sawah baru yang digunakan untuk menambah jumlah Janggol. Penambahan jumlah janggol ini sebenarnya merupakan salah satu cara untuk memasukan jumlah tenaga kerja yang lebih besar dalam kerja wajib.³⁶

Pada desa yang terlalu sempit luas sawahnya dilakukan pemindahan sawah dari suatu desa ke desa lain. Hal ini terjadi pada Desa Kraton Lor (3.25 *bahu*), Desa Deboeng Lor (25 *bahu*), Desa Pesarejan (49 *bahu*), yang digunakan untuk membantu desa-desa di Krandon yang memiliki sedikit lahan yang tidak sebanding dengan budidaya tebu yang terkena pada *janggol*. Sawah ini dinamakan dengan *sawah potong legger*. Hal yang harus dipenuhi untuk hal ini adalah sawah yang terdapat pada desa-desa tersebut memang sepenuhnya tidak digarap oleh penduduk desa itu, atau dapat dikatakan sisa kelebihan dari desa tersebut.³⁷

Tanaman wajib di Kersidenan Tegal yang produksinya menonjol adalah kopi dan tebu. Tebu merupakan tanaman yang dibudidayakan bergantian dengan padi di sawah, sedangkan kopi ditanam di tanah yang realtif kering (*woste gronden*).³⁸ Berdasarkan *eindresumé* daerah yang cocok memiliki kategori *woste gronden* terdapat pada Distrik Gantungan, Losarie, Bumiayu, Lebaksiu, Salem,

³⁵ S. Van Deventer, *Bijdragen Tot De Kennis Van Het Landelijk Stelsel op Java, derde deel* (Zalt-Bommel, 1866), hlm.134.

³⁶ Robert Van Niel, *Sistem Tanam Paksa Di Jawa* (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 14.

³⁷ *Eindresumé II, op. cit.* hlm.50.

³⁸ Peter Boomgard, *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880* (Jakarta: Djembatan, 2004), hlm. 146.

Bongas, dan Mandiraja.³⁹ Tebu merupakan tanaman yang membutuhkan irigasi yang baik yang ditanam pada prosedur penyisihan lahan seperlima dari lahan warga seperti dalam aturan.⁴⁰ Hasil panen tebu dari penanaman kemudian di angkut ke pabrik penggilingan yang didirikan dengan kesepakatan antara kontraktor dan pemerintah. Pabrik penggilingan tebu yang ada di keresidenan ini yaitu: Pabrik Pangka, Kemanglen, Dukuhwringin, Adiwerna, dan Pagongan, Pabrik Comal dan Banjardawa dan Pabrik Jatibarang.⁴¹

Di Kabupaten Tegal berdirinya Pabrik Kemanglen, Dukuhwringin, Adiwerna, dan Jatibarang, memerlukan tindakan luar biasa terkait dengan penguasaan atau distribusi sawah di antara penduduk karena jarak yang berdekatan. Pada Pabrik Kemanglen, Dukuhwringin, dan Adiwerna kondisi ini disebabkan oleh penggunaan sungai yang sama untuk keperluan penggilingan tebu. Distrik Dukuhwringin menjadi tempat dua perusahaan beroperasi yaitu Kemanglen dan Dukuhwringin, tetapi karena Pabrik Adiwerna, di Distrik Krandon, tidak dapat beroperasi tanpa penggunaan tanah dari Dukuhwringin menyebabkan penyisihan sawah dari Dukuhwringin ke Krandon. Hal ini diperparah dengan keadaan tanah di Distrik Krandon sendiri yang kurang subur yang akhirnya membuat daerah ini harus mendapatkan sawah dari Dukuhwringin sebesar 557 *bahu*, Tegal sebesar 160 *bahu*, dan Pangka sebesar 65 *bahu*.⁴²

Penanaman tebu di Kabupaten Brebes dan Pemasang, tidak mendapatkan masalah dalam hal distribusi sawah seperti yang terjadi di Tegal. Pada daerah ini sawah yang dimilikinya masih luas, dengan perkebunan yang tidak lebih dari 400

³⁹ *Eindresumé I, op.cit.*, hlm. 14-15.

⁴⁰ Clifford Geertz, *Agricultural Involution: The Process Of Ecological Change In Indonesia* (Berkeley : University Of California Press, 1963),. hlm. 55.

⁴¹ P.J. Veth, *Loc.cit.*

⁴² *Overzicht Betrekkelijk den Staat der Suikercultuur in Verband tot Het Voorkomende bij de Monographien der Reidentie Tegal dalam Stukken Betreffende Het Onderzoek Bij Besluit van den Gouverneur-Generaal an Nederlandsch Indie van 08 december 1853, no 10* (Batavia: Benomde Commisie (Commisie Umbgrove), 1857), hlm. 3.

bahu dengan jarak yang berbeda dengan yang ada di Tegal. Desa yang memiliki banyak ladang menyerahkan sebagian untuk pergantian lahan yang ditanami tebu dengan desa lain, baik yang ikut tanam maupun tidak. Penyerahan sawah di sini hanya berlangsung sementara, atau hanya untuk menukar sawah yang ditanami tebu, dan untuk desa yang terlalu sedikit jumlah sawahnya.⁴³

Akibat hadirnya perkebunan tebu di Kabupaten Tegal, diputuskan untuk mendistribusikan sawah secara lebih merata kepada penduduk sedemikian rupa hingga pada mereka yang sebelumnya tidak mendapatkan jatah sawah komunal ataupun pribadi. Jumlah petani penanam tebu, dibandingkan dengan jumlah luas sawah yang ada, menunjukkan setiap rumah tangga akan berjumlah paling sedikit mendapatkan 1 atau 2 *bahu* tetapi hal ini masih memungkinkan untuk munculnya perbedaan.⁴⁴ Hal ini memang benar jika dilihat pada tahun 1841 di Kabupaten Tegal pada lokasi penanaman tebu sawah-sawah diubah menjadi sawah *playangan* dan dibagikan pada setiap kepala keluarga dengan besar 1 *ewoe* atau $2/5$ *bahu*. Jumlah dari lahan yang bahkan di bawah satu *bahu* terjadi juga di Desa Jatibarang Kidul dan Pengarit ketika sawah *playangan* dibagikan pada penggarap yang telah memenuhi syarat hanya sebesar setengah *bahu*.⁴⁵

Sawah-sawah komunal yang tidak dapat dikerjakan oleh penduduk desa dinamakan *kosong*, sawah ini dapat digarap oleh orang dari desa lainnya selama mau menanggung beban pajak seperti yang terjadi di desa Mandalajoe dan Tjikoja yang penduduknya menggarap sawah di Desa Banjar Kidul, Banjar lor, Pariagong, dan Tegalsawah, kegiatan ini dinamakan *mratang*.⁴⁶

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat bahwa sebenarnya total dari penanaman tebu untuk kebutuhan pabrik gula sebenarnya tidak lebih dari seperlima atau 20 % dari jumlah sawah yang ada di Distrik ini. Jumlah total sawah

⁴³ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴⁴ *Loc cit.*

⁴⁵ *Eindresumé II, op. cit.* hlm. 72.

⁴⁶ *Eindresumé I, op. cit.*, hlm. 83.

yang dimiliki oleh Distrik Dukuhwringin sebesar 8949 $\frac{1}{2}$ *bahu*. Pada tahun 1856 presentase untuk masing-masing kegunaan sawah di Distrik ini adalah 6,26 % untuk digunakan Krandon, 9,55 % untuk digunakan penanaman tebu (jumlah yang lebih besar jika dibandingkan jumlah keseluruhan yang digunakan untuk penanaman tebu seluruh Jawa dengan persentase 5 %, Pasuruan 12 %, Banyumas 8 % dan Kedu 1-2 %) ⁴⁷, dan 84.18 % untuk digunakan penanaman lainnya, sedangkan sawah komunal diketahui berkisar 83.7 %.

Pada Distrik Dukuhwringin jumlah persentase di atas tidak serta merta menunjukkan bahwa pada tiap desa yang ada didalamnya dapat mencukupi kebutuhan sawah. Kegiatan *mratang* menjadi jalan keluar bagi desa yang kekurangan sawah ini. Lebih lanjut lagi pada distrik ini terdapat 36 desa yang kekurangan sawah dengan rincian 25 desa tanpa penanaman tebu dan 11 desa dengan penanaman tebu, sedangkan disamping itu terdapat 31 desa dengan sawah yang memiliki sisa kelebihan dengan rincian 25 desa tanpa penanaman tebu dan 6 desa dengan penanaman tebu. Desa-desa yang kekurangan sawah tanpa penanaman tebu merupakan desa yang memang dari awal tidak dapat memenuhi kebutuhan sawah dalam desanya yang dikarenakan adanya penyisihan sawah untuk Krandon atau memang luas sawahnya yang memang sempit.

⁴⁷ Robert Van Niel, *op. cit.*, hlm. 142.

Tabel 3.2 Sawah di Distrik Dukuhwringin 1856-1857

No	Nama		Sawah desa	Sawah yang digarap oleh Krandon	Sawah yang ditanami tebu pabrik	Sisa untuk tanaman lain	Sawah komunal	Kurang	Lebih	Keterangan desa yang di <i>Pratjang</i> atau <i>Mratjang</i>	1857		
	Desa	Bekel									Sawah ditanami tebu pabrik	Tanah yang digunakan untuk Selokan dan Jalan	Sisa
1	Lebakgowak	Bangsawidana	225 ½	-	-	225 ½	140 ½	-	85	Di <i>pratjang</i> , Depok 2 ¾, Tegalandong 8, Doekoesemboong 7, Pangkah 15 ¼, Sambang 8, Traijem 27 ¾, Bran 16 ¼	20 ½	4	16
2	Kesoeban	Singatroena	168	-	-	168	145 ½	-	22 ½	Di <i>Pratjang</i> Panoesoepan 22 ½	21 ½	-	16
3	Balaradien	Soeratroena	211	-	-	211	146	-	65	Di <i>pratjang</i> Tembokloewewoeng 8 ¼, Babakan 25, Traijeman 31 ¾	6	-	15
4	Kambangan	Kertrandria	250	-	3	247	192 ½	-	54 ½	Di <i>pratjang</i> Tembokloewoeng 50 ¾, Tegalandong 3 ¾	13 ¾	3 ¾	21
5	Doekoewringin	Raksadiwirja	171	-	-	171	152 ¾	-	18 ¼	Di <i>pratjang</i> Padolongan 14, Pandawa ¼, Sambang 4	18 ¼	-	17
6	Pendawa	Wangsaprana	56	-	-	56	56 ¼	¼		<i>Mratjang</i> Doekoewringin ¼	9 ¼	-	66

7	Djatiewala	Wangsamerta	92 ½	-	7 ¼	84 ¾	82 ½	-	2 ¼	Di <i>Pratjang</i> Tegalandong 2 ¼	5 ½	-	88
8	Babakan	Soerabangsa	42	-	-	42	67	25	-	<i>Mratjang</i> Balaradin 23	8	-	75
9	Tegalandong	Soeradjiwa								<i>Mratjang</i> Slarang 90, Bloeboek 10 ¼ , Slawie 2 ½ , Lebakgowak 8, Kaliesapoe 1, Kambangan 3 ¼ , Djatiewala 2 ¼ . Doekoewaroe 6	15 ¼	10	24
			379	-	279	100	223 ¾	123 ¾	-	<i>Mratjang</i> Lebakgowak 8, Doekoewringin 4	-	-	87
10	Sambang	Wangsawitjana	75	-	-	75	87	12	-	Di <i>pratjang</i> Kaliematie 5 ½ , Kedaielee 28 ½	10 ½	10 ½	16
11	Doekoesalam	Djaijamerta	181 ½	-	-	181 ½	145	-	36 ½	Kagok 2 ½ <i>Mratjang</i> Doekoesalan 2 ½ , Kalisapoe 50, Koerang 3 ½ , diambiel dessa slawie	11 ½	-	72
12	Kagok	Sokadiwangsa	61	-	56 ½	4 ½	60 ½	56	-	Di <i>Pratjang</i> Kaliematie 31 ¾ Kagok 3 ½ Tegalandongong 2 ⅓	28 ¾	11	22
13	Slawie	Sokartrona	227 ½	-	1 ½	226	188 ¼	-	37 ¾	<i>Mratjang</i> Doekoesalam 2 ½ , Bloeboek 23, Kaliesapoe 21	-	-	74
14	Kedaiele	Djaijaleksana	55	-	53 ½	1 ¼	74	72 ¼	-	<i>Mratjang</i> Boelakptjang 2 ¼	5 ¾	-	45
15	Kepiear	Singadiwangsa	37	-	-	37	39 ¼	2 ¼	-	<i>Mratjang</i> Lebakgowak	20	-	11
16	Bran	Kertawangsa	112	12 ½	43	56 ½	92	35 ½	-				

17	Traijeman	Wieradjaija	52 ¼	-	52 ¼	½	60	59 ½	-	16 ¼ Kaliesoka 1 ½ Bloeboek 17 ¼ <i>Mratjang</i> Balaradin 31 ¾ Lebakgowak 27 ¾	-	-	60
18	Protjot	Kertadiwidaija	65 ¼	-	-	65 ¼	113	47 ¾	-	<i>Mratjang</i> Doekoewaroe 47 ¾	-	-	11
19	Tembokloewoen g	Mertarana	67 ¼	-	-	67 ¼	129	61 ¾	-	<i>Mratjang</i> Doekoewaroe 2 ¾, Kambungan 50 ¾, Balaradin 8 ¼	-	-	12
20	Boelakpatjeng	Wangsawidjaija	232	-	-	232	178 ¼	-	53 ¾	Di <i>pratjang</i> Kepiear 2 ¼, Padolongan 41 ¼, Pagebangan 10 ¼	11 ¾	-	19
21	Pagieanten	Kertawangsa	168 ¼	21 ¼	-	147	145 ¼	-	1 ¾	Di <i>pratjang</i> Goemalan 1 ¾	11 ¾	-	15
22	Sindang	Mertadewangsa	149	-	-	149	144 ¾	-	4 ¼	Di <i>pratjang</i> Padolongan 4 ¼	10 ¼	1	15
23	Doekoewaroe	Mertadjiwa	501	107	-	394	337 ½	-	56 ½	Di <i>pratjang</i> Protjot 47 ¾, Tebokloewoeng 2 ¾, Tegalandong 6	16 ½	6	36
24	Goemaijoen	Soeramenggala	441	-	130	311	257	-	54	Di <i>pratjang</i> Bandjaran 40 ¼, Lemahdoewoer 13 ¼,	11	42	31
25	Bloeboek	Wanamerta	510	4 ½	-	505 ½	315 ¼	-	190 ¼	Di <i>pratjang</i> untuk kendja gantie bran Tegalandongong 10 ¾, Narawissan 17, Kebassen 8 ¾ Tebokkidool 40 ¼ Tembkwetan 18 ¾, Tegalandongong 10 ¼,	19 ¾	-	33

26	Slarang	Wangsangdjawa	363	-	-	363	273	90	Penaroekan 10, Pangarassan 3, Pedolongan 12 ½ , Talang 18 ¾, bran 17 ¾, koedailee2.	13	10	29	
27	Kaliesoka	Sokadiwirija	126 ½	-	-	126 ½	85 ¼	41 ¼	Di <i>pratjang</i> Tegalandongong 90, Di <i>pratjang</i> Pessaijangan 14 ¾, Pagebangan 10 ½ bran 1 ½	15 ¾	-	10	
28	Pedagangan	Singadjaija	128 ¾	-	-	128 ¾	108 ¼	20 ½	Di <i>pratjang</i> Temboklor 20 ½	12 ¾	-	12	
29	Pakembaran	Niladiwangsa	106	-	100	6	91 ¾	85 ¾	<i>Mratjang</i> Kaliesapor 85 ¾	14 ¼	-	10	
30	Kaliesapoe	Mertadiwirja	516 ¾	-	18	498 ¾	294 ½	-	Di <i>pratjang</i> Kagok 50, Pakembaran 85 ¾ , Temboklor 21 ¼ , Tegalandongong 1 Koedaile 21, Talang 15, voor gantie bran Tegalandong 10	36 ½	-	33	
31	Mengantie	Sarawangsa	69 ¼	1	-	68 ¼	68 ¼	-	-	9 ¾	-	78	
32	Pagedangan	Wangsatroena	44	-	-	44	54 ¼	10 ¼	-	<i>Mratjang</i> kalisoeka 10 ¼	9 ¾	-	64
33	Penaroekan	Singadiwangsa	150 ½	-	-	150 ½	160 ½	10	-	19 ¼	-	17	
34	Pangarassan	Raksamerta	83 ¾	-	-	83 ¾	86 ¾	8	-	<i>Mratjang</i> Bloeboek 3	12 ¼	-	99
35	Pangebangan	Bangsamerta	75	10 ¼	-	64 ¾	75	10 ¼	-	<i>Mratjang</i>	9	-	84

36	Ketanggongan	Mertadiwangsa	84 $\frac{3}{4}$	-	-	84 $\frac{3}{4}$	79	-	5 $\frac{3}{4}$	Boelakpatjeng 10 $\frac{1}{4}$ Di <i>Pratjang</i> Goemalar 5 $\frac{3}{4}$	19	-	98
37	Koepoe	Singamerta	194	30 $\frac{1}{4}$	-	163 $\frac{3}{4}$	135	-	28 $\frac{3}{4}$	Di <i>Pratjang</i> Lemahdoewoer 28 $\frac{3}{4}$	27	-	16
38	Bersole	Kertadiwangsa	139 $\frac{1}{4}$	29	-	110 $\frac{1}{4}$	72	-	38 $\frac{1}{4}$	Di <i>Pratjang</i> Lemahdoewoer 38 $\frac{1}{4}$	11	-	63
39	Pedeslohor	Wangsalaga	336	156	-	180	180	-	-		13	-	19
40	Loemingsir	Wissadjaija	104	11	-	93	77 $\frac{3}{4}$	-	15 $\frac{1}{4}$	Di <i>Pratjang</i> Kedoengsoekoen 6 $\frac{1}{4}$, Goemalar 9	18 $\frac{1}{4}$	-	96
41	Kadoengsoekan	Wangsamerta	76 $\frac{3}{4}$	19	-	57 $\frac{3}{4}$	64	6 $\frac{1}{4}$	-	<i>Mratjang</i> Loemingsir 6 $\frac{1}{4}$	7	-	71
42	Goemelar	Mertawangsa	68	7 $\frac{3}{4}$	-	60 $\frac{1}{4}$	78	17 $\frac{3}{4}$	-	<i>Mratjang</i> ketanggoengan 5 $\frac{3}{4}$, loemingsin 9, Petjangkaran 1 $\frac{1}{4}$, Pagianten 1 $\frac{3}{4}$	10	-	88
43	Petjangakan	Maraijoeda	71 $\frac{1}{2}$	26	-	45 $\frac{1}{2}$	44 $\frac{1}{4}$	-	1 $\frac{1}{4}$	Di <i>Pratjang</i> goemalar 1 $\frac{1}{4}$	7 $\frac{3}{4}$	-	52
44	Temboklor	Mertaleksana	37	-	14	28	64 $\frac{3}{4}$	41 $\frac{3}{4}$	-	<i>Mratjang</i> Pedagangan 20 $\frac{1}{2}$, Kaliesapoe 21 $\frac{1}{4}$	10 $\frac{1}{4}$	-	75
45	Tembokkidul	Djaijadimerta	26	-	12	14	54 $\frac{1}{4}$	40 $\frac{1}{4}$	-	<i>Mratjang</i> Bloeboek 40 $\frac{1}{4}$	7 $\frac{3}{4}$	-	62
46	tembokwetan	Soeraleksana	25	-	12	13	31 $\frac{3}{4}$	18 $\frac{3}{4}$	-	<i>Mratjang</i> Bloeboek 18 $\frac{3}{4}$	3 $\frac{1}{4}$	-	35
47	Depok	Pemadewangsa	68	-	-	68	91 $\frac{1}{2}$	23 $\frac{1}{2}$	-	<i>Mratjang</i> Doekoedjatie 20 $\frac{1}{4}$, Djatielaba $\frac{1}{2}$,	12 $\frac{1}{2}$	4	10

48	Doekoedjatie	Kertadiaja	85	-	12 ¼	72 ¾	52 ½	-	20 ¼	Lebakgowah 2 ¾ Di <i>Pratjang</i> Depok 20 ¼	7 ½	-	60
49	Djatilaba	Djaijaleksana	92 ½	-	-	92 ½	92	-	½	Di <i>Pratjang</i> Depok ½	10	-	10
50	Panoesoepan	Kertiesara	270 ¾	-	53 ¾	217	239 ½	22 ½	-	<i>Mratjang</i> Kessoeben 22 ½	27 ½	-	26
51	Banjaran	Soerawangsa	-	-	-	-	40 ½	40 ½	-	<i>Mratjang</i> Goemoijan 40 ½	7 ½	-	48
52	Pakieringan	Diepawangsa	16	-	-	16	31 ¾	15 ¾	-	<i>Mratjang</i> Patjoelwetan 12 ¾, Tjangkrang 3	4 ¼	-	36
53	Padolongan	Wangsakria	73 ¼	47 ¾	2	23 ½	95 ½	72	-	<i>Mratjang</i> Boelakatjong 41 ¼, Sendang 4 ¼, Doekoewringin 14, Bloemboek 12 ½	16 ½	-	11
54	Kalimatie	Singatroena	13	3 ½	-	9 ½	46 ¾	37 ¼	-	<i>Mratjang</i> Slawie 31 ¾, Doekoesalam 5 ¼	7 ¼	-	54
55	Lemadoewan	Selatroena	41 ¾	41 ¾	-	-	80 ½	80 ½	-	<i>Mratjang</i> Bersole 38 ½, Koepoe 28 ¾, Goemaijoen 13 ½,	6 ½	-	87
56	Gedaskerep	Singamerta	98	-	-	98	90 ¾	-	7 ¼	Di <i>Pratjang</i> Benglee 4, Narawisan 3 ¼	13 ¼	-	10
57	Patjoelwetan	Tjagoena	79	-	-	79	66 ¼	-	12 ¼	Di <i>Pratjang</i> Pakieringan 12 ¾	8 ¾	-	75
58	Patjoelkulon	Mertadiwangsa	59 ¾	-	-	59 ¾	54 ¼	-	5 ½	Di <i>Pratjang</i> Langgon 5 ½	7 ¾	-	62
59	Tjangkring	Tjadiwangsa	128	-	-	128	102 ¾	-	25 ¼	Di <i>Pratjang</i> Doekoemalang 21 ¼, Pakieringan 3, Langan 1	21 ¼	-	12
60	Kaliegaijam	Reksadita	80	-	-	80	55 ¼	-	24 ¾	Di <i>Pratjang</i> Langgon	6 ¾	-	62

61	Benglee	Wiratroena	95	-	-	95	99	4	-	24 ¾ <i>Mratjang</i> Gedaskerep 4	17	-	11
62	Doekoemalang	Djagadiwangsa	19	-	-	19	40 ¼	21 ¼	-	<i>Mratjang</i> Tjangkring 21 ¾	5 ¾	-	46
63	Pessaijangan	Soeradiwangsa	60	-	-	60	85 ¾	25 ¾	-	<i>Mratjang</i> Kaladawa 11, Kaliesoka 14 ¾	12 ¼	-	98
64	Langgon	Kertaleksana	9 ¼	-	-	9 ¼	55 ¼	46	-	<i>Mratjang</i> Kaliegaijam 24 ¾, Tjangkring 1, Patjoelkoelon 5 ½, Kaliesoka 14 ¾	6 ¾	-	62
65	Talang	Soetadiwangsa	10	-	-	10	43 ¾	33 ¾	-	<i>Mratjang</i> dessa 3 ¼, Kaliesapoe 15, Bloeboek 18 ¾	3 ¼	-	47
66	Kebassen	Kertawidjaija	66	16 ½	-	49 ½	58 ¼	8 ¾	-	<i>Mratjang</i> Bloemboek 8 ¾	6 ¾	-	65
67	Narawissan	Soeratroena	29 ¼	12	-	17 ¼	37 ½	20 ¼	-	<i>Mratjang</i> Gedaskerep 3 ¼, Bloemboek 17	4 ½	-	42
68	Kadjen	Kertaijoeda	-	-	-	-	44 ¾	44 ¾	-	<i>Mratjang</i> Kaladawa 44 ¾	5 ¼	-	50
69	Kaladawa	Wangsamerta	146	-	-	146	90 ¼	-	55 ¾	Di <i>Pratjang</i> Kadjen 44 ¾, Pessaijangan 11	18 ¾	-	10
70	Kagieran	Djaijadewangsa	2	-	-	2	2	-	-			-	2
Jumlah			8897 ¾	557	850 ½	7490¼	7447 ½	1236 ¾	1279 ½		800	102 ¼	83
Doekoe semboeng Pangkah	Pangkah		7		7		7	7		Mendapat ganti dari lebakgowak 7			
	“		15 ¼	-	15 ¼	-	15 ¼	15 ¼	-	Mendapat ganti dari Lebakgowak 15 ¼			
Sawa baru	Tegalandongong		24 ½	-	24 ½	-	24 ½	24 ½	-	Mendapat ganti dari			

desa								Bloeboek 10 $\frac{1}{4}$, Kaliesappoe 10 $\frac{1}{4}$, Tanah baru 4	
Sawa baru desa	Goemaijoen	5	-	5	-	5	5	-	Mendapat ganti tanah baru 5
Jumlah Semua		8949 $\frac{1}{2}$	557	902 $\frac{1}{4}$	7490 $\frac{1}{4}$	7499 $\frac{1}{4}$	1288 $\frac{1}{2}$	1279 $\frac{1}{3}$	

Sumber: Bijlage II. *Overzicht Betrekkelijk den Staat der Suikercultuur in Verband tot Het Voorkomende bij de Monographien der Reidentie Tagal dalam Stukken Betreffende Het Onderzoek Bij Besluit van den Gouverneur-Generaal an Nederlandsch Indie van 08 december 1853, no 10*, (Batavia: Benomde Commisie (Commisie Umbgrove), 1857), hlm. 8-13.

Keterangan:

1. Jumlah sawah desa 1856
2. Sawah desa yang diserahkan ke Krandon
3. Sawah yang ditanami tebu pabrik pada tahun 1856
4. Sawah yang digunakan untuk penanaman padi
5. Sawah komunal yang digunakan desa untuk para petani atau sisa tanah setelah tanah diberikan pada desa lainnya
6. Kurangnya sawah dalam desa tersebut
7. Lebihnya sawah dalam satu desa tersebut.
8. Desa yang melakukan kegiatan mratjang atau desa yang di pratjang karena kekurangan sawah atau kelebihan sawah.
9. Sawah yang ditanami tebu pada tahun 1857.
10. Sisa sawah tahun 1857 dari penjumlahan sawah yang digunakan desa, Sawah ditanami tebu pabrik tahun 1857, dan Tanah yang digunakan untuk Selokan dan Jalan.
Sawah-sawah ini dapat berubah setiap tahun.

Di Keresidenan Tegal penanaman tebu hampir menempati semua sawah milik petani akhirnya mereka harus mendapatkan ganti di daerah lainnya yang cukup jauh.⁴⁸ Contoh dari kasus ini terdapat pada Desa Tegalandong sawah untuk penanaman tebu pada tahun 1856 seluas 279 *bahu* dan penggunaan sawah oleh petani desa tersebut adalah 223 $\frac{3}{4}$ dengan 100 *bahu* yang akan ditanami padi, tetapi jumlah tanah yang dapat digunakan di desa ini hanya sebesar 379 *bahu*, sehingga terdapat kekurangan sawah sebesar 123 $\frac{3}{4}$ *bahu*, untuk menutupi kekurangan desa ini *mratjang* sawah di desa lainnya dengan luas sebagai berikut: Slarang 90 *bahu*, Bloeboek 10 $\frac{1}{4}$ *bahu*, Slawie 2 $\frac{1}{2}$ *bahu*, Lebakgowak 8 *bahu*, Kaliesapoe 1 *bahu*, Kambangan 3 $\frac{1}{4}$ *bahu*, Djatiewala 2 $\frac{1}{4}$ *bahu*, dan Doekoewaroe 6 *bahu*. Kasus serupa juga terjadi di Desa Kagok, Kedaile, Pakembaran, Temboklor, Tembokkidul, dan Tembokwetan yang sawahnya kekurangan akibat ekspansi lahan penanaman tebu. Hal ini menunjukkan bahwa tanah komunal yang digunakan untuk kegiatan *mratjang* telah melewati batas lingkungan desanya sendiri, yang berarti sawah ini tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh penduduk desa tersebut saja.⁴⁹

Menurut pernyataan kontrolir J. W. PH. TE. Mechelen komunalisasi menjadi sumber dari ketidakpuasan terutama pada daerah yang menjadi area penanaman tebu. Pembagian tahunan membuat para penggarap menganggap memiliki klaim untuk bagian yang lebih luas dan lebih baik kualitas tanahnya, sedangkan di sisi lainnya kepala desa sering mengistimewakan golongan tertentu terutama kerabat atau temannya. Sebenarnya praktik pembagian tanah harusnya tetap dilakukan oleh kepala desa dengan kesepakatan dari para penggarap yang lainnya serta dengan pertimbangan pemenuhan syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Kendati demikian pada desa Moga pada tahun 1868 disebutkan bahwa semua sawah seharusnya dibagi rata dengan jumlah seperempat *bahu*

⁴⁸ D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, penerjemah Prajudi Admosudirdjo (Jakarta:J.B. Wolters, 1957), hlm. 218

⁴⁹ *Overzicht Betrekkelijk den Staat der Suikercultuur in Verband tot Het Voorkomende bij de Monographien der Reidentie Tegal, op. cit.*, hlm. 5.

untuk masing-masing kepala keluarga, ternyata dicurangi oleh kepala desa dengan mengistimewakan para kerabatnya. Sawah yang awalnya *playangan* ini diubah menjadi sawah *yoso*, kecuali sawah *playangan* yang telah dibagikan sebelumnya.⁵⁰

Kecurangan dari para kepala desa tersebut tidak berhenti sampai disana, karena terjadi juga dalam kegiatan pembukaan lahan, hal ini terjadi pada Desa Kaliwangi yang dilaporkan sering terjadi penyerobotan tanah yang baru dibuka untuk ditambahkan pada sawah komunal oleh kepala desa. Pada Desa Koeta di Pemalang pembagian sawah berjalan semestinya dengan jumlah tanah yang didapatkan per keluarga sebesar satu setengah *bahu*, oleh karena ini menurut kontrolir A. Van Der Gon Netscher di Pemalang bahwa komunalisasi justru menjadi langkah bagus untuk menyamakan tekanan kerja wajib bagi para penduduk.⁵¹ Tanah-tanah komunal yang telah dibagikan baik yang berada di wilayah penanaman tebu atau bukan, telah menunjukkan bahwa besar tanah yang dibagikan beragam tetapi kebanyakan berada di bawah satu *bahu* kecuali di Desa Koeta yang baru disebutkan. Penggarapan tanah yang sempit di pedesaan Jawa ini menurut Hiroyoshi Kano, bahkan tidak cukup digunakan untuk menghidupi keluarga kecil (keluarga inti).⁵²

3.1.2 Tenaga Kerja

Petani Jawa umumnya tinggal di desa yang kehidupannya bergantung pada penanaman padi di sawah. Tanah adalah jantung dari keberadaan mereka dan mengontrol hubungan politik, sosial dan ekonomi yang kompleks yang menunjukkan status mereka dalam lingkungannya dan pada saat yang sama mengakui kekuasaan supra desa yang meminta hasil dan tenaga kerja sebagai

⁵⁰ *Eindresumé II, op. cit.*, hlm. 72.

⁵¹ *Eindresumé I, op cit.*, hlm. 78-90.

⁵² Hiroyoshi Kano, "Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa di Jawa pada Abad XIX", dalam S.M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wirahadi (peny.), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm. 98.

imbalan atas perlindungan yang diberikan.⁵³ Hubungan inilah yang menjadi dasar bagi sistem kerja wajib tradisional yang berusaha dilestarikan dalam rangka pengorganisasian kerja pada sama sistem tanam paksa. Hal ini menyebabkan stagnasi tenaga kerja bayaran yang tumbuh perlahan yang telah diusahakan pada periode sebelumnya dan kerja paksa mulai mendominasi.⁵⁴

Pada hakikatnya kerja wajib ini awalnya merupakan *krigaji* yang secara etimologis berarti segala pekerjaan yang dilakukan bersama-sama (*kerig*) untuk kepentingan raja, tetapi karena berkembangnya berbagai macam kerja wajib, maka kerigaji yang menjadi salah satu kerja wajib tersendiri. Menurut Suhartono kerja wajib dibedakan menjadi: pertama *kerigan* (*desadiensten*) untuk perbaikan jalan, pematang, jembatan dll, kedua gugur gunung untuk perbaikan infrastruktur desa akibat bencana alam, ketiga kerigaji (*heerendiensten*) kerja wajib untuk raja dan patuh dan keempat kerja wajib di perkebunan (*cultuurdiensten*).⁵⁵

Penanaman berbagai tanaman wajib seperti kopi dan tebu setelah 1830, berjalan seiring dengan peningkatan kerja paksa. Para petani tidak hanya dipaksa untuk menanam tanaman perkebunan di ladang, sawah dan tanah milik mereka sendiri, namun juga beban untuk membangun, menjaga fasilitas infrastruktur dan melayani para pejabat sebagai kerja wajib.⁵⁶ Berbagai kerja wajib ini dalam laporan pemerintah biasanya hanya dibedakan menjadi dua yaitu *heerendiensten* dan *cultuurdiensten*. Kerja wajib yang dilakukan oleh para petani untuk berbagai kegiatan perkebunan (*cultuurdiensten*) memang sedikit berbeda dengan kerja wajib lainnya. Pasalnya pelaksanaan kerja wajib ini diiringi dengan pengurangan pajak tanah dan adanya bayaran dengan jumlah uang tertentu, sedangkan kerja

⁵³ R.E. Elson, "Sugar Factory Workers and the Emergence of 'Free Labour' in Nineteenth-Century Java" dalam *Modern Asian Studies*, Vol. 20, No. 1, 1986, hlm. 155.

⁵⁴ Djulianti Suroyo, *Tenaga Kerja di Jawa Sebelum dan Selama Sistem Tanam Paksa di Jawa*, dalam J. Thomas Lindblad (Ed), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru* (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 221.

⁵⁵ Suhartono, *Apanage dan Bekel: Peubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920* (yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 41.

⁵⁶ Djulianti Suroyo, *loc.cit.*

wajib lainnya atau yang dapat dikatakan *corvee* (dalam hal ini *heerendiensten*) yang merupakan kerja wajib yang muncul dari kewajiban tradisional lama yang terkait erat dengan struktur sosial yang dilaksanakan tanpa adanya kompensasi apapun dari otoritas yang lebih tinggi dari petani.⁵⁷

Menurut N.G. Pierson struktur sosial di pedesaan Jawa terdiri dari empat golongan yaitu: pertama adalah birokrasi desa yang mengatur segala hal yang ada di desanya, kedua adalah orang kaya yang diasosiasikan pada kerabat dari orang penting seperti anggota birokrasi desa, ketiga petani pemilik tanah yaitu *sikep* atau *janggol* yang menanggung beban kewajiban baik pajak dalam bentuk barang atau tenaga kerja, dan keempat orang menumpang atau orang mondok yang kehidupannya bergantung pada pemilik tanah.⁵⁸ Seharusnya beban seluruh kerja wajib ini ditanggung oleh para pemilik tanah, tetapi mereka berhasil mendistribusikan kembali beban ini kepada penduduk desa yang statusnya lebih rendah darinya yang secara ekonomi bergantung pada mereka, dalam hal ini mereka adalah golongan orang mondok itu sendiri.⁵⁹

Di keresidenan Tegal sejak tahun 1856 berkenaan dengan tenaga kerja untuk mengurus tanaman perkebunan sedapat mungkin dipisahkan dengan tenaga kerja untuk kerja wajib umum. Pada Kabupaten Tegal dan Brebes setidaknya 4 keluarga ditugaskan untuk mengurus satu *bahu* sawah untuk penanaman tebu sekaligus sebagai kuli di pabrik gula. Sebaliknya, di Kabupaten Pemalang, 3 keluarga untuk pekerja lapangan (yang tidak diharuskan melakukan kerja wajib lainnya), dan sekitar 1 keluarga per *bahu* untuk memasok kuli ke pabrik, yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan lainnya. Pengaturan ini telah dipertahankan, tetapi masing-masing desa kemudian telah diberi bagian dalam kerja wajib umum yang menyesuaikan dengan kondisi desa.⁶⁰ Pada tahun tersebut

⁵⁷ Robert Van Niel, *loc.cit.*

⁵⁸ N.G. Pierson, *Het Kultuurstelsel* (PN.Van Kampen:Amsterdam,1868), hlm.22.

⁵⁹ R.E. Elson, *op. cit.*, hlm. 156.

⁶⁰ *Overzicht Betrekkelijk den Staat der Suikercultuur in Verband tot Het Voorkomende bij de Monographien der Reidentie Tegal*, *op. cit.* hlm. 5-6.

setidaknya jumlah total dari tenaga kerja yang ikut dalam penanaman dari delapan pabrik gula yang berdiri sebesar 38.528 dengan rician 22.469 sebagai *janggol* dan 16.059 sebagai orang mondok. Hal ini menunjukkan bahwa sejauh mana industri gula menguasai basis produksinya terutama untuk tenaga kerja yang bahkan menyerap golongan yang tidak harus mengerjakannya.⁶¹

Orang mondok sebenarnya tidak diharapkan ikut dalam kerja wajib yang merupakan tanggung jawab para *janggol*. Besluit dari Residen Tegal pada 12 februari 1860 yang menyatakan bahwa orang mondok tidak diperkenankan ikut dalam kerja wajib baik itu *cultuurdiensten* atau *heerendiensten*, mereka hanya diperbolehkan untuk menunaikan kerja wajib pribadi (*particuliere diensten*) pada induk semang, dari orang mondok ini yang merupakan tempat mereka bergantung dengan kegiatan seperti memperbaiki, membersihkan rumah, atau menggarap lahan mereka.⁶² Meskipun demikian dapat dilihat bahwa ini tidak hanya menunjukkan betapa lemahnya kewenangan pemerintah kolonial dalam menertimbangkan sistem kerja ini, sekaligus memperlihatkan secara ekonomi betapa lemahnya tingkat perekonomian orang mondok sehingga sangat bergantung pada induk semangnya, oleh karena itu akhirnya hal ini menjadi hal yang wajar jika mereka mengerjakan kerja wajib untuk tetap mempertahankan kehidupannya.

Struktur sosial masyarakat Keresidenan Tegal secara lebih jelas dapat dilihat pada tahun 1862 di sekitar tujuh pabrik gula. Tercatat terdapat 35.376 keluarga dengan susunan berikut; kelas elite yang terdiri dari priyayi, pejabat daerah (pribumi), pejabat pemerintah kolonial dengan jumlah 188 keluarga (0.5%), pemimpin agama dengan jumlah 562 keluarga (1.6%), Perangkat desa dengan jumlah 1898 keluarga (5.4%), dan lainnya dengan jumlah 2.089 keluarga (5.9%). Kelas pemilik tanah atau yang dapat disebut *Janggol/sikep* dengan jumlah 11.520 keluarga (32.6%). Kelas keluarga selain petani yang terdiri dari pedagang

⁶¹ G. R. Knight, *Sugar, Steam, and Steel: The Industrial Project in Colonial Java, 1830-1885* (Adelaide:University of Adelaide Press, 2014), hlm. 118.

⁶² "Heerendiensten en Tegal Besluiten 1861", Arsip Residensi Tegal No.190.6, ANRI.

dan pengrajin dengan jumlah 414 keluarga (1.2%), buruh dengan jumlah 426 keluarga (1.2%), dan lainya dengan jumlah 2.134 keluarga (6.0%).⁶³

Kelas petani bawah yang secara kolektif disebut *orang mondok*, yang terbagi dalam beberapa golongan yaitu: mereka yang memiliki rumah (*pondok karang*) berjumlah 6.677 keluarga (18,9%), mereka yang tinggal di rumah tuannya (*pondok*) berjumlah 3.679 keluarga (10,4%), dan *bujang* yang berjumlah 5.789 orang (16,4%). Peresentase keluarga petani jika digabung antara kelas pemilik lahan (32.6%) dan kelas petani bawah (45.6%) menjadi golongan yang paling banyak dengan angka 78.2%. Hal ini menunjukkan bahwa golongan yang dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja oleh pemerintah kolonial yang paling menguntungkan adalah golongan petani. Tercatat terdapat 8.900 keluarga *janggol* yang harus memenuhi *cultuurdiensten* dan 2.446 keluarga *janggol* yang harus memenuhi *hereendiensten*.⁶⁴

Jumlah hari kerja *cultuurdiensten* pada tiap tahun memiliki perbedaan. Misalnya pada tahun 1862 jumlah hari kerja pada tujuh pabrik berjumlah 198,1 hari, pada tahun 1863 berjumlah 273,3 hari, pada tahun 1864 pada enam pabrik berjumlah 111,7 hari, pada 1865 berjumlah 62,6 hari.⁶⁵ Jumlah hari kerja untuk pabrik gula meningkat pada tahun 1863 lalu menurun setelahnya yang diiringi oleh penurunan jumlah pabrik yang menggunakan tenaga kerja ini. Tenaga kerja wajib untuk pengoprasian pabrik gula baik yang bekerja sebagai penanam tebu atau bekerja ke pabrik sepenuhnya berhenti sejak tahun 1865 karena permintaan pemerintah supaya pabrik gula yang beroperasi berdasarkan kontrak gula tahun 1863 dan sebelumnya tidak boleh menggunakan tenaga kerja wajib lagi.⁶⁶ Selanjutnya seiring dengan penghapusan sistem tanam paksa karena perlawanan

⁶³ Kensuke Miyamoto, "Subordinate Peasant in Mid-19th Century Java" dalam *Economic Journal of Hokkaido University*, Vol. 21, 1992, hlm. 16.

⁶⁴ Kensuke Miyamoto, *loc.cit.*

⁶⁵R.E. Elson, *op.cit.*, hlm. 157-158.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 160.

yang hebat dari kaum liberal dalam parlemen, akhirnya kerja wajib untuk kebutuhan oprasional pabrik gula ini tidak digunakan lagi.⁶⁷

Berbeda dengan *cultuurdiensten* yang tidak digunakan lagi setelah 1865, *heerendiensten* justru masih digunakan hingga sistem tanam paksa berakhir dan memicu perdebatan yang hebat dikemudian hari. Pada tahun 1863 hari kerja *heerendiensten* perkuli pertahun menunjukkan rician sebagai berikut; Distrik Tegal 33 hari, Distrik Krangdon 33 hari, Distrik Maribaija 33 hari, Distrik Dukuhwringin 33 hari, Distrik Pangka 33 hari, Distrik Gantungan 46 hari, Distrik Pernalang 41 hari, Distrik Comal Lor 35 hari, Distrik Comal Kidol 28 hari, Distrik Mandiraja 26 hari, Distrik Bongas 46 hari, *Afdeling* Brebes 41 hari, dan *Afdeling* Bumiayu 52 hari. Total tenaga kerja yang dikerahkan berjumlah 45.272 kuli.⁶⁸

Kerja wajib *heerendiensten* dapat dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat ajeg (tetap) dan yang sesuai kebutuhan. Kerja wajib ajeg adalah kerja wajib yang dilakukan sehari-hari sedangkan kerja wajib kedua dikerjakan ketika tiba waktunya saja, oleh karena hal ini para pekerja wajib ajeg berhak mendapatkan bagian tanah yang lebih luas pada pergiliran tanah komunal. Pada tahun 1866 di Keresidenan Tegal kerja wajib ajeg dan jumlah hari kerja meliputi penjaga gedung pemerintah 63 hari, penjaga gardu 873 hari, kerja di kepala pemerintah pribumi 1.286 hari, pengiriman surat dan penyediaan kuda 79 hari, penjaga dan merawat pos 4 hari, menjaga passanggrahan 4 hari, kerja di penyebrangan 28 hari, menjaga kuburan 56 hari. Jumlah hari kerja dalam waktu satu tahun sebesar 871.255 hari yang dikerjakan oleh 707.138 kuli.⁶⁹

Selanjutnya untuk kerja wajib yang sesuai kebutuhan meliputi pemeliharaan jalan 213.708 hari, pemeliharaan jembatan 20.868 hari, pemeliharaan jalan raya pos 210 hari, pemeliharaan irigasi dan bendungan 96.937 hari, pemeliharaan rumah pejabat pribumi 892 hari, pemeliharaan pesanggrahan

⁶⁷ Djulianti Suroyo, *Eksplorasi Kolonial Abad XIX Kerja Wajib di Karesidenan Kedu 1800-1890* (Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2000), hlm. 273.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 148.

⁶⁹ *Koloniaal Verslag 1868-1869*.

154 hari, pemeliharaan gardu 843 hari, pemeliharaan penjara 295 hari, kuli di gedung-gedung pemerintah 51.791 hari, pembawa barang ke penjara 431 hari, mengangkut orang dan barang 4.537 hari, mengangkut kayu 15.059 hari dan pemeliharaan gudang pasar 60 hari. Total dari hari kerja tersebut 1.276.980 maka dalam waktu satu tahun terdapat hari kerja 25.819.370, dengan demikian setidaknya pertahun kuli memiliki hari kerja 70 hari, jumlah yang meningkat pesat daripada tahun 1863.⁷⁰

Tabel 3.3
Heerendiensten di Keresidenan Tegal 1868

Afdeling	Jumlah Hari Kerja										Jumlah hari kerja per tahun	
	Jumlah pekerja	Penjaga gedung pemerintah	Penjaga pesanggrahan	Jaga gardu	Penjaga kepala pribumi	kerja untuk rumah tangga pemerintah	penjaga stasiun pos dan potong rumput untuk kuda	Patroli di ibu kota	Pemeliharaan jalan jembatan, dan bendungan	Penjaga pasar		Jumlah pelaksana per hari
Tegal	25.069	10	4	364	321	32	63	40	-	4	838	305.8
Pemalang	19.001	42	-	254	295	20	26	-	4	8	649	236.8
Brebes	34.444	15	2	127	277	31	134	-	38	-	674	246.0
Total	78.514	67	6	795	893	83	223	40	42	12	2161	788.7

Sumber: "Residentie Tegal Kultur Verslag 1868", Arsip Residensi Tegal, No. 18.5, ANRI.

Pada tahun 1868 kerja wajib *heerendienst* dapat dilihat pada tabel dibawah. Selain yang terdapat dalam tabel, jumlah harian kerja wajib untuk kepala pribumi meningkat dibandingkan dengan tahun 1867. Layanan ini terdiri dari menyapu 639 hari, mengambil kayu bakar dan air dari 365 menjadi 614 hari, membersihkan ratusan pejabat rumah dari 144 menjadi 281 hari, dan barang-barang rumah tangga lainnya dari 25 menjadi 84 hari. Kerja wajib ini seharusnya masuk kedalam kerja wajib *pancendiensten*, tetapi dalam laporan pemerintah kolonial kerja wajib yang terakhir disebutkan merupakan bagian dari kerja wajib

⁷⁰ *ibid.*

heerendiensten. Khusus kerja wajib untuk militer juga meningkat dari 338.9 hari pada tahun 1867 menjadi 530,8 hari pada tahun 1868.⁷¹

3.2 Produksi Komoditas Perkebunan Dengan Sistem Tanam Paksa

Pada juli 1830 secara resmi pemerintah di Hindia-Belanda menerima memorandum dari Gubernur Jenderal Van den Bosch. Memorandum ini berisi perlunya membudidayakan tanaman ekspor Eropa di Pulau Jawa tanpa meninggalkan kepentingan pribumi. Intinya adalah golongan petani pribumi di perintahkan untuk menanam tanaman ekspor pada seperlima tanahnya tanpa dipungut pajak tanah untuk tanah yang ditanami tanaman ekspor.⁷² Hal ini yang menjadi dasar untuk aturan sistem tanam paksa yang membuat tanaman seperti tebu, nila, kopi, dll, masuk kedalam kehidupan petani pribumi secara besar-besaran. Selanjutnya dilakukan sejumlah penelitian mengenai budidaya tanaman ekspor yang telah ada di sejumlah daerah di Jawa pada saat itu.⁷³

Pada 1831 muncul perintah untuk menanam nila, tebu, dan kopi di seluruh Jawa, selanjutnya pada 1832 muncul instruksi supaya setiap residen menyerahkan hasil tanaman ekspor dengan kalkulasi pertukaran sebesar f 2 per kepala.⁷⁴ Baru pada tahun 1834 aturan secara tanam paksa secara lengkap muncul yang ditandai dengan terbitnya *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* tahun 1834 No. 22. Secara garis besar aturan dalam sistem tanam paksa sebagai berikut:

- a. Melalui persetujuan, penduduk menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanam tanaman komoditas yang laku dijual di pasaran Eropa.

⁷¹ “Residentie Tegal Kultur Verslag 1868”, Arsip Residensi Tegal, No. 18.5, ANRI

⁷² S. Van Deventer, *Bijdragen Tot De Kennis Van Het Landelijk Stelsel op Java, tweede deel* (Zalt-Bommel, 1866), hlm. 157.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 147-180.

⁷⁴ Furnivall, *Hindia Belanda Studi Ekonomi Tentang Majemuk* (Jakarta: Freedom Institute, 2009), hlm. 128.

- b. Tanah yang disediakan untuk penanaman tidak boleh lebih dari seperlima tanah pertanian yang dimiliki petani.
- c. Pekerjaan yang dilakukan petani untuk menanam tanaman komoditas yang laku dijual di pasaran Eropa tidak boleh melebihi waktu tanam padi.
- d. Tanah yang disihkan untuk ditanami tanaman pasaran Eropa tidak dikenakan pajak.
- e. Hasil panen tanaman komoditas yang laku dijual di pasaran Eropa diserahkan pada pemerintah kolonial Hindia-Beland; jika nilai panen melebihi jumlah pajak tanah yang harus dibayar petani maka kelebihannya akan diserahkan pada petani.
- f. Jika terjadi kegagalan panen tanaman komoditas yang laku dijual di pasaran Eropa menjadi tanggung jawab pemerintah kolonial Hindia-Belanda.
- g. Petani akan mengerjakan tanahnya dengan diawasi oleh kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi sejauh masalah teknis, ketepatan waktu, pembajakan, panen dan pengangkutan.⁷⁵

Jawa kemudian berkembang menjadi daerah penting yang menompang perekonomian negeri induk yang terkenal dengan istilah:

“Baju pelampung yang menjaga negeri Belanda tetap mengapung”.⁷⁶

3.2.1 Tebu

Tebu bukanlah tanaman baru di Keresidenan Tegal, Meskipun demikian penanaman secara intensif mulai dilaksanakan setelah sistem tanam paksa diterapkan. Pada tahun 1832 kontrak untuk Pabrik Pangka disetujui dengan area penanaman seluas 500 *bahu*, setahun kemudian kontrak untuk Pabrik Comal

⁷⁵ Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hal.56.

⁷⁶ Furnivall, *op.cit.*, hlm. 127.

menyusul dengan area penanaman seluas 600 *bahu*. Kedua kontrak disepakati selama 20 tahun.⁷⁷ Kontrak Pabrik Pangka sebenarnya hanya memperpanjang kontrak yang sebelumnya telah selesai pada tahun 1830, tetapi sebelumnya status dari pabrik gula ini merupakan pabrik gula partikelir yang di kelola oleh oleh B. F. W. Fisscher dan H. van den Bosch.⁷⁸ Selanjutnya pada tahun 1831 pemerintah mengambil alih penanaman tebu untuk kontrak tersebut dengan status pabrik gula pemerintah dengan kontraktor B. F. W. Fisscher dan Van den Bosch.⁷⁹

Pada tahun 1833 penanaman tebu hanya berhasil di daerah penanaman Pabrik Pangka dengan area seluas penanaman 500 *bahu*, sedangkan Pabrik Comal memulai langkah eksperimennya dengan hanya menanami lahan seluas 207 *bahu* dari 600 *bahu* yang dikontrakkan. Jumlah keluarga yang terlibat untuk tenaga kerja Pabrik Pangka sebesar 2000 keluarga, sedangkan untuk Pabrik Comal 1800 keluarga.⁸⁰ Berdasarkan hal ini maka tenaga kerja di Pabrik Pangka setiap pada *bahu* bekerja 4 keluarga, sedangkan pada pabrik Comal pada setiap *bahu* bekerja 2,5 keluarga. Hasil panen dari pada tahun tersebut sebesar 4000 *pikul* meskipun terdapat data yang menyatakan lebih rendah daripada nilai tersebut.⁸¹ Terlepas dari hal tersebut jumlah panen tersebut memang dapat dikatakan telah jauh dari perkiraan pemerintah yang setidaknya mampu menghasilkan 7500 hingga 8000 *pikul*. Rendahnya hasil panen tersebut membuat pemerintah membuat kebijakan

⁷⁷ “Statistiek der Residentie Tegal 1836”, Arsip Residentie Tegal No. 133, ANRI

⁷⁸ S. Van Deventer, *op.cit.*, hlm. 179

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 373

⁸⁰ “Statistiek 1832”, Arsip Residentie Tegal No. 211.5, ANRI.

⁸¹ *Ibid.* Nilai yang lebih rendah dinyatakan dalam “Statistiek der Residentie Tegal 1836”, dengan jumlah 3073 $\frac{1}{4}$ *pikul* dengan keterangan bahwa hasil panen Pabrik Comal tidak dimasukkan. Sumber lain yang menyatakan nilai yang lebih renda terdapat pada *Bijdragen Tot De Kennis Van Het Landelijk Stelsel op Java, tweede deel*, dengan 3900 *pikul*.

untuk memperkerjakan orang Eropa dan China sebagai mandor untuk mengajari para petani untuk menanam tebu.⁸²

Pada tahun 1834 Pabrik Comal telah menanami seluruh sawah sesuai dengan jumlah kontraknya yaitu 600 *bahu*. Gula yang dihasilkan dari pabrik ini sebesar 1.177,25 *pikul* sedangkan untuk Pabrik Pangka menghasilkan sebesar 4.076,25 *pikul*, total gula yang dihasilkan sebesar 5.253,5 *pikul* target untuk mencapai angka 7500-8000 *pikul* belum tercapai.⁸³ Perkebunan tebu Pabrik Pangka terletak di Distrik Gantungan, Maribaija dan Balamoa. Akibat hadirnya pabrik ini, membuat daerah yang menjadi tempat penanaman ini kemudian berubah menjadi distrik tersendiri yang bernama Distrik Pangka pada tahun itu.⁸⁴ Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya produksi gula per *bahu* pada justru lebih rendah yaitu sebesar 4,7 *pikul* per *bahu*. Baru pada tahun 1835 total produksi gula yang dihasilkan sebesar 7.307,62 *pikul* dengan produksi gula per *bahu* sejumlah 6,6 *pikul*.⁸⁵

Pada tahun 1839 kontraktor untuk pabrik Pangka yang diambil alih oleh E.A. van Vloten dengan penanaman seluas 800 *bahu*. Pemerintah mencoba untuk memberikan tenaga kerja bebas untuk memenuhi tuntutan pabrik, tetapi terdapat salah paham antara keduanya pihak ini hingga yang terjadi adalah selama musim panen selama enam bulan 360 orang bekerja tanpa diberikan upah.⁸⁶

Jumlah tenaga kerja secara keseluruhan yang wajib ikut dalam penanaman menunjukkan fluktuasi dari tahun 1836-1840 seperti yang terdapat pada tabel 3.5, tetapi jika dibandingkan dengan tingkat perluasan sawah jumlah tenaga kerja yang

⁸² Van Soest, *Geschiedenis Van Het Kultuurstelsel, Eerste Deel* (Rotterdam: H. Nijgh, 1869), hlm. 142-143.

⁸³ “Statistiek der Residentie Tegal 1836”, *op.cit.*

⁸⁴ S. Van Deventer, *op.cit.*, hlm. 635.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Vitalis, *De Invoering, Werking, En Gebreken Van Het Stelsel Van Kultures Op Java* (Zalt Bonnel: Joh. Noman en Zoon, 1851), hlm.79. Perlu diketahui pada tahun 1836 upah per *pikul* panen tebu sebesar 10 gulden, dalam “Statistiek der Residentie Tegal 1836”, *op.cit.*

mengurus tanaman tebu per *bahu* akan menunjukkan penurunan. Pada 1836 tenaga kerja per *bahu* 6.5 keluarga, pada tahun 1837 tenaga kerja per *bahu* 5.8 keluarga, pada 1838 tenaga kerja per *bahu* 5.5 keluarga, pada 1839-40 tenaga kerja per *bahu* 4.7 keluarga. Pada 1841 tenaga kerja per *bahu* 4.3 keluarga. Semakin kecil jumlah keluarga yang harus mengurus sawah untuk penanaman tebu ini dapat dipahami juga sebagai semakin tingginya tekanan diterima pada mereka sekaligus tanda pembagian kerja yang buruk. Akibatnya jumlah panen terbesar per keluarga hanya mencapai 3,8 *pikul* yang terjadi pada tahun 1839-40. Kondisi ini diperparah oleh pemilihan lokasi penanaman yang kurang sesuai.⁸⁷

Tabel 3.4
Perkembangan Produksi Gula di Keresidenan Tegal 1835-1841

Tahun	Luas Sawah	Produksi Gula (<i>Pikul</i>)	Produksi / <i>bahu</i> (<i>Pikul</i>)	Tenaga Kerja (Keluarga)
1836	1.100	10.343,27	9,4	7.163
1837	1.100	14.730,6	13,39	6.416
1838	1.150	15.576	13,54	6.416
1839	1.400	24.469	17,47	6.700
1840	1.400	25.842	18,46	6.700

Sumber: “Statistiek Opgaven der Residentie Tegal van en met 1836 tot en meet 1841”, Arsip Residensi Tegal No. 210/1.ANRI.

Berdasarkan tabel tersebut ekspansi perkebunan tebu berlangsung secara lambat di sepuluh tahun awal penerapan sistem tanam paksa. Pada tahun 1841 hasil produksi gula diperoleh dari sawah seluas 1600 *bahu*, tetapi jumlah sawah untuk penanaman tebu tercatat seluas 3.550 *bahu* dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sebesar 15.600 keluarga. Sawah tersebut digunakan untuk penanaman tebu kembali seluas 2142 *bahu*, untuk percobaan penanaman oleh Lucassen 400 *bahu*, penumbuhan bibit seluas 142 *bahu*, dan untuk penanaman baru di Pemalang seluas 300 hingga 350 *bahu* yang nantinya akan digunakan untuk pendirian pabrik baru.⁸⁸

⁸⁷ S. Van Deventer, *op.cit.*, hlm.636.

⁸⁸ *Ibid.*

Selain tenaga kerja penanaman, hadirnya perkebunan tebu juga meningkatkan tenaga kerja angkutan. Tenaga kerja angkutan ini digunakan untuk mengangkut hasil panen tebu ke pabrik untuk diproses menjadi gula. Pada tahun 1841 terdapat 756 pedati di Keresidenan Tegal dengan 632 pedati sebagai tenaga kerja pabrik. Pada tahun tersebut terdapat juga kuda penarik sebanyak 591 ekor, sapi penarik 156 ekor, dan kerbau penarik 2076 ekor.⁸⁹

Memasuki dasawarsa kedua setelah penerapan sistem tanam paksa di Keresidenan Tegal, bermunculan kontrak-kontrak baru untuk pabrik gula. Pada 9 Oktober 1841 muncul kontrak baru antara pemerintah dengan Holmberg de Beckfelt. Holmberg de Beckfelt menjadi kontraktor untuk Pabrik Adiwerna di Kabupaten Tegal dan Pabrik Jatibarang di Kabupaten Brebes, dengan luas penanaman masing-masing pabrik 400 *bahu*. Pada 17 Agustus 1842 secara resmi Lucassen menjadi kontraktor untuk Pabrik Dukuhwringin dan Kemanglen di Kabupaten Tegal dengan luas penanaman masing-masing pabrik 400 *bahu*. Dua tahun selanjutnya C.J. Goldman menjadi kontraktor untuk Pabrik Comal dan pabrik baru yang berada di Kabupaten Pemalang yaitu Banjardawa yang memiliki luas penanaman 400 *bahu*.⁹⁰ Kontrak Pabrik Comal yang awalnya 800 *bahu* akibat dari perbaharuan kontrak penanamannya dipersempit menjadi 550 *bahu* pada tahun berikutnya.⁹¹ Berdasarkan hal ini pada tahun 1844 terdapat 7 pabrik yang berdiri dengan total kontrak luas penanaman tebu seluas 3200 *bahu* yang berarti ekspansi penanaman tebu telah mencapai kenaikan sekitar 450% dari tahun 1833.

Produksi gula menunjukkan nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dari masa awal penerapan tanam paksa baik dalam total produksi maupun rata-rata produksi per *bahu*. Pada tahun 1845 produksi gula sebesar 104.000 *pikul* dengan

⁸⁹ “Statistiek Opgaven der Residentie Tegal van en met 1836 tot en met 1841”, Arsip Residensi Tegal No. 210/1.ANRI.

⁹⁰ “Residentie Tegal Kultuur Verslag 1848”, Arsip Residensi Tegal No. 12/15, ANRI.

⁹¹ *Overzicht Betrekkelijk den Staat der Suikercultuur in Verband tot Het Voorkomende bij de Monographien der Residentie Tegal*, op.cit. hlm.

rata-rata 32,5 *pikul* per *bahu*.⁹² Pada tahun 1846 sebesar 116.276,55 *pikul* dengan rata-rata 36,33 *pikul*, pada tahun 1847 sebesar 132.524,53 *pikul* dengan rata-rata 39,59 *pikul* dan tahun 1848 sebesar 119.945,67 *pikul* dengan rata-rata 38,33 *pikul*.⁹³ Peningkatan jumlah hasil produksi ini dapat dihubungkan dengan modernisasi teknologi dari alat yang digunakan untuk memproses tebu menjadi gula.⁹⁴ Kebanyakan pabrik di keresidenan ini menggunakan mesin dari firma yang berada di Prancis-Belgia yang telah terkenal di dunia karena telah menyuplai peralatan untuk produksi gula bit di Prancis dan produksi gula di daerah kolonial Karibia, firma ini bernama *Derosne en Cail*. Pabrik Dukuhwringin dan Kemanglen disebut menjadi salah satu pabrik paling modern di seluruh Jawa pada waktu itu.⁹⁵

Memasuki dasawarsa ketiga penerapan tanam paksa muncul dua pabrik baru yaitu Lemahabang dan Pagongan. Pabrik Lemahabang memiliki lahan tanam seluas 140 *bahu* di Distrik Losari dan Pabrik Pagongan 150 *bahu* di Distrik Tegal. Kedua pabrik ini berdiri dengan menggantikan kontrak pabrik yang awalnya mengelola perkebunan tembakau. Letak Pabrik Lemahabang dikatakan sangat strategis karena dikelilingi oleh sawah-sawah yang subur, selain itu area penanaman tebu dan pabrik bersebelahan dengan sungai Tandjong yang terhubung langsung ke pantai. Hal ini membuat pabrik tidak perlu dibebani dengan biaya transportasi darat. Berbeda dengan Pabrik Pagongan yang beroperasi cukup lama sebagai pabrik pemerintah, kontrak antara pemerintah dengan kontraktok Pabrik Lemahabang hanya bertahan sampai tahun 1855 setelah itu pabrik ini berstatus partikelir.⁹⁶

⁹² “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”, Arsip Residensi Tegal No. 12.8, ANRI.

⁹³ “Residentie Tegal Kultuur Verslag 1848”, *op.cit.*

⁹⁴ Soegijanto Padmo, *Bunga Rampai Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), hlm. 82

⁹⁵ G. R. Knight, *op.cit.*, hlm.43.

⁹⁶ *Overzicht Betrekkelijk den Staat der Suikercultuur in Verband tot Het Voorkomende bij de Monographien der Residentie Tegal, op. cit.*, hlm.3

Pabrik Pangka tidak beroperasi mulai tahun 1850 akibat perselisihan yang terjadi antara Van Vloten sebagai kontraktor dan pemerintah yang diwakili oleh J.A. Vriesman untuk pembiayaan tenaga kerja yang diklaim harus dibayar oleh pemerintah dengan kerugian senilai 10.000 gulden dari kontraktor. Tuntutan hukum dilakukan dengan hasil keputusan dari pengadilan di tahun 1855 menyatakan bahwa pemerintah tidak berwenang untuk mengganti kerugian tersebut, tetapi karena kontraktor masih bersikukuh maka kontrakpun dibubarkan.⁹⁷ Pabrik Pangka tetap melakukan penanaman tebu tetapi tidak memiliki kewajiban untuk menyetorkan gula pada pemerintah dengan demikian pabrik ini menjual hasilnya secara mandiri.

Berdasarkan tabel dibawah, dalam waktu sembilan tahun rata-rata produksi pertahun Pabrik Comal 7.642,5 *pikul*, Pabrik Banjardawa 16.791,6 *pikul*, Pabrik Adiwerna 15.318 *pikul*, Pabrik Jatibarang 15.319,1 *pikul*, Pabrik Dukuhwringin 12.716,6 *pikul*, Pabrik Kemanglen 16.195,7 *pikul*, Pabrik Lemahabang 4.318,25 *pikul*, dan Pabrik Pagongan 3.269,25 *pikul*. Rata-rata produksi ini jika diurutkan dari yang terbesar akan menunjukkan bahwa Pabrik Banjardawa sebagai penghasil gula terbesar. Pabrik Pagongan dan Lemahabang menjadi yang terkecil. Pabrik Comal juga menunjukkan jumlah produksi yang relatif kecil dengan luas lahan penanaman yang tidak pernah di bawah 400 *bahu*. Penyebab dari rendahnya produksi pabrik tersebut adalah faktor dari mesin yang kurang modern, kualitas tebu yang kurang baik karena area penanaman di sekitar Sungai Comal yang kerap terjadi banjir dan sifat sebagian tanahnya sendiri yang kurang cocok terutama di sebelah timur Sungai Comal.⁹⁸

⁹⁷ Van Hall dan Lintelo De Geer, *Regeleerd Bijblad* (Amsterdam: Johannes Muller, 1855), hlm. 313-329.

⁹⁸ *Overzicht Betrekkelijk den Staat der Suikercultuur in Verband tot Het Voorkomende bij de Monographien der Reidentie Tegal, op. cit .*, hlm. 6.

Tabel 3.5
Jumlah Produksi Gula Per Pabrik di Keresidenan Tegal Tahun
1849-1857

Nama Pabrik	Jumlah Produksi Gula (<i>pikul</i>)								
	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857
Pangka	21.988	19.469	18.000	18.356	-	-	-	-	-
Comal	3.814	6.903	6.253	8.729	8.300	9.000	7.421	10.215	8.148
Banjardawa	13.964	15.303	14.175	15.380	18.500	21.000	20.300	17.500	15.003
Adiwerna	15.457	16.336	16.686	12.764	15.541	16.623	15.810	15.261	13.384
Jatibarang	9.745	19.016	13.468	14.424	16.473	15.684	19.546	15.655	13.861
Dukuhwringin	13.790	13.558	13.203	12.431	13.852	12.026	11.685	12.086	11.819
Kemanglen	16.121	15.502	16.540	16.719	14.184	17.919	13.381	15.605	19.791
Lemahabang	-	2.878	4.808	5.204	7.011	4.050	1.092	4.700	4.803
Pagongan	-	3.032	2.575	2.562	3.102	3.191	3.686	3.846	4.160
Total	94.879	111.997	105.708	88.213	96.963	99.493	92.921	94.868	90.969

Sumber: Bijlage G, Aantooning van productie welke jaarlijk bij iedere suikerfabriek is verkregen dalam *Stukken Betreffende Het Onderzoek Bij Besluit van den Gouverneur-Generaal an Nederlandsch Indie van 08 december 1853, no 10*, (Batavia: Benomde Commisie (Commisie Umbgrove), 1857) dan *Memorie Behoorende Bij Het Rekest van Suiker Contracten Op Java gerigt aan den Koning* (Batavia:Lange & Co, 1860), hlm. 69.

Penanaman tebu yang baik ditempatkan pada sawah yang memiliki penyinaran matahari yang baik karena pada dasarnya jika daerah tempat penanaman tebu memiliki suhu yang dingin, gula yang dihasilkan dari batang tidak terlalu banyak. Penanaman tebu didahului oleh penanaman padi yang mulai di bulan Agustus atau September dengan perkiraan panen pada bulan November atau Desember. Sawah yang telah selesai ditanami padi dibiarkan selama hampir sebulan supaya kadar asamnya berkurang. Baru setelah itu pada Februari jerami dari padi ini dikumpulkan dan dibakar baru dapat dibajak, lalu setelah selesai dibuat alur untuk penanaman dengan lebar 12 kaki di sampingnya dibuat selokan untuk irigasi selebar 3 kaki dengan dalam 3 kaki dan dibongkar juga batas-batas sawah, setelah itu tebu dapat ditanam.⁹⁹

⁹⁹ “Beschrijving Van De Suiker-Cultuur Door Den Wadana Van Sragi In Pekalongan, Met Onderstaande Commentaar Tot Vermeerdering En Verbetering Door Den Mas Rangga Patih Van Pernalang En Den Ondercollecteur Van Pernalang , Beide Vroeger Wadanas In Het Suiker-District Pangka” dalam *BKI, Eerste deel* (Amsterdam, Friedrik Muller, 1856), hlm. 251-154.

Pada Keresidenan Tagal penanaman tebu berkontribusi pada perubahan sifat tanah, karena untuk tanaman tebu memang terkenal membutuhkan begitu banyak nutrisi, pergiliran tiga kali (tanaman pangan dan sekunder) jika tidak ada pemupukan tambahan untuk menjaga kesuburan tanah, dan sepenuhnya bergantung pada irigasi, akibat yang timbul adalah tanah kehilangan banyak daya kesuburannya.¹⁰⁰ Penanaman tebu ini membutuhkan waktu sekitar 16-18 bulan yang dikurangi waktu menanam padi dengan demikan dalam hal ini pemiliknya kehilangan satu kali panen padi dan setengah tanaman sekunder.¹⁰¹

Pada tahun 1858 kondisi pertanian secara umum dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, karena terjadi kekeringan yang luar biasa. Pada tahun tersebut curah hujan telah lebih baik, tetapi kebutuhan kayu kering agak sulit untuk pembakaran nira tebu di pabrik.¹⁰² Hal ini bukanlah masalah besar karena sebagian besar pabrik di daerah ini menggunakan mesin *Derosne en Cail* yang meminimalkan penggunaan bahan bakar.¹⁰³ Berdasarkan tabel 3.7 justru pada tahun tersebut produksi gula paling besar dengan jumlah tenaga kerja dan luas lahan tanam yang paling sedikit dari pada tahun-tahun selanjutnya.

Umumnya masa-masa sibuk tenaga kerja dalam penanaman tebu berlangsung antara April sampai Oktober, karena tiba waktunya untuk penanaman tebu pada lahan baru.¹⁰⁴ Pada bulan-bulan tersebut Juli hingga November menjadi musim paling sibuk karena bebarengan dengan waktu panen dan penggilingan. Misalnya pada Pabrik Pangka yang memulai penanaman tebu pada bulan Juli, Agustus, dan September, sedangkan penggilingan harus selesai paling lambat

¹⁰⁰ P.J. Veth, *op.cit.*, hlm. 506.

¹⁰¹ Boomgaard *op.cit.*, hlm. 146.

¹⁰² "Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1858", Arsip Residensi Tegal No. 14.9, ANRI.

¹⁰³ P.J. Veth, *op.cit.*, hlm. 510.

¹⁰⁴ Latifatul Izzah, *Karesidenan Madiun Pada Masa Cultuurstelsel 1830-1870* (Yogyakarta:Best Publisher, 2018), hlm. 38.

pertengahan November.¹⁰⁵ Waktu penggilingan pada masing-masing pabrik memiliki perbedaan. Pada tahun 1859 tercatat penggilingan untuk beberapa pabrik memakan waktu diatas tiga bulan, dengan rincian Kemanglen 116 hari, Dukuhwringin 109 hari, Banjardawa 131 hari, Comal 119 hari, Jatibarang 119 hari, Adiwerna 145 hari.¹⁰⁶ Hal inilah yang membuat sebagian petani akhirnya tidak memiliki waktu untuk mengurus ladang mereka.

Para tenaga kerja yang terlibat dalam operasional pabrik mendapatkan upah untuk kinerjanya dalam merawat tebu, upah penanaman yang dikenal dengan *plantloon*. Upah penanaman inilah yang membedakan tenaga kerja wajib ini dengan tenaga kerja wajib lainnya yang tidak mendapatkan upah. Upah penanaman dibayarkan supaya penduduk mampu membayar pajak dan memiliki daya beli untuk barang-barang yang tersedia di pasar, sederhananya mempercepat penggunaan ekonomi uang di pedesaan.¹⁰⁷ Upah ini sebenarnya jauh lebih besar jumlahnya jika dibandingkan jumlah pajak tanah untuk sawah yang ditanami tebu, seperti yang terlihat pada tabel.

Perbandingan uang yang diterima tenaga kerja dengan sewa tanah yang seharusnya dibayar pada sawah yang ditanami tebu terbilang besar. Pasalnya nilai pajak tanah mengikuti luas lahan penanaman yang cenderung bertambah dengan jumlah kecil, sedangkan nilai upah ini mengikuti jumlah produksi per *pikul*. Jika dilihat pajak tanah yang diterima per keluarga yang terendah dikeluarkan pada tahun 1862 dengan 2,2 gulden per keluarga, sedangkan upah tenaga kerja terendah dibayarkan pada tahun 1860 dengan 21,3 gulden per keluarga, bahkan upah terendah ini setidaknya dapat digunakan untuk membayar pajak tanah yang ditanami tebu dari 8 keluarga. Rata-rata jumlah upah 23.34 gulden per keluarga

¹⁰⁵ *Suiker Contract, Onder De Nadere Goedkeuring Van Zijne Excellentie Den Gouverneur Generaal, Aangegaan Tusschen Den Directeur Der Kulturen, Voor En Van Wege Het Gouvernement Van Nederlandsch Indië, Ter Eene, En De Heeren B. F. W. Fischer En Ii. Van Den Bosch, Wonende Te Tegal, Van Beroep Suikerfabrikanten Ter Andere Zijde.*

¹⁰⁶ P.J. Veth, *op.cit.*, hlm. 507.

¹⁰⁷ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid 1* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1933), hlm.319.

pertahun dibandingkan rata-rata pajak tanah 2.32 gulden per keluarga pertahun. Upah penanaman juga dapat diartikan sebagai salah satu cara dalam mempengaruhi atau membujuk petani untuk meningkatkan mutu dan kuantitas tebu. Upah penanaman ini menjadi masalah cukup dilematis terutama jika digunakan untuk tolok ukur kesejahteraan yang sering diperdebatkan.¹⁰⁸

Tabel 3.6
Jumlah Produksi Gula di Keresidenan Tegal Tahun 1858-1862

Tahun	Luas Lahan (Bahu)	Jumlah Produksi (Pikul)	Tenaga Kerja (Keluarga)	Upah Penanaman (Gulden)	Pajak Tanah di tanami Tebu (Gulden)
1858	3.194	126.342,80	11.450	283.565	28.835
1859	3.199	110.584,47	12.400	276.413,96	28.835
1860	3.222	112.804,90	12.400	264.401,56	28.902
1861	3.243	104.156,83	12.400	307.119,46	28.901
1862	3.200	106.044,86	12.800	305.808,08	28.600

Sumber: P.J. Veth, *Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek Van Netherland Indie III*, (Amsterdam: P.N. Van Kampen. 1869), hlm. 478-485.

Aturan tanam paksa sebenarnya membuat para petani tidak perlu membayar tanah yang ditanami tebu tersebut. Meskipun demikian, jika pajak tanah yang ditanami tebu tetap ditarik maka hal tersebut bukan masalah yang besar karena nilai yang jauh lebih rendah dengan kisaran 9-10% perkeluarga. Hal yang membuat ini menarik adalah jumlah uang yang diterima petani telah sedemikian besar terlepas apakah ini menguntungkan atau merugikan. Sebagai contoh pada tahun 1861 pajak tanah untuk seluruh petani penanam padi sebesar 476.609 gulden dengan rata-rata pajak tanah per keluarga hanya sebesar 11,125 gulden.¹⁰⁹ Nilai ini jika dibandingkan dengan upah penanaman tebu nilai tersebut hanya sekitar 64 % dari total upah penanaman, atau jika dihitung per keluarga

¹⁰⁸ G.R. Knight, "Kaum Tani Dan Budidaya Tebu di Pulau Jawa Abad Ke-19: Studi Dari Kersidenan Pekalongan 1830-1870", dalam Anne Booth, William J.O 'Malley, dan Anna Weidemann, *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 77.

¹⁰⁹ P.J. Veth, *op.cit.*, hlm. 109-110.

nilai tersebut mampu untuk digunakan membayar pajak petani penanam padi sejumlah 27.488 keluarga. Tentu ini jumlah yang besar.

Pada tahun 1862 penanaman tebu mengalami kegagalan di Distrik Pemalang, Comal lor dan Comal Kidul. Rata-rata upah untuk penanam tebu di ketiga tempat tersebut sejumlah 7,5 gulden hingga 10 gulden. Tiap keluarga umumnya diberikan upah 8 gulden, dengan demikian pada tiap *bahu* setidaknya upah berjumlah 24 gulden.¹¹⁰ Jika dibandingkan dengan upah keseluruhan pada tabel diatas jumlah ini tentu sangat kecil, karena secara kasar upah tiap keluarga pada tahun tersebut berjumlah 23,8 gulden. Para pekerja harian di pabrik memiliki perbedaan pada tiap pabrik. Berdasarkan keputusan residen pada 30 Mei No. 26 menyatakan upah buruh harian yang diterima 20 sen untuk Pabrik Comal dan 25 sen untuk pabrik Banjardawa. Jika dibandingkan dengan dengan pabrik partikelir seperti Pabrik Lemahabang upah yang dibayarkan sama dengan Pabrik Comal tetapi pada pabrik tersebut pekerja juga mendapatkan upah satu kati beras, sedangkan untuk tiap pekerja tetap menerima pembayaran sejumlah 6,60 gulden sebulan.¹¹¹

Pada tahun awal didasawarsa terakhir penerapan tanam paksa, kontrak dari para pengusaha mulai diperbaharui. Kontrak Pabrik Pangka yang sebelumnya dibubarkan, kemudian memulai kontrak baru dan pada tahun 1862 tercatat area penanaman seluas 500 *bahu*, atau 300 *bahu* lebih kecil dari pada penanaman sebelum pembubaran kontrak. Pabrik ini meninggalkan area penanaman yang terletak di sebelah utara Distrik Gantungan. Pada tahun tersebut kontrak untuk pabrik Adiwerna, Jatibarang, Dukuhwringin, dan Kemanglen diperbaharui. Setahun kemudian kontrak untuk Pabrik Pagongan, Comal dan Banjardawa ikut menyusul diperbaharui dengan luas masing-masing penanaman 150 *bahu*, 300 *bahu*, dan 500 *bahu*.¹¹²

¹¹⁰ Residentie Tegal Kultur Verslag 1862”, Arsip Residensi Tegal No. 15/15, ANRI

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

Hasil produksi pada masing-masing pabrik terlihat pada tabel 3.8. Berdasarkan tabel tersebut jumlah rata-rata produksi per *bahu* pada tahun 1863 39,36 *pikul*, tahun 1864 24,27 *pikul*, tahun 1865 48,29 *pikul* dan tahun 1866 50,53 *pikul*. Jumlah produksi terendah terjadi pada tahun tahun 1864. Hal ini dipengaruhi oleh cuaca yang bahkan membuat gagal panen di beberapa wilayah keresidenan ini.¹¹³ Jumlah tertinggi panen per *bahu* terjadi pada tahun 1865 dan 1866, dengan jumlah produksi per *bahu* yang melebihi jumlah produksi per *bahu* di seluruh Jawa yang rata-ratanya hanya 44,47 *pikul* dan 47,64 *pikul*. Pada dasarnya secara keseluruhan jumlah produksi selama empat tahun masih di bawah jumlah keseluruhan produksi di Jawa dengan 40,61 *pikul* untuk Keresidenan Tegal dan 44,20 *pikul* pertahun untuk seluruh Jawa.¹¹⁴

Tabel 3.7
Jumlah Produksi Gula Per Pabrik di Keresidenan Tegal
Tahun 1863-1866

Pabrik	Luas	1863	1864	1865	1866
Pangka	500	11.480,16	9.020,19	19.546,94	17.682
Comal	300	13.000	5.054,23	12.636,33	11.207,37
Banjardawa	400	19.938,66	10.779,21	15.694,81	20.999
Adiwerna	400	17.556,68	10.278,72	21.159,21	20.810,20
Jatibarang	400	17.052,43	9.916,49	25.394,83	28.194,24
Dukuhwringin	400	17.159,42	11.790,86	19.000	20.019,22
Kemanglen	400	18.864,81	10.015,38	25.008,18	24.597,51
Pagongan	150	6.616,4	6.000,58	7.500	6.750

Sumber: J.Millard, *Suikerindustrie Op Java* ('s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1869), hlm.186-188.

Pada tahun 1865 harga tebu yang ditanam memiliki tiga kualitas yang dinilai berdasarkan observasi lapangan, masing-masing kualitas ini dibeli dengan harga yang berbeda. Tebu kualitas pertama dibeli dengan harga 200 gulden per *bahu*, kualitas kedua 140 gulden per *bahu*, dan kualitas ketiga 80 gulden per

¹¹³ *Koloniaal Verslag* 1864.

¹¹⁴ J.Millard, *Suikerindustrie op Java* ('S Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1869), hlm.46.

bahu.¹¹⁵ Jumlah ini meningkat drastis jika dibandingkan dengan awal penerapan tanam paksa tebu kualitas pertama dibeli hanya dengan harga 75 gulden per *bahu*, kualitas kedua 56 gulden per *bahu*, dan kualitas ketiga 35 gulden per *bahu*.¹¹⁶

Pada tahun 1868 produksi gula di masing-masing pabrik sebagai berikut: Pabrik Pangka 25.912,41 *pikul*, Pabrik Comal 12.210,01 *pikul*, Pabrik Banjardawa 17.490,73 *pikul*, Pabrik Adiwerna 27.524,42 *pikul*, Pabrik Jatibarang 22.139,53 *pikul*, Pabrik Dukuhwringin 15.941,38 *pikul*, Pabrik Kemanglen 11.115,91, *pikul* dan Pabrik Pagongan 7.500 *pikul*.¹¹⁷

3.2.2 Kopi

Keresidenan Tegal juga telah menjadi salah satu tempat penanaman kopi di Jawa sebelum sistem tanam paksa seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Keputusan yang cukup penting untuk meningkatkan produksi kopi pada saat itu dilakukan dengan mengeluarkan resolusi 15 Agustus 1831 No. 17. Pada resolusi tersebut Residen Tegal memerintahkan untuk memberantas seluruh kebun kopi yang buruk (terutama menghentikan penanaman kopi di beberapa tempat di Distrik Bongas dan Losari sekali lagi ditegaskan bahwa tanahnya tidak cocok) dan memerintahkan setiap penanam kopi wajib memelihara 500 pohon kopi yang menghasilkan buah yang baik. Pada tahun tersebut terdapat tanaman kopi sebanyak 720.070 pohon di Brebes, 222.466 pohon di Tegal, dan 659442 di Pemalang.¹¹⁸ Selanjutnya lewat resolusi 3 Februari 1833 No. 1 pemerintah pusat mengumumkan bahwa seluruh kopi di Jawa menjadi pembayaran sewa tanah yang harus diserahkan kepada pemerintah dengan harga yang telah ditentukan.¹¹⁹

Pada tahun 1833 kopi di keresidenan ini masih dibudidayakan secara secara terbatas oleh masyarakat yang mendiami tempat yang cocok untuk

¹¹⁵ Bijlage CC, *Koloniaal Verslag* 1868-1869.

¹¹⁶ "Statistiek der Residentie Tegal 1836",

¹¹⁷ "Residentie Tegal Kultuur Verslag 1868", *Ibid*.

¹¹⁸ "Statistiek der Residentie Tegal 1836", *op.cit*.

¹¹⁹ S. Van Deventer, *op.cit.*, hlm. 389.

penanaman kopi. Hasil panen pada tahun tersebut berkisar 12.000 *pikul*, tetapi dengan adanya penanaman pohon baru jumlah yang panen yang menjadi target pemerintah berkisar pada 18.000-20.000 *pikul* pertahun.¹²⁰ Jumlah produksi kopi pada Keresidenan Tegal dapat dilihat pada tabel. 3.9. Produksi rata-rata produksi kopi rata-rata dari tabel hanya sekitar 11.674,69 *pikul*, dengan jumlah produksi terendah rendah terjadi pada tahun 1832 dan 1835, dengan paling tinggi terjadi pada tahun 1836. Hal ini menyatakan bahwa target pemerintah tidak dapat terwujud dalam waktu yang dekat, bahkan di tahun 1836 total panen hanya berkisar 14.715,31 *pikul*.

Tabel 3.8
Jumlah Pohon dan Produksi Kopi di Keresidenan Tegal 1832-1836

Tahun	Brebes			Tegal			Pemalang		
	Baru (pohon)	Mati (pohon)	Produksi kopi (pikul)	Baru (pohon)	Mati (pohon)	Produksi Kopi (pikul)	Baru (pohon)	Mati (pohon)	Produksi Kopi (pikul)
1832	606.050	27.050	3.286	1.002.961	20.300	1.216,35	64.500	-	4.267,32
1833	100.350	10.000	5.345	622.685	116.500	2.045,40	158.500	30.000	4.541,57
1834	167.400	50.000	6.664	680.409	103.074	1.629,59	183.000	42.500	3.712,32
1835	703.600	35.000	6.246	1.033.488	14.736	1.522,70	75.500	20.500	3.181,93
1836	1.207.760	90.600	8.645,23	64.500	783.618	1.748,74	911.400	52.500	4.321,34

Sumber: "Statistiek der Residentie Tegal 1836", Arsip Residensi Tegal No. 133, ANRI

Berdasarkan tabel tersebut secara umum jumlah penanaman pohon kopi baru, selalu memiliki angka yang lebih tinggi daripada pohon kopi yang mati, kecuali yang terjadi pada tahun 1836 di Tegal. Penanaman kopi baru yang intensif ini menandai usaha yang cukup serius untuk meningkatkan produksi kopi, karena tanaman ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjadi produktif dengan kisaran empat tahun setelah penanaman.¹²¹ Tingkat produksi kopi dari tabel tersebut juga cenderung rendah, dengan rata-rata panen pertahun sebesar 6.037,24 *pikul* di Brebes, 1,632.55 *pikul* di Tegal, dan 4.004,89 *pikul* di Pemalang. Hasil yang paling rendah terdapat di Kabupaten Tegal yang

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 637.

¹²¹ Clifford Geertz, *op.cit.*, hlm. 59.

menandakan bahwa memang konsentrasi untuk mengembangkan tanaman kopi berada di Brebes dan Pemalang.

Kopi yang telah dipanen diserahkan pada pemerintah dan dikirim di gudang-gudang yang telah disediakan. Pada tahun 1836 terdapat delapan gudang penyerahan kopi dengan rincian di Brebes terdapat tiga gudang besar, di Tegal dua gudang besar dan satu gudang kecil, dan di Pemalang dua gudang kecil. Tiap *pikul* kopi dihargai oleh pemerintah sebesar 12 gulden, jumlah yang lebih kecil dari harga kopi di Banyumas dengan 13 *pikul* tiap *pikul*.¹²² Pengangkutan kopi menuju gudang pemerintah juga mendapat bayaran sejumlah 5 sen per paal dan 1.5 gulden per *pikul*.¹²³

Penyetoran kopi yang dilakukan para petani ini mendapat potongan dari para pejabat daerah yang besarnya di tentukan oleh pemerintah kolonial. Pada waktu itu potongan ini berjumlah 4 persen yang diberikan pada jajaran birokrasi baik untuk pemerintah kolonial ataupun kepala pribumi. Setelah potongan ini terkumpul kemudian didistribusikan pada tiap pejabat daerah. Besarnya potongan ini sebanyak 0.5% untuk residen, bupati, kontrolir, wedana, mantri kopi, dan 2% untuk kepala desa.¹²⁴ Tentu saja ini dapat dikatakan tidak menguntungkan para petani mengingat kerja keras mereka berbulan-bulan dalam merawat kopi, terlebih jika terjadi gagal panen yang sepenuhnya harus menjadi tanggungan mereka. Hal ini membuat kedudukan para pejabat kolonial dan kepala pribumi semakin kuat dalam mempertahankan sistem penyerahan wajib kopi, karena memang terdapat kepentingan keuangan dari mereka secara langsung.¹²⁵

Tumbuhan kopi baik ditanam pada kondisi tanah yang subur yang berwarna hitam bercampur merah. Tumbuhan kopi tidak cocok ditanam di tanah merah, tanah bekas alang-alang, tanah putih, dan tanah berkrilik karena menghambat pertumbuhannya. Tanaman kopi juga tanaman yang tahan terhadap

¹²² Tanto Sukardi, *op.cit.*, hlm. 81.

¹²³ “Statistiek der Residentie Tegal 1836”, *op.cit.*

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ D.H. Burger, *op.cit.*, hlm. 203.

angin, sehingga membutuhkan tanaman peneduh. Penyemaian bibit setidaknya harus dimulai bulan Juli dengan menggunakan kopi perempuan yang warnanya merah kulitnya, atau yang baik juga dapat ditemukan dari sisa kopi yang makan luak. Penyemaian ini dilakukan di dekat lahan yang akan ditanami. Pembudidayaan tanaman kopi dimulai pada bulan Agustus dengan membabad pohon dan semak belukar. Setelah lahan ini bersih lalu sisa pohon dan semak dibakar setelah kering, dan di bajak dua hingga tiga kali. Kalau tanah yang digunakan miring harus dibuat selokan supaya ketika musim hujan tanaman kopi tidak terbawa. Kopi yang telah ditanam disulam pada bulan Februari untuk menggantikan tanaman yang mati, tetapi pekerjaan tersebut belum selesai karena dalam dua tahun pertama mereka harus sering datang untuk memotong dahan-dahan kopi.¹²⁶

Tahap ini sering membuat para pekerja meninggalkan rumah selama berbulan-bulan sehingga para keluarga penanam kopi harus tinggal dalam rumah bambu yang didirikan di dekat lahan penanaman kopi. Pada saat biji-biji kopi mulai masak pada dahan-dahan dewasa, seluruh angkatan kerja kembali dikumpulkan ke perkebunan untuk memetik. Biji ini kemudian diangkut ke desa untuk dijemur dan setelah kering disetorkan ke gudang.¹²⁷ Tenaga kerja yang diperlukan untuk budidaya kopi ini tidak terlalu sukar dikerahkan, karena memiliki kasus halnya budidaya tebu yang mana para *sikep* yang memiliki tanggung jawab ini dapat dengan leluasa menyuruh orang yang hidupnya bergantung pada mereka sebagai pengatannya.¹²⁸

Ukuran perhitungan jumlah penanaman kopi tidak berdasarkan luas lahan seperti tebu tetapi berdasarkan jumlah pohon. Pada saat tanam paksa diterapkan berdasarkan jenis lahan setidaknya terdapat tiga jenis kopi yang dibudidayakan

¹²⁶ “Beschrijving van de Koffij-Cultuur in de Residentie Tegal”, dalam *BKI, Eerste deel, op.cit.*, hlm. 239-244.

¹²⁷ Latifatul Izzah, *op.cit.*, hlm.44.

¹²⁸ M.R. Fernando dan William J.'O Malley, “Petani dan Pembudidayaan Kopi di Karesidenan Cirebon, 1800-1900”, dalam Anne Booth, William J.O ‘Malley, dan Anna Weidemann, *op.cit.*, hlm. 246.

yaitu: pertama kebun kopi (*koffij tuin*) yaitu kopi yang ditanam di lahan perkebunan milik desa, kedua kopi hutan (*koffij bosch*) yaitu kopi yang ditanam di lahan hutan yang tempatnya lumayan jauh dari tempat tinggal, dan ketiga kopi pager (*koffij pagger*) yaitu kopi yang ditanam di tepi jalan-jalan dan dilahan pekarangan milik warga desa sebagai tambahan penghasilan.¹²⁹ Tabel jenis kopi dan jumlah produksinya terlihat pada tabel 3.10.

Berdasarkan tabel tersebut jumlah pohon kopi yang paling banyak dibudidayakan adalah kopi pager diikuti oleh kopi kebun, dan kopi hutan. Hal ini dapat dipahami karena jenis kopi pager merupakan yang paling mudah dibudidayakan terkait dengan jarak sehingga mendapat pengawasan dan perawatannya yang lebih baik. Selain hal ini pada tabel tersebut juga terlihat bahwa dari lima tahun tersebut hanya jenis kopi kebun yang pohonnya di tahun 1841 tidak menunjukkan jumlah yang kurang dari tahun 1837 yang dapat diartikan bahwa kopi kebun sedang menjadi prioritas dalam usaha peningkatan jumlah produksi.

Tabel 3.9
Jumlah Pohon Kopi dan Produksinya di Keresidenan Tegal Tahun 1837-1841

Tahun	Kopi Kebun (Pohon)	Kopi Hutan (pohon)	Kopi Pager (pohon)	Produksi Kopi (pikul)	Tenaga Kerja (Keluarga)
1837	2.937.010	729.250	8.368.561	16.982,57	6.311
1838	2.833.240	792.550	8.884.831	9.636,89	6.302
1839	3.184.020	564.400	9.397.651	22.578,70	6.302
1840	3.501.500	564.400	6.028.951	25.437,93	7.181
1841	3.394.700	509.830	6.116.035	27.643,72	7.044

Sumber: "Statistiek Opgaven der Residentie Tegal van en met 1836 tot en meet 1841", Arsip Residensi Tegal No. 210/1.ANRI

Target pemerintah baru terwujud pada tahun 1839 dengan panen melebihi angka 18.000-20.000 pikul. Jumlah terendah dari produksi kopi terjadi pada tahun 1838 dengan yang tertinggi terjadi pada tahun 1841, jadi meskipun jumlah pohon

¹²⁹ Jan Breman, *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014), hlm. 215.

kopi telah berkurang sekitar 2 juta pohon dari semua jenis kopi dari tahun 1837 tingkat produksi tidak menunjukkan tren negatif yang sama. Tenaga kerja juga menunjukkan jumlah yang berfluktuasi dalam lima tahun tersebut, dengan jumlah tertinggi pada 1840. Rincian produksi kopi per keluarga sebagai berikut: 2,6 *pikul* pada 1837, 1,5 *pikul* pada 1838, 3.58 *pikul* pada 1839, 3.54 *pikul* pada 1840, dan 3.92 *pikul* pada 1841.

Pada tahun 1845 tanaman kopi berjumlah 10.716.258 pohon yang menghasilkan 21.862.65 *pikul*, jumlah ini lebih rendah daripada setahun sebelumnya yang berjumlah 32.996 *pikul*. Produksi tersebut secara keseluruhan menghasilkan nilai 220.877,99 gulden dengan harga per *pikulnya* sekitar 10 gulden, harga ini lebih rendah daripada tahun 1836. Penanaman pohon baru berjumlah 895.774 pohon kebun dan 330.935 pohon kopi pagger yang diperkirakan pada tahun selanjutnya menghasilkan sekitar 28.000-30.000 *pikul*.¹³⁰ Perkiraan pemerintah ini benar dengan produksi kopi pada tahun 1846 sebesar 28.489,71 *pikul*. Produksi kopi ini kemudian turun pada tahun 1847 menjadi 27.568 *pikul*.¹³¹

Turunnya produksi ini dikaitkan dengan turunnya jumlah tenaga kerja. Pada tahun 1846 jumlah keluarga yang terlibat dalam budidaya kopi sebesar 9.377 keluarga. Jumlah ini menurun pada tahun 1847 menjadi 7.470 keluarga yang disebabkan epidemi yang menyerang di berbagai wilayah distrik pegunungan (*berg-districten*) di Keresidenan Tegal yang tempat merupakan konsentrasi penanaman kopi. Pada tahun 1848 jumlah keluarga yang terlibat dalam budidaya kopi meningkat menjadi 8.286 keluarga.¹³² Hal ini karena penarikan budidaya teh yang melepaskan 804 keluarga di *Afdeling* Tegal untuk dialihkan menjadi tenaga

¹³⁰ “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”, *op.cit.*

¹³¹ “Algemeene toestand van het eiland Java in 1847”, dalam S. A. Buddingh , *Indisch Archief III* (Batavia, Lange and C.O.,1850), hlm.302.

¹³² “Residentie Tegal Kultuur Verslag 1848”,*op.cit.*

kerja budidaya kopi dan pada tahun tersebut datang bantuan tenaga medis untuk meredakan epidemi ini.¹³³

Pada tahun 1848 hasil panen kopi sebesar 27.272,76 *pikul*. Pada Kabupaten Brebes tempat penghasil kopi berada di Distrik Losari, Bumiayu, Lebaksiu, Salem yang rata-rata tiap distrik menghasilkan 4.340,49 *pikul*. Pada Kabupaten Tegal tempat penghasil kopi berada di Gantungan yang menghasilkan 892.60 *pikul*. Pada Kabupaten Pemalang tempat penghasil kopi berada di Mandiraja dan Bongas dengan rata-rata tiap distrik menghasilkan 4.509,3 *pikul*. Hasil panen ini kemudian diserahkan pada gudang-gudang penyerahan di tiap wilayah tersebut. Pada saat itu tempat gudang penyerahan di Kabupaten Brebes meliputi Bantarkembang yang menerima 4.478,32 *pikul*, Bumiayu yang menerima 6.701,46 *pikul*, Lebaksiu yang menerima 6.181,78 *pikul*. Gudang penyerahan pada Kabupaten Tegal berada di Djatinegara yang menerima 892.60 *pikul*. Gudang penyerahan pada Kabupaten Pemalang meliputi Randoedongkal yang menerima 6.091,12 *pikul*, Wanaratta yang menerima 1.786,88 *pikul*, dan Bantarbolang yang menerima 1140,60 *pikul*. Setelah diolah digudang dan ditambahkan dengan hasil panen pertama produksi kopi dilaporkan sebesar 27,568 *pikul*.¹³⁴

Pada tahun 1848 walaupun telah ada bantuan tenaga medis ternyata epidemi masih berlanjut hingga tahun 1849 dan baru mereda setelah 1850, terutama pada beberapa wilayah tertentu seperti di Distrik Gantungan.¹³⁵ Hal ini berakibat pada merosotnya produksi kopi, pada tahun 1849 yang hanya 14.915,02 *pikul*. Produksi kopi baru meningkat kembali pada tahun 1850 dengan 34.195,14 *pikul*.¹³⁶ Pada tahun 1853 Produksi kopi sebesar 17.433 *pikul* dari 7.153 keluarga.

¹³³ “Algemeene toestand van het eiland Java in 1847”, *op.cit.*

¹³⁴ “Residentie Tegal Kultuur Verslag 1848”, *op.cit.*

¹³⁵ “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1850”, Arsip Residensi Tegal No. 13.1, ANRI.

¹³⁶ “Residentie Tegal Kultuur Verslag 1848”, *op.cit.*, dan “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1850”, *op.cit.*

Total pembayaran dari produksi kopi ini berjumlah 145.276 gulden, dengan demikian rata-rata tiap rumah tangga menerima 20.3 gulden.¹³⁷ Mengenai besarnya jumlah produksi dan banyaknya pohon kopi yang harus dirawat tiap keluarga pada tahun-tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 3.11.

Berdasarkan tabel tersebut produksi kopi rata-rata produksi kopi selama lima tahun berkisar 30.876,8 *pikul* pertahun. Rata-rata tersebut lebih tinggi daripada rata-rata produksi kopi dari tahun 1844-1850. Mengenai jumlah tenaga kerja lebih rendah daripada tahun 1846, tetapi dengan tidak adanya laporan mengenai epidemi dan dapat dikatakan bahwa kondisi pekerja dalam budidaya kopi telah lebih stabil. Produksi kopi tertinggi terjadi pada tahun 1855 dan terendah terjadi pada 1857. Rata-rata produksi kopi pertahun per keluarga sebesar 4 *pikul*, sedangkan dalam 1 *pikul* kopi rata-rata dihasilkan dari 126 pohon pertahun. Jumlah rata-rata per tahun jumlah pohon yang dirawat oleh para tenaga kerja sendiri berjumlah 507 pohon per keluarga.¹³⁸

Tabel 3.10
Produksi Kopi di Keresidenan Tegal Tahun 1854-1858

Tahun	Jumlah Pohon	Produksi Kopi	Jumlah tenaga kerja	Jumlah pohon untuk satu <i>pikul</i>	Jumlah pohon untuk satu keluarga
1854	5.183.278	30.327,81	7.326	170	707
1855	4.046.443	39.219,67	7.649	103	529
1856	3.326.974	31.211,38	7.727	106	430
1857	3.497.752	23.654,86	7.813	147	448
1858	3.432.715	29.970,40	8.172	114	420

Sumber: P.J. Veth, *Aardrijkskundig En Statistisch Woordenboek Van Netherland Indie II*, (Amsterdam: P.N. Van Kampen. 1869), hlm. 230-240.

¹³⁷ “Berekening Van Hetgeen Elk Koffijplantend Huisgezin En Elk Lid Daarvan In Geld Is Aangekomen Uit Den *Zeer Ongunstigen Oogst Van 1853*; Elk Huisgezin Drie Leden; Elk Lid Zestig Werkdagen”, dalam *Bijlage Van Het Algemeen Verslag Der Uitkomsten Van Het Onderzoek Betreffende De Koffijcultuur Op Java*.

¹³⁸ P.J. Veth, *Aardrijkskundig En Statistisch Woordenboek Van Netherland Indie II* (Amsterdam: P.N. Van Kampen. 1869), hlm. 186.

Pada tahun 1860 harga untuk kopi dibedakan berdasarkan kualitasnya. Harga untuk kualitas pertama dibeli dengan harga 10,5 gulden per *pikul*, kualitas kedua 7,5 gulden per *pikul*, dan kualitas ketiga 5 gulden per *pikul*. Produksi kopi pada tahun tersebut berjumlah 34.802,53 *pikul*, yang dibeli pemerintah dengan total pembayaran sebesar 364.067,26 gulden.¹³⁹ Harga kopi ini meningkat pada tahun 1862 dengan kopi kualitas pertama menjadi 11,5 gulden per *pikul*, kualitas kedua 8 gulden per *pikul*, dan ketiga 5,75 per *pikul*. Kendati harga ini naik tetapi produksi menurun sehingga pembayaran total untuk produksi berjumlah 318.863,62.¹⁴⁰ Mengenai produksi kopi pada tahun tersebut dan berikutnya dapat ditemukan dalam tabel 3.12.

Rata-rata produksi pertahun pada tahun 1862-1868 sebesar 41.653,06 *pikul*. Produksi kopi terendah terjadi pada tahun 1864 yang disebabkan karena sejak awal tahun tersebut tidak adanya perawatan yang baik pada pohon kopi, sehingga panennya sangat kecil.¹⁴¹ Perihal jumlah produksi tertinggi terjadi pada tahun 1866 dengan jumlah sekitar 167.6 persen dari pada rata-rata produksi pertahun.

Tabel 3.11
Produksi Kopi di Keresidenan Tegal Tahun 1862-1868

Tahun	Pohon Kopi		Produks Kopi (<i>pikul</i>)
	Pohon Produktif (pohon)	Pohon muda (pohon)	
1862	5.104.525	1.796.650	27.770,07
1863	5.497.232	1.468.150	55.008,09
1864	5.542.728	1.284.123	14.455,37
1865	5.748.083	1.122.693	55.545,60
1866	5.730.739	1.227.078	69.806,62
1867	5.786.593	1.313.798	45.865,40
1868	5.649.776	1.628.628	23.120,32

Sumber: "Residentie Tegal Kultuur Verslag 1868", Arsip Residensi Tegal No. 18.5, ANRI.

¹³⁹ *Koloniaal Verslag* 1860

¹⁴⁰ *Koloniaal Verslag* 1862

¹⁴¹ *Koloniaal Verslag* 1864

Pada tahun 1868 produksi turun kembali setelah produksi tiga tahun sebelumnya terbilang tinggi. Turunya produksi ini disebabkan tingginya curah hujan sejak tahun 1867 hingga tahun tersebut sehingga menyebabkan kebanyakan buah kopi busuk.¹⁴² Tiap satu *pikul* kopi dihasilkan dari jumlah pohon yang berbeda untuk tiap distrik, Pada Distrik Mandiraja diperlukan 1.145 pohon, Distrik Bongas 173 pohon, Distrik Gantungan 107 pohon, Distrik Bumiayu 320 pohon, Distrik Lebaksiu 169 pohon, dan Distrik Salem 1.716 pohon.¹⁴³ Semakin besar jumlah pohon yang dibutuhkan untuk produksi satu *pikul* kopi menunjukkan distrik yang paling rendah dalam tingkat produksinya pada tahun tersebut.

3.2.3 Tanaman Perkebunan Lainnya

Tanaman perkebunan lainnya yang dibudidayakan di Keresidenan Tegal selain tebu dan kopi adalah indigo. Indigo dibudidayakan dalam skala kecil di Distrik Losari, Distrik Salem, dan Distrik Brebes pada Kabupaten Brebes. Distrik Krandon, Distrik Maribaija, Distrik Balamoa, Distrik Gantungan, dan Distrik Kalisoka pada Kabupaten Tegal. Distrik Pemalang, Distrik Bongas, dan Distrik Mandiraja pada Kabupaten Pemalang.¹⁴⁴ Guna mengeloh hasil panen indigo didirikan pabrik pengelolaan hasil panen indigo yang beroperasi di daerah tersebut. Jumlah produksi indigo di Keresidenan Tegal dapat dilihat pada tabel 3.12.

Jumlah produksi rata-rata pertahun sebesar 12.670,8 *pikul* dengan jumlah produksi indigo terbesar terjadi pada tahun 1833 dan 1836. Rata-rata luas penanaman pertahun sebesar 1.081,78 *bahu* dengan luas penanaman paling besar pada tahun 1835. Terkait jumlah produksi yang tinggi tahun 1833 sedangkan luas penanaman justru paling rendah pada tahun tersebut sangat meragukan, karena dalam laporan yang tertulis banyak pabrik yang tidak menyantumkan luas

¹⁴² “Residentie Tegal Kultuur Verslag 1868”, *op.cit.*

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ “Statistiek der Residentie Tegal 1836”, *op.cit.*

penanaman yang dilakukan. Pada tahun 1836 jumlah pabrik indigo yang berdiri sebanyak 67 pabrik yang ditompang oleh tenaga kerja sebanyak 7.602 keluarga.¹⁴⁵

Tabel 3.12
Produksi Indigo di Keresidenan Tegal Tahun 1832-1836

Tahun	Luas penanaman (<i>bahu</i>)	Produksi Indigo (<i>pond</i>)
1832	1.056	1.977
1833	753,5	17.609
1834	1.063,7	8.932
1835	1.323,1	15.443
1836	1.212,6	19.393

Sumber: “Statistiek der Residentie Tegal 1836”, Arsip Residensi Tegal No. 133, ANRI

Budidaya teh berkembang lebih lambat dari pada indigo. Pada tahun-tahun awal penerapan tanam paksa tanaman ini baru ditanam sehingga memerlukan waktu untuk menjadi produktif. Penanaman teh dilakukan di Distrik Lebaksiu, Gantungan, dan Mandiraja. Jumlah pohon teh yang terdapat hingga tahun 1836 sebanyak 28.800 pohon di Distrik Lebaksiu Kabupaten Brebes, 44.230 pohon di Distrik Gantungan Kabupaten Tegal, dan 15.065 di Distrik Mandiraja Kabupaten Pemalang. Jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk merawat tanaman ini berjumlah 288 keluarga.¹⁴⁶

Produksi tanaman Indigo dan teh terdapat pada tabel 3.14. Berdasarkan tabel tersebut luas penanaman indigo dan produksinya berfluktuasi, berlainan dengan luas penanaman dan produksi teh yang menunjukkan perkembangan. Tanaman indigo dan teh tidak menunjukkan perkembangan yang besar sehingga tidak sepenting kopi atau gula. Berdasarkan keputusan tanggal 7 Pebruari 1842 indigo hanya diproduksi secara terbatas, sehingga sejak tahun tersebut produksi ini hanya dibatasi 10.000-12.000 *pikul* pertahun.¹⁴⁷

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Alamsyah, “Perkembangan Perkebunan Dan Pelabuhan Di Karesidenan Tegal (1830-1870)”, *Tesis* pada Program Magister Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2004, hlm.119.

Tabel 3.13
Produksi Indigo dan Teh di Keresidenan Tegal 1837-1841

Tahun	Indigo		Teh	
	Produksi (<i>pond</i>)	Luas penanaman (<i>bahu</i>)	Produksi (<i>pond</i>)	Luas Penanaman (<i>bahu</i>)
1837	23.354	1.374,5	566	8.5
1838	19.492	1.083,5	7.740,5	8.5
1839	42.370	1.431 ,5	13.749	127
1840	37.662	1.258	25.895	187
1841	26.399	1.343	40.860	187

Sumber: “Statistiek Opgaven der Residentie Tegal van en met 1836 tot en met 1841”, Arsip Residensi Tegal No. 210/1.ANRI.

Pada tahun 1845 produksi teh sebesar 61.479 *pond* yang menunjukkan perkembangan lebih tinggi daripada tahun 1841. Pada tahun tersebut total pohon teh sebesar 1.037.610 pohon, dengan setiap *pond* produksi teh dihasilkan dari 12 pohon. Produksi teh ini dikontrak oleh Mr. C.F Goldman. Berdasarkan laporan pemerintah tahun tersebut tanaman tembakau juga mulai dirintis, dengan mendatangkan beberapa ahli dari Belanda namun kondisi cuaca yang tidak memungkinkan akhirnya penanaman tahun tersebut ditunda.¹⁴⁸ Pada tahun 1870 terdapat beberapa perkebunan tembakau yang berada di Distrik Maribaija, Gantungan, Bumiayu, Lebaksiu, Pemalang, Mandiraja, dan Bongas.¹⁴⁹

¹⁴⁸ “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”, *op.cit.*

¹⁴⁹ Alamsyah, *op.cit.*, hlm. 121.

3.3 Dampak Penyelenggaraan Tanam Paksa

3.3.1 Munculnya Sistem Tenaga Kerja Upah

Penerapan tanam paksa membuat perkebunan dan pabrik pengelolaanya berkembang pesat di Keresidenan Tegal. Tentu saja dalam hal ini tenaga kerja memegang peran vital dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Tenaga kerja ini dengan cepat meningkat dalam sektor perkebunan, pengangkutan, dan pabrik. Tenaga kerja diorganisasi dengan sistem tradisional yang memanfaatkan pajak kerja dari sistem penguasaan tanah. Perbedaannya telah disinggung sebelumnya bahwa dalam melaksanakan tugasnya mereka mendapatkan upah dalam bentuk uang. Kendati pembayaran upah jangan dinilai berlebih karena besarnya tidak cukup untuk digunakan bertahan hidup.¹⁵⁰

Produksi gula membutuhkan kayu bakar untuk memproses air nira tebu untuk menjadi gula. Pada tahun 1836 pembebasan pajak tanah yang diterima oleh para petani yang menjadi bagian dari tenaga kerja penanaman di Pabrik Pangka dan Comal, harus menyediakan kayu bakar dengan harga 2 gulden per *vadem*¹⁵¹ yang akan dibeli oleh pabrik. Jumlah ini terbilang kecil karena tempa-tempat penebangan kayu sangat jauh sehingga tidak menguntungkan sama sekali bagi pekerja. Selanjutnya untuk tenaga kerja pengangkut hasil panen tebu dari sawah menuju pabrik dibayar dengan upah 50 sen per *pikul*.¹⁵²

Berdasarkan kontrak pengelola Pabrik Pangka dengan para pekerja pribumi dengan jangka waktu dari tahun pada tahun 1838 tercatat bahwa terdapat upah yang diterima untuk pembersihan satu acre lahan sejumlah delapan gulden, untuk pembajakan satu acre lahan sejumlah delapan gulden, dan untuk perawatan tebu yang diberikan pada bulan Februari sejumlah sebelas gulden.¹⁵³ Tenaga kerja

¹⁵⁰ Robert Van Niel, *op.cit.*, hlm. 272-273.

¹⁵¹ 1 *Vadem* = 1,69 Meter.

¹⁵² *TNI, eerste deel*, (Zalt-Bommel, 1866). hlm. 133-134.

¹⁵³ *Suiker Contract, Onder De Nadere Goedkeuring Van Zijne Excellentie Den Gouverneur Generaal, Aangegaan Tusschen Den Directeur Der Kultures, Voor En Van Wege Het Gouvernement Van Nederlandsch Indië, Ter Eene, En De Heeren B. F. W.*

upah juga muncul untuk kegiatan pengangkut panen tebu. Hal ini dapat dilihat pada para pekerja pengangkut panen tebu dari lahan ke Pabrik Dukuhwringin pada tahun 1848 tercatat terdapat enam puluh orang pribumi dengan upah yang bervariasi.¹⁵⁴ Lebih lanjut lagi kontrak antara Mr. Lucassen sebagai kontraktor Pabrik Dukuhwringin dan Pabrik Kemanglen dengan para pemilik kerbau yang menyewakannya untuk digunakan sebagai penarik pedati mendapat upah 60 ripsis per kerbau pada tahun 1858.¹⁵⁵

Perkembangan perekonomian akibat tanam paksa di Keresidenan ini juga meningkatkan pembagunan sarana infrastuktur yang digunakan untuk menunjang kelancaran produksi komoditas perkebunan yang tentunya melibatkan tenaga kerja upahan. Pada tahun 1845 dimulai proyek pembangunan Bendungan Djangkelok yang mengalokasikan dana sebesar 4000 gulden, setahun setelahnya dimulai proyek pembangunan irigasi di Smaja yang mengalokasikan dana sebesar 2.753 gulden, pada tahun 1849 dimulai proyek pembangunan dam di Laijangan yang mengalokasikan dana sebesar 3.110 gulden¹⁵⁶, dan Pada tahun 1862 pembagunan saluran irigasi pertanian di Distrik Losari dengan memanfaatkan Sungai Pamali. Munculnya proyek-proyek pembangunan ini dinilai menjadi cukup menguntungkan bagi mereka yang terlibat sebagai tenaga kerja kasar karena mereka mendapat pemasukan tambahan selain dari pertanian mereka selain itu hal ini pada kondisi tertentu juga menjadi suatu keuntungan ditengah-tengah keadaan paceklik seperti yang terjadi pada tahun 1862 saat gagal panen yang melanda beberapa wilayah di Keresidenan Tegal.¹⁵⁷

Fischer En Ii. Van Den Bosch, Wonende Te Tegal, Van Beroep Suikerfabrikanten Ter Andere Zijde.

¹⁵⁴ “Stukken den suiker onderneming te Kemalangen, Dukuhwringin, Adiwerna”, Arsip Residensi Tegal No. 161.1. ANRI

¹⁵⁵ “Kontrakten met indlandsche bevoking”, Arsip Residensi Tegal No. 161.2. ANRI

¹⁵⁶ *Kolonial Verslag 1849*

¹⁵⁷ *Kolonial Verslag 1862*

Sejak tahun 1865 seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa penggunaan tenaga kerja wajib untuk penanaman tebu secara resmi diberhentikan dengan tidak dipakainya lagi tenaga kerja ini dalam kegiatan produksi pabrik gula di Keresidenan Tegal, demikian tenaga kerja bebas yang berdasarkan kontrak perorang menjadi satu-satunya tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan produksi gula pada saat itu.¹⁵⁸ Jumlah tenaga kerja yang per pabrik pada tahun 1868 total jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas pabrik sebanyak 19.517 keluarga.¹⁵⁹ Pada tahun 1868 tercatat untuk upah penanaman tebu para kuli dibayar dengan upah 20-25 sen perorang perhari dengan tambahan uang makan 25-40 sen perorang perhari. Perihal untuk pemotongan panen tebu para kuli di beri upah 1 sen per ikat (berisi 25 batang tebu) atau jika dibayar dengan sistem harian diberi upah sebesar 40-50 sen per hari.¹⁶⁰

Berkembangnya tenaga kerja bebas ini meletakan petani dalam sistem kapitalisme yang menekankan penggunaan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka yang bekerja sebagai tenaga kerja perkebunan adalah mereka yang terikat dengan kewajiban atas tanah yang dikuasai atau mereka tidak memiliki tanah sehingga secara ekonomi bergantung pada para pemilik tanah dan bekerja untuk menggantikan posisi tuannya, tetapi dalam perkembangannya setelah secara resmi tenaga kerja wajib ini tidak digunakan setelah tahun 1865 sistem tenaga kerja bebas menjadi satu-satunya sistem yang digunakan. Pada gilirannya meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya pembagian atas tanah pada daerah penanaman pemerintah, membuat uang yang diperoleh dari upah makin lama makin perlu dan penting bagi kelangsungan hidup kaum tani, karena tanah telah sedekian sempit.¹⁶¹ Dengan demikian posisi para petani sebagai tenaga kerja pabrik telah menjadi bagian komoditas penting yang memiliki nilai jual yang

¹⁵⁸ R.E. Elson, *loc.cit.*

¹⁵⁹ "Residentie Tegal Kultuur Verslag 1868", *op.cit.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Robert Van Niel, *loc.cit.*

dibutuhkan dalam kegiatan produksi komoditas perkebunan. Sekaligus bagi petani perkerjaan ini juga sama artinya guna memenuhi kebutuhan hidupnya atau paling tidak sebagai pemasukan tambahan.

3.3.2. Pertambahan Jumlah Penduduk.

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa jumlah penduduk sebelum sistem tanam paksa diterapkan terkesan lambat bahkan pada tahun 1830 tidak melebihi jumlah pada tahun 1815. Penerapan tanam paksa ternyata membawa dampak pada pertambahan jumlah penduduk di Keresidenan Tegal yang terbilang cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada grafik di bawah jika dihitung dari tahun 1830 hingga tahun 1871 maka terdapat kenaikan penduduk sebesar 481.5% atau hampir menyentuh angka lima kali lipat, jumlah ini lebih besar jika dibandingkan kenaikan jumlah penduduk di Pekalongan atau Jawa secara keseluruhan yang hanya kisaran dua kali lipat dengan mengambil pada kurun waktu yang sama.¹⁶²

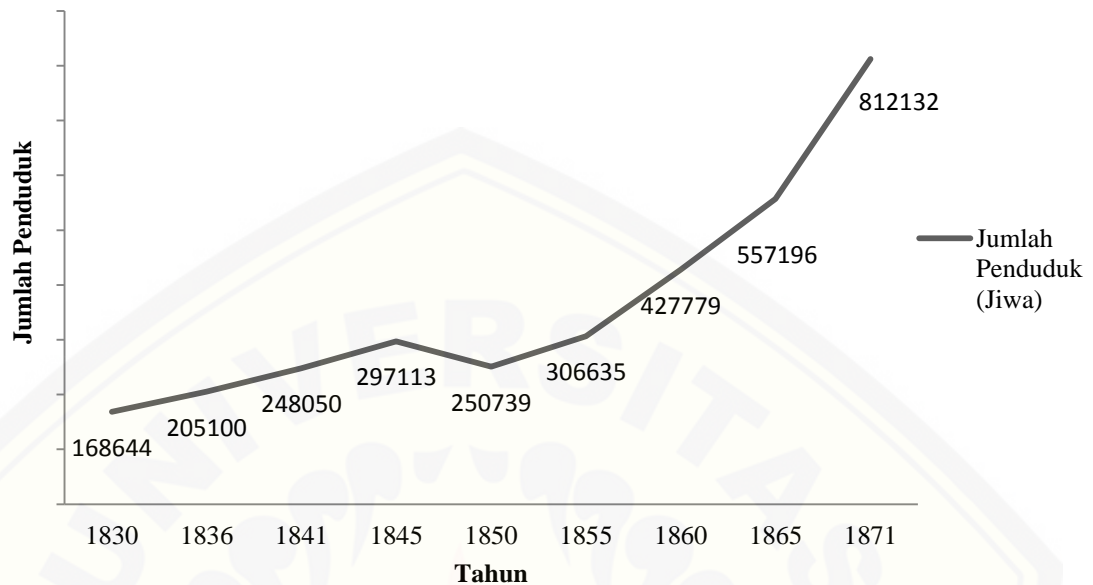
Pada tahun 1850 jumlah penduduk di Keresidenan Tegal sempat mengalami penurunan yang cukup tajam. Penurunan ini sebenarnya telah terjadi sejak tahun 1847 yang disebabkan oleh munculnya epidemi pada berbagai wilayah di Keresidenan Tegal yang berlangsung hingga tahun 1850 yang membuat tingginya angka kematian dan migrasi. Selisih jumlah penduduk tahun 1847 dan 1850 sebesar 98.996 jiwa dengan rata-rata penurunan sebesar 33.000 jiwa pertahun.¹⁶³ Penurunan jumlah penduduk pada tahun-tahun tersebut selain disebabkan oleh epidemi juga diperparah oleh kelaparan di berbagai wilayah di Jawa, tercatat tingkat kematian yang terjadi di keresidenan ini mencapai angka 18.000 jiwa akibat hal tersebut.¹⁶⁴

¹⁶² “Bevolking van Java en Madura” dalam *TNI, Eerste Deel* (Batavia : Ter Lands- Drukkerij, 1839), hlm. 162., JC. Breman, *Djawa Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Demografis* (Jakarta: Bhatara, 1971), hlm. 34., dan *Koloniaal Verslag 1871*

¹⁶³ “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1850”, *op.cit.*

¹⁶⁴ JC. Breman, *op.cit.*, hlm.43.

Grafik 3.1.
Kenaikan Jumlah Penduduk Di Keresidenan Tegal



Sumber: “Bevolking van Java en Madura” dalam *TNI, Eerste Deel*, (Batavia : Ter Lands- Drukkerij, 1839), hlm. 162., “Statistiek der Residentie Tegal 1836”, Arsip Residensi Tegal No. 133, ANRI, “Statistiek Opgaven der Residentie Tegal van en met 1836 tot en meet 1841”, Arsip Residensi Tegal No. 210/1.ANRI, “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”, Arsip Residensi Tegal No. 12.8, ANRI, “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1850”, Arsip Residensi Tegal No. 13.1, ANRI, “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1855”, Arsip Residensi Tegal No. 14.2, ANRI, *Koloniaal Verslag 1860, Koloniaal Verslag 1865, dan Koloniaal Verslag 1871*.

Kondisi ini segera membaik setelah tahun 1850 karena jumlah penduduk telah naik lagi sejak tahun 1852 yang disebabkan oleh perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1855 dengan vaksinasi yang dilakukan pada semua distrik di Keresidenan Tegal. Vaksinasi ini dilakukan dua kali dalam setahun untuk menangani epidemi yang berlangsung sebelumnya.¹⁶⁵ Meskipun demikian vaksinasi sebenarnya tidak menjamin epidemi ini segera hilang karena pada beberapa tahun sebelum tahun tersebut telah dilakukan vaksinasi tetapi tetap saja epidemi ini dapat menyerang.¹⁶⁶ Setelah

¹⁶⁵ “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1855”, Arsip Residensi Tegal No. 14.2, ANRI

¹⁶⁶ “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”, *op.cit.*

masa-masa sulit tersebut secara konsisten jumlah penduduk di Keresidenan Tegal mengalami kenaikan. Secara umum kenaikan jumlah penduduk di Jawa di sebabkan oleh masa tenang tanpa perang, pencatatan yang lebih baik, dan diversifikasi penanaman oleh petani.¹⁶⁷

Menurut Ben White selain faktor di atas penambahan penduduk yang tinggi ini adalah respon petani untuk memenuhi tuntutan tenaga kerja supaya kegiatan produksi tanaman subsisten tetap terjaga ditengah tuntutan berbagai kerja wajib. Intinya adalah bahwa untuk setiap generasi orang tua berturut-turut dalam periode ini, memandang memiliki anak menawarkan keuntungan ekonomi, dalam bentuk terpeliharanya standar kehidupan dengan waktu luang yang semula akan menurun.¹⁶⁸ Hal ini dapat dilihat pada komposisi penduduk pada tahun 1836 dan 1855 yang menunjukkan bahwa jumlah anak lebih tinggi dari jumlah penduduk di kategori lainnya.

Pada tabel 3.15 dapat dilihat bahwa pada daerah-daerah penanaman tebu pada tahun 1836 di Distrik Pangka, Distrik Comal Lor, dan Comal Kidul komposisi penduduk kategori anak jauh lebih tinggi daripada kategori lainnya. Pada distrik penanaman kopi hanya Distrik Losari yang memiliki jumlah penduduk kategori anak di bawah kategori wanita tetapi lebih banyak dibandingkan kategori pria. Pada tahun 1855 seluruh distrik yang menjadi tempat penanaman tebu memiliki jumlah penduduk dengan kategori anak yang lebih banyak daripada kategori lainnya. Pada daerah penanaman kopi hanya Distrik Bongas yang memiliki jumlah penduduk kategori anak di bawah kategori wanita tetapi lebih banyak dibandingkan kategori pria. Para petani juga memandang dengan menambah jumlah anak, mereka memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan tingkat konsumsi anak itu sendiri karena sesegera mungkin dapat mengurangi masa sibuk mereka dalam memenuhi tuntutan tenaga kerja. Menurut Ben White Menurut Ben White variable naiknya jumlah penduduk ini dapat

¹⁶⁷ JC. Breman, *op.cit.*, hlm. 39.

¹⁶⁸ Ben White, "Demand for Labour and Population Growth in Colonial Java" dalam *Human Ecology*, Vol. 1, No. 3, 1973, hlm. 231.

dilihat berdasarkan tersedianya tanah untuk kaum tani, perkembangan industri kerajinan yang terhambat, dan tenaga kerja wanita.¹⁶⁹

Tabel 3.14
Komposisi Penduduk Di Keresidenan Tegal 1836 dan 1855

Distrik ¹⁷⁰	1836			1855		
	Pria (Jiwa)	Wanita (Jiwa)	Anak (Jiwa)	Pria (Jiwa)	Wanita (Jiwa)	Anak (Jiwa)
Brebes	4.736	5.608	8.585	9.143	9.640	12.859
Losari ^(K)	2.390	2.892	2.601	6.795	7.687	7.990
Bumiayu	2.795	3.163	3.303	6.316	6.712	7.451
Lebaksiu ^(K)	2.537	2.770	3.862	4.340	4.751	5.706
Salem ^(K)	1.819	1.962	1.981	2.974	3.359	4.217
Tegal	4.838	4.540	5.020	5.781	6.963	7.910
Krandon ^(T)	6.045	7.135	6.797	4.523	5.050	6.259
Maribaija	3.080	3.120	3.015	3.698	3.800	6.168
Kalisokka	3.835	4.865	6.885	-	-	-
Balamoa	4.149	4.651	5.483	-	-	-
Dukuhwringin ^(T)	-	-	-	13.705	16.573	21.143
Pangka ^(T)	6.004	6.340	7.603	6.912	7.597	8.353
Gantungan ^(K)	2.052	2.434	2.688	2.131	2.353	2.532
Pemalang	4.251	5.335	8.061	5.969	6.788	12.147
Comal Lor ^(T)	2.657	2.769	4.775	3.409	4.228	5.489
Comal Kidul ^(T)	1.379	1.542	2.317	3.028	3.444	5.057
Mandiraja ^(K)	2.918	3.336	4.601	2.809	2.857	3.444
Bongas	2.095	2.210	2.436	2.732	3.024	2.711
Total	56.810	64.672	80.053	84.263	94.856	122.436

Sumber: “Statistiek der Residentie Tegal 1836”, Arsip Residensi Tegal No. 133, ANRI, dan “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1855”, Arsip Residensi Tegal No. 14.2, ANRI

Tersedianya tanah untuk kaum tani sangat penting karena dengan demikian mereka masih memiliki sumberdaya untuk melakukan produksi tanaman pertanian yang mendukung kehidupan subsistensi. Komunalisasi tanah yang menguat bahkan pada tingkat lintas lingkungan desa di Keresidenan Tegal telah membuat para keluarga tani mendapatkan bagian tanah yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan hidupnya yang tidak dapat digantungkan sepenuhnya dari upah perkebunan atau pabrik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya

¹⁶⁹ Ben White, hlm. 217-236.

¹⁷⁰ (K): Tempat Penanaman Kopi, (T): Tempat Penanaman Tebu

meskipun pada beberapa wilayah jumlah tanah komunal yang dibagikan ini sangat sempit, tapi ini selaras dengan distribusi beban kerja wajib dapat pada para janggol yang baru. Komunalisasi ini tanah juga memperluas sektor pertanian pada para petani.¹⁷¹ Hal ini mendorong para petani untuk mengintensifkan pertanian tanaman pangan dengan bantuan perkembangan sarana pertanian seperti irigasi yang semakin baik akibat tanaman tebu. Selain itu pada laporan pemerintah muncul juga diversifikasi tanaman lainnya seperti jagung, ketela dan kacang-kacangan yang ditanam oleh petani sebagai alternatif di waktu kekeringan yang mengagalkan panen padi.¹⁷²

Industi kerajinan yang membutuhkan tenaga kerja ahli yang membutuhkan waktu lebih lama dalam pembentukannya daripada tenaga kerja kuli untuk perkebunan atau pabrik. Daripada menciptakan tenaga kerja ahli yang tidak menawarkan keuntungan dalam waktu dekat, para petani lebih baik menjadi kuli pada perkebunan atau pabrik karena lebih menawarkan keuntungan pendukung perekonomian keluarga dengan upah yang diterimanya. Upah yang ini berguna sebagai pendapatan tambahan pada keluarga tani.¹⁷³ Hal ini dapat dilihat pada tahun 1836 dengan jumlah penduduk yang terlibat dalam industri kerajinan seperti gerabah, kayu, dan lukisan yang hanya 199 jiwa, lalu pada tahun 1841 tercatat 2.396 jiwa bekerja sebagai penenun katun.¹⁷⁴ Jumlah ini tentu lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terlibat dalam perkebunan pemerintah.

Terakhir adalah tenaga kerja wanita yang menjadi penting hadirnya karena pada dasarnya ketika kaum lelaki menjadi tenaga kerja wajib pada saat yang sama untuk urusan subsisten mereka yang menggantikannya, sehingga perawatan kedua

¹⁷¹ Peter Boomgaard, *op.cit.*, hlm. 147-169.

¹⁷² “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1850”, *op.cit.*, , “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1855”, *op.cit.*, dan “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1858”, *op.cit.*

¹⁷³ Ben White, *op.cit.*, hlm. 229.

¹⁷⁴ “Statistiek der Residentie Tegal 1836”, dan “Statistiek Opgaven der Residentie Tegal van en met 1836 tot en met 1841”, *op.cit.*

tanaman tersebut tetap terpelihara dengan baik dan kuantitas produksinya meningkat.¹⁷⁵ Selain itu pada perkebunan kopi tenaga kerja wanita juga digunakan sebagai tenaga kerja pengganti dalam penanaman, pencucian buah kopi, pengupasan kulit, pengeringan dan pembersihan. Padatnya pekerjaan ini membuat para wanita berhenti menyusui anak mereka yang membuat tingkat kelahiran semakin tinggi.¹⁷⁶

3.3.3 Keuntungan Pemerintah

Pada saat tanam paksa diterapkan para pejabat pemerintah kolonia mendapatkan keuntungan tersendiri yaitu penghasilan tambahan yang senilai dengan produksi komoditas perkebunan yang diserahkan pada gudang-gudang pemerintah, yang kadang-kadang jumlahnya ini justru melebihi gaji yang diperoleh jabatannya. Keuntungan ini sering disebut dengan istilah *cultuur procenten*. *Cultuur procenten* ini membawa dampak yang kurang baik bagi pejabat pemerintah kolonial karena perbedaan pendapatan yang diperoleh akibat dari kondisi wilayah yang kurang cocok dengan tanaman perkebunan, sehingga muncul permintaan untuk dipindahkan.¹⁷⁷ Salah satu contoh besarnya *cultuur procenten* di Keresidenan Tegal dapat dilihat pada tahun 1836 sesuai dengan tabel dibawah.

Berdasarkan data di atas jumlah *cultuur procenten* yang diterima baik dari pejabat Eropa maupun pribumi jika diurutkan dari yang terbesar dari total *cultuur procenten* kopi menjadi yang terbesar dengan 6.834,11 gulden, Indigo menjadi yang kedua dengan 4.849 gulden, dan gula yang terakhir dengan 3004.5 gulden. Jika dihitung dari jabatannya maka *cultuur procenten* yang diperoleh untuk residen sebesar 2.083,67 gulden, bupati sebesar 3.035,5 gulden, kontrolir sebesar 2.207,45 gulden, wedana sebesar 2.259,66 gulden, dan kepala desa sebesar 5.102,33 gulden.

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ Latifatul Izzah, *loc.cit.*

¹⁷⁷ Zulkarnain “ Kesengsaraan Masyarakat Jawa Masa Kolonial”, dalam *Istoria*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 36-37

Tabel 3.15
Cultuur Procenten di Keresidenan Tegal Tahun 1836

Jabatan	Kopi		Gula		Indigo	
	Presentase dalam pond per pikul	Jumlah Uang (Gulden)	Presentase dalam pond per pikul	Jumlah Uang	Presentase dalam pond per pikul	Jumlah Uang (Gulden)
Residen	0.5%	705,93	10 %	600,90	4%	775,84
Bupati	0.5%	882,92	10 %	600,90	8%	1551,68
Kontrolir	0.5%	830,71	10 %	600,90	4%	775,84
Wedana	0.5%	882,92	10 %	600,90	4%	775,84
Kepala desa	2%	3.531,63	10 %	600,90	5%	969,80

Sumber: “Statistiek der Residentie Tegal 1836”, Arsip Residensi Tegal No. 133, ANRI

Nilai *cultuur procenten* di atas telah sedemikian besar bahkan jika dibandingkan dengan gaji residen pada tahun 1841 nilai *cultuur procenten* yang diterima saat itu mendapatkan selisih sebesar 833,67 gulden lebih besar. Hal ini juga berlaku untuk para bupati jika nilai *cultuur procenten* di atas dibagikan pada para bupati maka para bupati mendapatkan 10.011,83 gulden. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan gaji para bupati di tahun 1841 jauh melebihi gaji Bupati Brebes dan Pemalang yang hanya 700 gulden dan 800 gulden.¹⁷⁸ Selanjutnya nilai *cultuur procenten* mungkin jauh lebih besar pada tahun 1841 dan seterusnya karena pada tahun tersebut produksi dari masing-masing komoditas mengalami kenaikan.

Nilai yang besar dari *cultuur procenten* turut mendorong para pejabat pribumi untuk melewati batas teoritis dalam penggunaan tanah dan tenaga kerja untuk mendapatkan produksi yang lebih besar. Kondisi ini membuat para pejabat pribumi hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah kolonial sehingga jaraknya dengan petani semakin jauh, maka hal yang biasa jika terjadi

¹⁷⁸ “Statistiek Opgaven der Residentie Tegal van en met 1836 tot en meet 1841”, *op.cit.*

penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷⁹ Banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di Tegal, Chirebon, dan Pekalongan ketika para bupati menggunakan wewenangnya untuk mengambil keuntungan dari sistem tanam paksa, seperti menyuruh semua petani untuk menanam nila di sawah mereka, memasukan seluruh desa yang ditugaskan menanam tanaman komoditas perkebunan tetapi mengecualikan yang paling subur untuk dirinya sendiri, memaksakan desa agar menyediakan tenaga kerja yang lebih banyak dari seharusnya dan menghukum dengan kekerasan jika hal ini tidak dilakukan.¹⁸⁰

Posisi para bupati turut diperkuat kembali pada masa tanam paksa sebab berhubungan dengan pengerahan tenaga kerja pedesaan. Penguatan ini berbentuk pemberian kembali hak pewarisan jabatan berdasarkan keturunan dan pemulihan tanah jabatan.¹⁸¹ Pemusatan penguasaan tanah juga kerap terjadi pada para bupati ini. Berbeda dengan beberapa daerah lainnya, bupati Tegal memiliki peran ganda sebagai penguasa sekaligus pengusaha. Bupati Tegal memiliki 8.179 hektar tanah dan kurang dari separuhnya tanah ini tidak digarap sedangkan Bupati Brebes tercatat memiliki 2.400 hektar tanah yang dapat diwariskan yang sebagian ditanami tebu dengan hasil keuntungan 38.000 gulden pada 1856.¹⁸² Keuntungan ini belum ditambah dengan hak mereka dalam memperoleh berbagai pelayanan dari masyarakat secara cuma-cuma, tentu hal membuat mereka menjadi golongan yang paling berpengaruh sebagai pejabat pribumi sekaligus eksploitatif dalam pengerahan tenaga kerja.

Hal ini dapat dilihat pada tindakan para pejabat elite di tahun 1861 ketika terjadi demonstrasi pada residen oleh penduduk desa Kabupaten Tegal bagian utara dan Desa Ujungrusi dengan jumlah 600 orang. Hal ini dilakukan dilatar

¹⁷⁹ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 41.

¹⁸⁰ Chr. LM. Penders, *Indonesia: Selected Documents on Colonialism and Nationalism 1830-1942* (St. Lucia: University of Queensland Press, 1977), hlm. 27.

¹⁸¹ Heather Sutherland, *loc. cit.*

¹⁸² Anton Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah Revolusi dalam Revolusi* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 12-13.

belakangi oleh peningkatan beban dan penanaman tebu mulai dari perbaikan bedeng pembibitan dan pendalam penggalian galur penanaman yang tidak diimbangi oleh peningkatan upah. Demonstrasi ini berhasil dilakukan tetapi tuntutan untuk kenaikan upah gagal dilakukan, residen kemudian memutuskan empat *bekel* yang menjadi pembicara dalam demonstrasi dihukum cambuk didepan umum.¹⁸³ Hal ini telah menunjukkan bahwa sikap residen dan para pejabat pribumi jelas lebih berpihak pada kelancaran atau bahkan peningkatan produksi karena terdapat kepentingan ekonomi didalamnya.

Selama penerapan tanam paksa ini di Keresidenan Tegal juga terjadi perkembangan birokrasi. Pada tahun 1861 Pemalang ditetapkan sebagai daerah yang di bawah kewenangan seorang asisten residen, pada tahun berikutnya tercatat bahwa W. K. F. Valk Palm yang menduduki jabatan tersebut.¹⁸⁴ Pada tahun 1866 Brebes juga di tetapkan sebagai daerah yang berada di bawah kewenangan seorang asisten residen, F. Beijerinck menjadi orang yang menduduki jabatan tersebut.¹⁸⁵ Keberadaan asisten residen di Pemalang dan Brebes menjadikan para bupati yang menjabat di kabupaten tersebut tidak lagi di bawah kewenangan residen, melainkan di bawah asisten residen di tempat tersebut karena jabatan ini memiliki kewenangan mengendalikan wilayah kekuasaannya sendiri.¹⁸⁶

Pada tahun 1866 Keresidenan Tegal terbagi menjadi empat *afdeeling* yaitu Tegal, Brebes, Pemalang, dan Bumiayu dan tiga kabupaten yang sama dengan tahun sebelumnya.¹⁸⁷ *Afdeeling* merupakan wilayah administrasi yang sejajar dengan

¹⁸³ “Hou De Resident van Tagal het Kultuurstelsel Op De Be Houdt” dalam *TNI tweede dee* (Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon , 1861), hlm.164-170.

¹⁸⁴ Alamsyah, *op. cit.*, hlm. 58, bandingkan dengan *Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie1862*. Alamsyah menyebutkan bahwa pada alamanak tahun 1862 jabatan ini tidak dibicarakan sama sekali tetapi penulis mendapati hal yang belainan pada sumber yang sama.

¹⁸⁵ *Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie1867*

¹⁸⁶ Vincent J. H. Houben, *Keraton dan Kompeni Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2002), hlm. 124.

¹⁸⁷ *Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie1866*

Kabupaten yang dikepalai oleh asisten residen atau kontrolir. Pada tahun 1868 *Afdeling* Bumiayu telah dihapus statusnya sehingga terbagi hanya menjadi tiga *afdeeling* yaitu Tegal, Brebes, dan Pemalang.

Pada tahun tersebut jabatan di pemerintahan telah jauh lebih banyak yang menandakan bahwa birokrasi telah jauh berkembang dari beberapa puluh tahun sebelumnya. Residen Tegal dijabat oleh W. A. Jellinghaus, Bupati Tegal diduduki oleh Raden Tumenggung Pandji Sosro Koesoemo, Sekretaris yang merangkap menjadi notaris dan pejabat pelelangan F. C. Geselschap, petugas pos F la Fontaine, Patih Mas Setja Dhi Kara, Jaksa Kepala Mas Tirta Wigoena, Pembantu Kepala Jaksa Raden Wirio Redjo, Kepala Penghulu Mas Mohammad Sanghit, Kapiten China Tan Kok Kim, Letnan China Lim Janghie, Kepala orang Melayu, Intje Oemar. Asisten Residen di Brebes dijabat oleh F. Beijerinck, Bupati Brebes diduduki oleh Raden Adipati Aria Penata joeda, Patih Raden Soera Atmajda, Jaksa Mas Soema di Rana, Penghulu Mohamad Taib, Letnan China The Kihok. Asisten Residen di Pemalang J. K. Hagen, Bupati Pemalang Raden Tumenggung Raksanegara, Patih Mas Sastra Dirjo, Jaksa Raden Ngabehi Soera di Poera, Penghulu Mas Abduekadir, dan Letnan China Tan Tjengmo.¹⁸⁸

3.3.4 Gerakan Perlawanan Petani

Tanam paksa memang telah mengakibatkan sektor pertanian lebih meluas, perekonomian keluarga petani termonetisasi, jumlah penduduk meningkat, dan keuntungan yang lebih untuk pejabat pribumi. Pada periode tersebut kemiskinan dan penderitaan tidak juga hilang dari kehidupan sebagian penduduk di Keresidenan Tegal. Hal ini menimbulkan perlawanan dari mereka pada orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai orang kaya baik itu pribumi atau China. Perlawanan ini diwujudkan dalam aksi-aksi perampokan, pembakaran, pencurian, bahkan pembunuhan.

Kebanyakan kasus-kasus yang muncul dalam laporan-laporan pemerintah adalah pencurian ternak dan perampokan harta, dengan demikian hal ini juga

¹⁸⁸ *Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1869*

menandakan bahwa motif ekonomi merupakan alasan utama dari tindakan ini. Pada tahun 1836 kasus ini terbilang sangat tinggi dengan jumlah 234 kasus¹⁸⁹, menurun pada tahun 1845 menjadi 41 kasus. Pada tahun 1845 ini terdapat beberapa kasus yang menarik yaitu kasus pencurian gula oleh orang-orang dari Doekoesalam dan Dukuhwringin yang merupakan bagian dari lingkungan Pabrik Dukuhwringin. Hal ini dapat dihubungkan dengan harga gula yang cukup tinggi jika dijual sehingga membuat aksi nekat ini dilakukan.¹⁹⁰

Pada tahun 1850 ketika terjadi kelaparan di keresidenan ini yang disebabkan karena cuaca yang ekstrem serta merebaknya wabah penyakit, ternyata kondisi ini diperburuk oleh penanaman tebu yang kerap kali mengambil hampir seluruh bagian sawah pada desa-desa yang ditanami tebu tersebut, sehingga tidak ada lagi sisa untuk penanaman padi. Terlebih lagi ternyata upah yang didapatkan dari menjadi buruh pada pabrik tidak dapat menunjang kebutuhan hidup mereka oleh sebab itu angka kematian pada tahun ini begitu besar.¹⁹¹ Selaras dengan kondisi buruk ini angka kriminalitas meningkat menjadi 140 kasus. Pada tahun 1855 jumlah kriminalitas kembali meningkat menjadi 144, dan pada tahun 1858 jumlah kriminalitas ini masih meningkat menjadi 153 kasus.¹⁹² Peningkatan kasus ini dapat dipahami sebagai bagian dari semakin besarnya rasa ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pemerintah.

Penanaman tebu pada masa tanam paksa juga membawa dampak yang buruk bagi petani karena telah mengganggu siklus tanam padi dan palawija. Hal buruk lainnya jarak yang harus ditempuh oleh petani kadang-kadang jauh, seperti yang terjadi pada tahun 1868, jarak rata-rata tempat petani ke setiap tempat

¹⁸⁹ “Statistiek der Residentie Tegal 1836”, *op.cit.*

¹⁹⁰ “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”, *op.cit.*

¹⁹¹ W. Bosch, *Ik Wil Barmhartigheid Enniet Offerande* (Arnhem: H.B. Breijer, 1865), hlm.19.

¹⁹² “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1850”, *op.cit.*, “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1855”, *op.cit.*, dan “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1858”, *op.cit.*

penanaman sebesar 3 *paal*, tetapi jika dilihat lebih detail maka terdapat juga jarak penanaman yang jauh misalnya jarak petani ke tempat penanaman di Pabrik Adiwerna sebesar 5,5 *paal*, perkiraan waktu tempuh untuk jarak tersebut diatas satu jam berjalan kaki.¹⁹³ Musim sibuk penanaman, penebangan, dan penggilingan tebu juga ternyata menyita banyak waktu yang membuat petani harus bekerja keras. Selain itu sawah bekas penanaman tebu telah diubah sedemikian rupa sehingga para petani perlu mengubah seperti semula pada waktu selesai musim tebang tebu, seperti mengembalikan batas-batas lahan atara penggarap tebu, meratakan galur-galur bekas penanaman, dan membersihkan sisa-sisa akar tebu. Tentu saja semua itu bukan hal yang mudah bagi petani. Hal ini belum lagi resiko gagal panen yang selalu mengancam petani akibat cuaca (seperti yang terjadi pada tahun 1850) dan berbagai serangan hama seperti, belalang hijau, *ama poetih*, ulat *komplong*, *lembing*, *bolokotondo*, *ama wos*.¹⁹⁴

Kerja wajib *heerendiensten* juga terbilang cukup berat, pada tahun 1863 total tenaga kerja wajib di Keresidenan Tegal yang dikerahkan berjumlah 45.272 kuli, jumlah ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan Keresidenan Kedu yang berjumlah 79.555 kuli, padahal wilayah Keresidenan Tegal lebih luas daripada Keresidenan Kedu. Hal ini dapat diartikan bahwa distribusi beban kerja di Keresidenan Tegal pada tiap kuli lebih berat baik dalam intensitas ataupun jarak.¹⁹⁵ Oleh karena itu tidak aneh jika terjadi banyak tindakan kriminalitas di daerah ini dalam bentuk perampokan dan pembakaran.¹⁹⁶

¹⁹³ “Residentie Tegal Kultuur Verslag 1868”, *op.cit.*

¹⁹⁴ K.F. Holle, *Bidjragen tot de kennis Der Ziekten En Plagen van Padi-Gewas* (Batavia: W. Ogilvie, 1863), hlm. 82-126.

¹⁹⁵ Djulianti Suroyo, *op.cit.*, hlm. 148-149.

¹⁹⁶ Kasus perampokan dan pembakaran sering kali muncul di daerah ini seperti tahun 1836 sebanyak 136 kali, 1845 sebanyak 4 kali, 1846 sebanyak 12 kali, dan 1850 sebanyak 53 kali. “Statistiek der Residentie Tegal 1836”, *op.cit.*, “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”, *op.cit.*, “Algemeen overzigt van den toestand van Nederlandsch Indies 1846, dalam *TNI, eerste jaargang* (Batavia: Bataviaasch Genootschap, 1848), hlm.107. “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1850”, *op.cit.*

Puncak dari hal tersebut adalah muncul suatu gerakan perlawanan petani muncul di Keresidenan Tegal pada tahun 1864. Perlawanan ini didalangi oleh Singo Troeno yang merupakan petani penanam tebu (*planter*) yang berasal dari desa Kedjambong Demangong. Dia juga dikenal dengan nama Mas Tjilik atau Raden Hadji. Singo Troeno dan pengikutnya memulai pemberontakannya pada 28 Oktober 1864 dengan sasaran utama orang-orang Eropa dan para birokrasi pribumi yang setia pada pemerintah kolonial. Singo Troeno memperoleh dukungan dari petani dengan janji akan membebaskan mereka dari kewajiban menanam tebu dan segala kerja wajib dalam sistem tanam paksa (*cultuurdienten* dan *hereendiensten*) yang menjadi beban berat bagi para petani.¹⁹⁷

Pemberontakan dilakukan dengan sekitar 90 pengikut yang menyerang barak prajurit dan mencuri beberapa senjata. Sasaran selanjutnya dari pemberontakan ini tertuju pada bupati dan jaksa. Penyerangan ke kediaman bupati mengakibatkan seorang pengikut bupati tewas, dan empat pengikutnya terluka, sedangkan di kediaman jaksa satu pengikutnya terluka dan seorang juru tulis pribumi tewas, selanjutnya di Pagongan, pemberontak membunuh seorang Eropa ahli irigasi bernama Doen, seorang pengawas, bernama J. Koch, dan seorang Tionghoa terluka parah, sementara pengawas lainnya, yaitu W. Geldman, juga mengalami hal yang sama.¹⁹⁸ Pada 30 Oktober 1864 Residen Jellinghaus bertindak dengan meminta bantuan militer dari Semarang, datang 100 pasukan bayonet dengan 5 perwira, yang membuat para pemberontak ini berlari ke dalam hutan di daerah Pangka. Pada tanggal 9 November Singo Troeno tertangkap di Desa Doekoe Kemirie dan langsung dilakukan eksekusi di tempat, keadaan ini mendorong dua pengikutnya yang berpengaruh Deijem dan

¹⁹⁷ *Nieuwe Amsterdamsche Courant*, No.1029, Rabu 28 Desember 1864, hlm. 3.

¹⁹⁸ *Java-Bode*, No. 88, Rabu 2 November 1864, hlm 4.

Gendong melarikan diri ke Chirebon.¹⁹⁹ Kedua pengikutnya ini kemudian tertangkap di Brebes.²⁰⁰

Kejadian ini dimuat dalam koran-koran kolonial yang menyudutkan sistem tanam paksa yang telah mengakibatkan hal ini. Memang menjelang tahun 1864 kondisi masyarakat dapat dikatakan cukup sulit karena kerap terjadi kekeringan yang menggagalkan panen seperti yang terjadi di Pemasang pada tahun 1862 dan 1864 yang membuat pemerintah turun tangan dengan pembagian bantuan beras sebesar 4000 *pikul*.²⁰¹ Pada tahun 1864 bahkan diakui dalam laporan pemerintah kegagalan panen ini diikuti oleh produksi gula dan kopi yang tidak menguntungkan sehingga menyebabkan tingkat perekonomian ikut menurun. Pada kondisi ini sikap para kepala pribumi dari yang paling rendah hingga bupati juga mendapat sorotan karena kerap kali mengeksploitasi masyarakat untuk melakukan kerja wajib dengan intensitas yang tinggi, sehingga beban masyarakat semakin berat.²⁰²

¹⁹⁹ *Oostpost Soerabajasche Courant*, No. 263, Selasa 8 November 1864, hlm. 5.

²⁰⁰ *Kolonial Verslag 1864*, *op.cit.*

²⁰¹ *Koloniaal Verslag 1862*, *op cit.*, dan *Kolonial Verslag 1864*, *op.cit.*

²⁰² *Kolonial Verslag 1864*, *op.cit.*

BAB 4 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya tentang Tanam Paksa Di Keresidenan Tegal: Kajian Tentang Sistem, Pelaksanaan dan Dampaknya (1830-1870) dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan geografis wilayah ini memiliki kondisi yang cocok dalam menunjang perluasan perkebunan pemerintah yang disebabkan tanahnya yang subur dan tersedianya sarana penunjang. Informasi mengenai demografi sebelum sistem tanam paksa diterapkan cenderung langka dan meskipun banyak diragukan tetapi tidak mengubah fakta bahwa masalahnya adalah tidak adanya alternatif lain. Pada kasus Keresidenan Tegal data yang telah diperoleh dari tahun 1802/3 hingga tahun 1815 terjadi kenaikan yang kecil, dan jika dibandingkan lagi dengan tahun 1830, jumlah penduduk malah lebih rendah, atau dapat dikatakan tidak ada kenaikan yang berarti hal ini disebabkan oleh faktor seperti epidemi dan perang. Hal ini mungkin dapat digunakan sebagai langkah memikirkan ulang dalam usaha mencegah pemikiran bahwa penambahan penduduk merupakan suatu keniscayaan di Jawa pada waktu itu.

Komoditas pertanian di Keresidenan Tegal sebelumnya telah terdapat berbagai tanaman perkebunan seperti Indigo yang telah ditanam sejak masa VOC, Kopi yang telah muncul pada tahun 1806, dan gula yang telah diperdagangkan oleh orang-orang China, tetapi tentu saja perkembangan komoditas ini lambat dan ekspansinya tidak seperti ketika sistem tanam paksa diterapkan. Pada birokrasi

pemerintahan para pejabat pribumi telah menjadi penghubung antara komoditas produksi petani seperti beras kepada para bangsa Eropa dari zaman VOC sebagai penyerahan wajib, bahkan diantara mereka ada yang memiliki kedekatan khusus.

Penerapan tanam paksa mendorong peningkatan komoditas perkebunan terutama untuk gula dan kopi oleh para pengusaha. Basis produksi dari kegiatan ini bertumpu pada dua hal yaitu tanah dan tenaga kerja yang keduanya disediakan oleh pemerintah dengan kesepakatan kontrak dengan pengusaha. Sistem penguasaan tanah terkait erat dengan tenaga kerja karena dalam penguasaan tanah memiliki beban kerja wajib yang harus ditunaikan, meskipun begitu kadang-kadang orang yang tidak memiliki tanah ikut dalam kerja wajib untuk menggantikan tuannya. Komunalisasi juga tanah kerap kali dilakukan bahkan hingga ke ukuran yang sangat kecil untuk dibagikan pada para petani terutama di daerah penanaman perkebunan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk perkebunan terutama perkebunan tebu yang membutuhkan tenaga kerja yang besar. Penanaman tebu juga kerap kali mengambil sebagian besar atau seluruh tanah desa sehingga tidak terdapat lagi sawah untuk penanaman padi. Dalam waktu tidak lebih dari dua dasawarsa penanaman tebu telah mengalami perluasan hingga 450%, yang menandakan pentingnya komoditas ini, sedangkan kopi juga telah dibudidayakan secara lebih baik daripada sebelum sistem tanam paksa, mekipun indigo, teh, dan tembakau tidak terlalu berhasil.

Perkembangan tanaman perkebunan ini ikut berdampak pada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan didalamnya, seperti berkembangnya tenaga kerja upahan yang mengakibatkan monetisasi pada para petani. Semakin kecilnya jumlah sawah yang dibagikan pada para petani membuat uang semakin penting hadirnya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya dengan diberhentikannya tenaga kerja wajib dan diterapkannya sistem tenaga kerja bebas membuat para petani secara resmi menjadi buruh bagi keperluan atau pabrik yang memperjual belikan tenaganya.

Hal yang paling mencolok pada periode ini adalah penambahan penduduk yang dapat dikatakan pesat akibat dari usaha petani dalam memenuhi tuntutan kerja untuknya. Selain itu hal ini juga didorong fakta masa damai karena tidak ada

perang dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan usaha vaksinasi yang semakin gencar untuk meredakan epidemie. Jika dihitung dari tahun 1830 hingga tahun 1871 maka terdapat kenaikan penduduk sebesar 481.5% di Keresidenan Tegal. Petani memandang dengan menambah jumlah anak mereka memiliki keuntungan lebih daripada tingkat konsumsi anak tersebut karena sesegera mungkin mereka akan menjadi produktif. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga kualitas hidup dan waktu luang dalam mengurus sektor pertanian subsisten dan perkebunan. Syarat yang diperlukan dalam hal ini adalah tersedianya tanah untuk kaum tani, perkembangan industri kerajinan yang terhambat, dan tenaga kerja wanita.

Para pejabat Eropa maupun pribumi juga turut mengambil keuntungan dari hal ini, dengan sistem *cultuur procenten* atau persentase keuntungan penyeteroran berbagai produk tanaman perkebunan. Sering kali hasil keuntungan ini justru lebih besar daripada gaji yang mereka terima. Tanam paksa juga memulihkan kekuatan para bupati dalam bentuk pewarisan jabatan dan pemulihan tanah jabatan, kadang-kadang dengan hal tersebut justru terjadi penyimpangan untuk menguatkan posisi ekonomi mereka. Bentuk penyimpangan ini adalah pengerahan tenaga kerja yang eksploitatif dan pemusatan penguasaan tanah. Oleh sebab itu para pejabat pribumi mereka dipandang hanya kaki tangan dari pemerintah kolonia. Penerapan sistem tanam paksa mendorong para birokrasi pemerintahan ikut ambil bagian dan dalam prakteknya kadang-kadang terdapat saling tarik-menarik antara kepentingan pejabat ini dengan para kontraktor, yang membuat para petani menjadi korbannya.

Tanam paksa memang telah mengakibatkan sektor pertanian lebih meluas, perekonomian keluarga petani termonetisasi, jumlah penduduk meningkat, dan keuntungan yang lebih untuk pejabat pribumi. Pada saat yang sama angka kriminalitas juga tidak hilang bagi Keresidenan ini. Khusus hal ini merupakan sanggahan dari argumentasi yang mengatakan "*tindakan pelanggaran jarang terjadi*" pada periode ini di Keresidenan Tegal yang dilontarkan oleh Alamsyah. Tindakan-tindakan seperti perampokan dan pencurian ternak kerap kali muncul sebagai ekspresi perlawanan pada mereka yang dianggap orang kaya, yang justru ikut melancarkan kemiskinan yang mereka alami. Pada kondisi tertentu

penanaman tanaman perkebunan seperti tebu juga mendorong terciptanya kondisi yang kian buruk seperti pada tahun 1850 di wilayah ini sehingga banyak korban mati akibat kelaparan karena tidak ada sawah untuk penanaman padi. Angka kriminalitas bergerak naik menuju tahun 1864 dengan diimbangi oleh kondisi cuaca yang buruk juga sehingga mengakibatkan gagal panen pada beberapa wilayah di keresidenan ini. Puncaknya adalah meletusnya pemberontakan Singo Toeno yang merupana salah seorang penanam tebu. Pemberontakan ini ditujukan untuk membebaskan masyarakat dari beban kerja wajib *heerendiensten* dan *cultuurdiensten*. Akibat dari peristiwa ini bahkan pada koran-koran kolonial menyatakan bahwa ini bagian dari kegagalan tanam paksa dalam mengakomodasi kesejahteraan petani. Perlawanan yang muncul pada dasawarsa akhir dari sistem tanam paksa dapat dijadikan contoh mengenai respon petani secara aktif dalam posisinya yang tidak menguntungkan di bawah sistem tanam paksa di Keresidenan Tegal.

Penerapan tanam paksa memang tidak dapat disimpulkan dengan sederhana, karena pada tiap-tiap wilayah memiliki dampak yang berbeda-beda. Penerapan tanam paksa di Keresidenan Tegal memberikan dampak yang tidak sederhana sehingga harus dilihat pada bagian-bagian yang perlu dimunculkan. Tanam paksa telah membuat petani bergantung pada ekonomi uang, pertambahan jumlah penduduk yang besar, keutungan bagi para pejabat pribumi, namun pada kondisi ini kriminalitas juga tidak hilang atau pada peristiwa insidental tertentu bahkan menguat ke arah yang merugikan karena tanam paksa justru memperburuk keadaan.

DAFTAR ACUAN

Arsip dan Publikasi Resmi:

- “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1824”, Arsip Residensi Tegal No. 11.4, ANRI
- “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1828”, Arsip Residensi Tegal No. 11.6, ANRI.
- “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”, Arsip Residensi Tegal No. 12.8, ANRI.
- “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1850”, Arsip Residensi Tegal No. 13.1, ANRI .
- “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1855”, Arsip Residensi Tegal No. 14.2, ANRI
- “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1858”, Arsip Residensi Tegal No. 14.9, ANRI.
- “Heerendiensten en Tegal Besluiten 1861”, Arsip Residensi Tegal No.190.6, ANRI.
- “Kontrakten met inlandsche bevoking”, Arsip Residensi Tegal No. 161.2. ANRI
- “Residentie Tegal Kultuur Verslag 1848”, Arsip Residensi Tegal No. 12/15, ANRI.
- “Residentie Tegal Kultuur Verslag 1862”, Arsip Residensi Tegal No. 15/15, ANRI

“Residentie Tegal Kultur Verslag 1868”, Arsip Residensi Tegal No. 18.5, ANRI.

“Statistiek 1832”, Arsip Residensi Tegal No. 211.5, ANRI.

“Statistiek der Residentie Tegal 1836”, Arsip Residensi Tegal No. 133, ANRI.

“Statistiek Opgaven der Residentie Tegal van en met 1836 tot en met 1841”, Arsip Residensi Tegal No. 210/1.ANRI.

“Stukken den suiker onderneming te Kemalanglen, Dukuhwringin, Adiwerna”, Arsip Residensi Tegal No. 161.1. ANRI

Algemeen Verslag Wegen de Staat van Den Landbouw 1828

Bijlage Van Het Algemeen Verslag Der Uitkomsten Van Het Onderzoek Betreffende De Koffijcultuur Op Java.

Koloniaal Verslag 1860

Koloniaal Verslag 1862

Koloniaal Verslag 1864

Koloniaal Verslag 1868-1869.

Koloniaal Verslag 1871

Kolonial Verslag 1849

Memorie Behoorende Bij Het Rekest van Suiker Contracten Op Java gerigt aan den Koning. Batavia:Lange & Co, 1860.

Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1862

Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1869

Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1866

Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1867

Staat Der Nederlandsche Oostindische Bezittingen Onder Het Bestuur Van Den Gouverneur -Generaal Herman Willem Daendels, Ridder , Luitenant-Generaal In De Jaren 1808 – 1811”, ‘s Gravenhage, 1814.

Staatsalmanak 1822.

Staatsalmanak 1826

Staatsalmanak 1827

Stukken Betreffende Het Onderzoek Bij Besluit van den Gouverneur-Generaal an Nederlandsch Indie van 08 december 1853, no 10. Batavia: Benomde Commisie (Commisie Umbgrove), 1857.

Suiker Contract Onder De Nadere Goedkeuring Van Zijne Excellentie Den Gouverneur Generaal. Aangegaan Tusschen Den Directeur Der Kultures. Voor En Van Wege Het Gouvernement Van Nederlandsch Indië Ter Eene. En De Heeren B. F. W. Fischer En Ii. Van Den Bosch. Wonende Te Tegal. Van Beroep Suikerfabrikanten Ter Andere Zijde.

The Java Annual Directory and Almanac 1816.

Sumber Buku:

Ahmady, Irhash dkk. *Java Collpase: Dari Kerja Paksa Hingga Lumpu Lapindo.* Jakarta: Insistst press, 2010.

Bleeker, P.. *Nieuwe Bijdragen Tot De Kennis Der Bevolking statistiek van Java.* 's Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1870.

Blume, C. L.. *Over de Asiatische Cholera.* Amsterdam: C. G. Sulpke, 1830.

Boeke, J.H. dan D.H. Burger. *Ekonomi Dualistis.* Jakarta: Bharata, 1973.

Boomgaard, Peter, Dick Kooiman dan Henk Schulte Nordholt (Editor). *Linking Destinies: Trade, Towns And Kin In Asian History.* Leiden: KILTV, 2008.

Boomgaard, Peter. *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880.* Jakarta: Djambatan, 2004.

Booth, Anne , William J.O 'Malley, dan Anna Weideman (Penyunting). *Sejarah Ekonomi Indonesia.* Jakarta: LP3ES, 1988.

Bosch, W.. *Ik Wil Barmhartigheid Enniet Offerande.* Arnhem: H.B. Breijer, 1865.

Breman, Jan. *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014.

—————. *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonia.* Jakarta:L P3ES, 1986.

Breman, JC.. *Djawa Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Demografis.* Jakarta: Bhatara, 1971.

Buddingh, S. A.. *Indisch Archief III.* Batavia. Lange and C.O.,1850.

- Burger, D.H.. *Perubahan-Perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1983.
- . *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia* penerjemah Prajudi Admosudirdjo. Jakarta:J.B. Wolters, 1957.
- Chrijs, J. A. Van Der. *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 160-1811, deel 1776-1787*. Batavia: M. Nijhoff, 1892.
- Creutzberg, Pieter dan J. T. M. van Laanen. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor, 1987.
- Damsar, dan Indrayani. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Day, Clive. *The Policy and Administration Of The Dutch in Java*. London: Macmillan Company & CO., LTD, 1904.
- De Jonge, J.K.J. *De Opkomst van Nederlandsch Gezag in Oost-Indie*. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1884.
- De Salis, Adrian Martitius Theodorus. *Korte Aantooning Van De Notabelste Verbeteringen En Redressen, Welke Sedert Den 1 Januari 1808 In Verschillede Vakken Van Regering En Administratie, In Hollandsch Indie Zijn Ingevoerd*. Batavia: C.Niemands VE, 1809.
- Deventer, S. Van.. *Bijdragen Tot De Kennis Van Het Landelijk Stelsel op Java,II-III*. Zalt-Bommel, 1866.
- Eindresumé van het bij Goeverment Besluit dd. 10 Juni 1867 No.2, Eerste Gedeelte*. Batavia: ERNST & CO, 1876.
- Eindresumé van het bij Goeverment Besluit dd. 10 Juni 1867 No.2, Tweede Gedeelte*. Batavia: ERNST & CO, 1880.
- Eysinga, P.P Roorda van. *Handbokk der Landen, En Volkenkunde, Geschied, Taal, Aardrijks-Te Staatkunde van Netherlandsch Indie*. Amasterdam: L. Van Bakkenes, 1850.
- Furnivall, J.S.. *Hindia Belanda Studi Ekonomi Tentang Majemuk*. Jakarta: Freedom Institute. 2009.
- Geertz, Clifford. *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta:Bathara Karya Aksara, 1983.
- . *Agricultural Involution: The Process Of Ecological Change In Indonesia*. Barkeley : University Of California Press. 1963.

- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, Penerjemah Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.
- Graaf, H. J. de. *Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I*. Jakarta: Grafiti Pers, 1987.
- Hall, Van dan Lintelo De Geer. *Regeleerd Bijblad*. Amsterdam: Johannes Muller, 1855.
- Ham, Ong Hok. *Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Hartatik, Endah Sri. *Dua Abad Jalan Pantura: Sejak Era Kerajaan Mataram Islam hingga Orde Baru*. Yogyakarta: Nurmahera, 2018.
- Holle, K.F.. *Bidjragen tot de kennis Der Ziekten En Plagen van Padi-Gewas*. Batavia: W. Ogilvie, 1863.
- Houben, Vincent J. H.. *Keraton dan Kompeni Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2002.
- Ismail, Taufiq, dll.. *Ensiklopedi Tokoh Pekalongan*. Pekalongan: Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2015.
- Izzah, Latifatul. *Karesidenan Madiun Pada Masa Cultuurstelsel 1830-1870*. Yogyakarta: Best Publisher, 2018.
- Junghuhn, Frans. *Java Zijne Gedaante, Zijn Plantentooi en inwendige bouw, twee afdeeling*. 's-Gravenhage: C.W. Mieling, 1853.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1933.
- dan Djoko Suryo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991.
- . *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Knight, G. R.. *Sugar, Steam, and Steel: The Industrial Project in Colonial Java, 1830-1885*. Adelaide: University of Adelaide Press, 2014.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogya: PT. Tiara Wacana, 2003.
- . *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018.
- Leirissa, R.Z., dkk. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996

- Lindblad, J. Thomas dan Bambang Purwanto. *Merajut Sejarah Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta:Ombak, 2010.
- Lindblad, J. Thomas. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru*, penerjemah M.Rohman dan Bambang Purwanto. Jakarta: LP3ES, 2000.
- Lucas, Anton. *Peristiwa Tiga Daerah Revolusi dalam Revolusi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.
- Millard, J.. *Suikerindustrie op Java*. 'S Gravehage: Martinus Nijhoff, 1869.
- Moertono, Soemarsaid. *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX*. Jakarta: KPG, 2017.
- Nederburgh, S.G.. *Verhandeling over de Vragen enz*. Den Haag: IN' S Haage, 1802.
- Niel, Robert Van. *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*. Jakarta: LP3ES, 2003.
- Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptarini. *Perpektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Padmo, Soegijanto. *Bunga Rampai Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 2004.
- Penders, Chr. LM.. *Indonesia: Selected Documents on Colonialism and Nationalism 1830-1942*. St. Lucia: University of Quensland Press, 1977.
- Pierson, N.G.. *Het Kultuurstelsel*. PN.Van Kampen:Amsterdam,1868.
- Pigeaud. *Java in 14th Century, Vol. IV*. The Hague: Martinius Nijhoof, 1962.
- Pires, Tome. *The Suma Oriental of Tome Pires*, penerjemah Armando Cortsio. London: Te Hakluyt Society, 1944.
- Raffles, Thomas Stamford. *The History Of Jawa, Vol. II*. London: Jhon Murray, 1830.
- Ricklefs, MC.. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta:IKAPI, 2008.
- Sasmita, Nurhadi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*. Yogyakarta: Lembah Manah, 2012.
- Schrieke, B.. *Indonesia Sociological Studies II, Ruler and Realism in Earlyn Jawa*. Bandung: The Huge, 1957.

- Seignobos, Charles dan Charles-Victor Langlois. *Introduction To The Study of Histori: Pengantar Ilmu Sejarah*, penerjemah H. Suprianto Abdullah. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Soest, Van. *Geschiedenis Van Het Kultuurstelsel, Eerste Deel*. Rotterdam: H. Nijgh, 1869.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1824, No.2*.
- Suhartono. *Apanage dan Bekel: Peubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Sukardi, Tanto. *Tanam Paksa Di Banyumas: Kajian mengenai Sistem, dan Dampak Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Suroyo, Djulianti. *Eksplorasi Kolonial Abad XIX Kerja Wajib di Karesidenan Kedu 1800-1890*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2000.
- Sutherland, Heather. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Tjondronegoro, S.M.P. dan Gunawan Wirahadi (peny.). *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Obor, 2008.
- Van der Aa, A. J.. *Nedelandsch Oost-Indie: Beschrijving der Nedeerlandsche Bezittingen in Oost-Indie*. Amsterdam: J. F. schleijer, 1851.
- Veth, P.J.. *Aardrijkskundig En Statistisch Woordenboek Van Netherland Indie II-III*. Amsterdam: P.N. Van Kampen, 1869.
- Vitalis. *De Invoering, Werking, En Gebreken Van Het Stelsel Van Kultures Op Java*. Zalt Bommel: Joh. Noman en Zoon, 1851.
- Vollenhoven, Van. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie, eerste deel*. Leiden: E.J. Brill, 1906.
- Wasino dan Endah Sri Hartatik. *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pusaka Utama, 2018.
- Winarni, Retno. *Modernisasi Birokrasi Di Keresidenan Besuki Abad XIX*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2018.

Sumber Buletin, Jurnal, Majalah, Tesis, dan Disertasi :

Alamsyah. “Perkembangan Perkebunan Dan Pelabuhan Di Karesidenan Tegal (1830-1870)”. *Tesis* pada Program Magister Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2004.

Bidragen tot de Taal-. Landen Volkenkunde, deel 96. ‘s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1938.

Bidragen tot de Taal-. Landen Volkenkunde, Eerste deel. Amsterdam: Friedrik Muller, 1856.

Elson, R.E.. “Sugar Factory Workers and the Emergence of ‘Free Labour’ in Nineteenth-Century Java” dalam *Modern Asian Studies*. Vol. 20. No. 1, 1986.

Miyamoto, Kensuke. “Subordinate Peasant in Mid-19th Century Java” dalam *Economic Journal of Hokkaido University*. Vol. 21, 1992.

Padmo, Soegijanto. “Beberapa Hal Mengenai Kajian Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia: Sebuah Survai” dalam *Humaniora*. 10 Januari-April 1999.

Suratminto, Lilie. “Belajar Sejarah Melalui Pameran Koleksi Lukisan Jadoel” dalam *Paradigma: Kajian Budaya*. Vol.1. No.1, 2010.

Suryo, Djoko. *Transformasi Masyarakat Indonesia dalam Historiografi Indonesia Modern*. Sleman: STPN Press, 2009.

Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, derde serie. Batavia: Lange & Co, 1860.

Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, eerste deel. Zalt-Bommel, 1866.

Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, Eerste Deel. Batavia : Ter Lands-Drukkerij, 1839.

Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, eerste jaargang. Batavia: Bataviaasch Genootschap, 1848.

Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, tweede deel. Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon , 1861.

Van der Eng, Pierre. “Change Challenge: Current Themes in Economic History of Indonesia”. *NEHA Bulletin* 10 (2).

White, Benjamin. “Demand for Labour and Population Growth in Colonial Java” dalam *Human Ecology*. Vol. 1. No. 3, 1973.

Winarni, Retno. “Bertahan di Tengah Menguatnya Kekuasaan Kolonial dan Moderniasi: Bupati-Bupati di Keresidenan Besuki Jawa Timur”. *Disertasi* pada Program Doktorat Ilmu-Ilmu Humaniora Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2012.

Yuliati, Dewi. “Terbentuknya Propinsi Jawa Tengah” dalam *Jurnal Citra Leka dan Sabda*, 2010.

Zulkarnain. “ Kesengsaraan Masyarakat Jawa Masa Kolonial” dalam *Istoria*. Vol. 2. No. 1, 2011.

Sumber Internet dan Surat Kabar:

Bredasche Courant. No. 47. Sabtu 24 November 1821.

Cahyono, Edi, “Pekalongan 1830-1870: Transformasi Petani Menjadi Buruh Industri Perkebunan”.
<https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/09/edi-cahyono-pekalongan-1830-1870.pdf> diakses pada 17/09/2020.

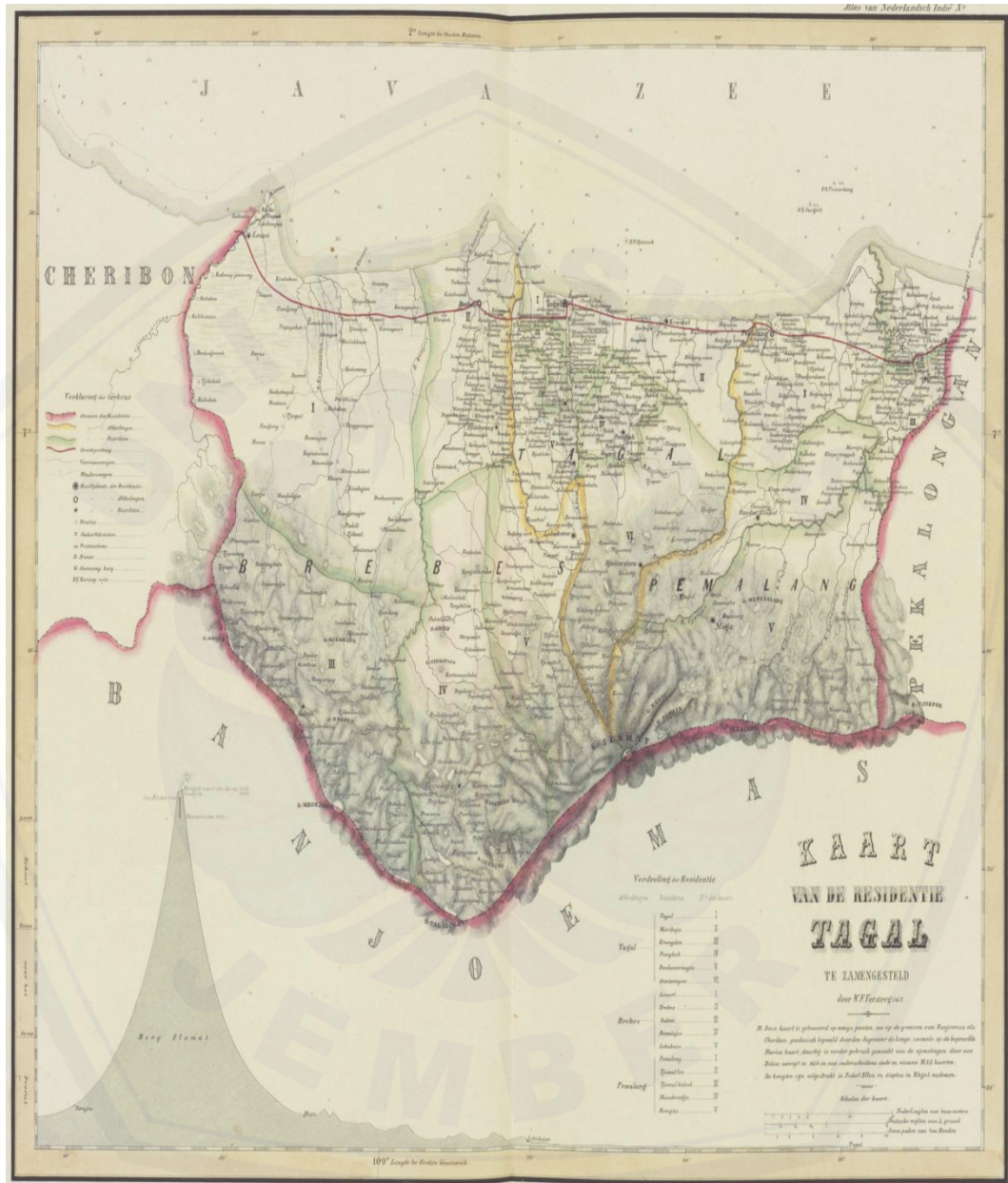
Java-Bode. No. 88. Rabu 2 November 1864.

Nieuwe Amsterdamsche Courant. No.1029. Rabu 28 Desember 1864.

Oostpost Soerabajasche Courant. No. 263. Selasa 8 November 1864.

LAMPIRAN A

PETA KERESIDENAN TEGAL 1857



Sumber: Kaart van de Residentie Tagal, 1857 / te zamengesteld door W.F. Versteeg ; geteekd. Cronenberg en Wolff, dalam <https://nla.gov.au/nla.obj-230934003/view>

LAMPIRAN B

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI TAHUN 1832

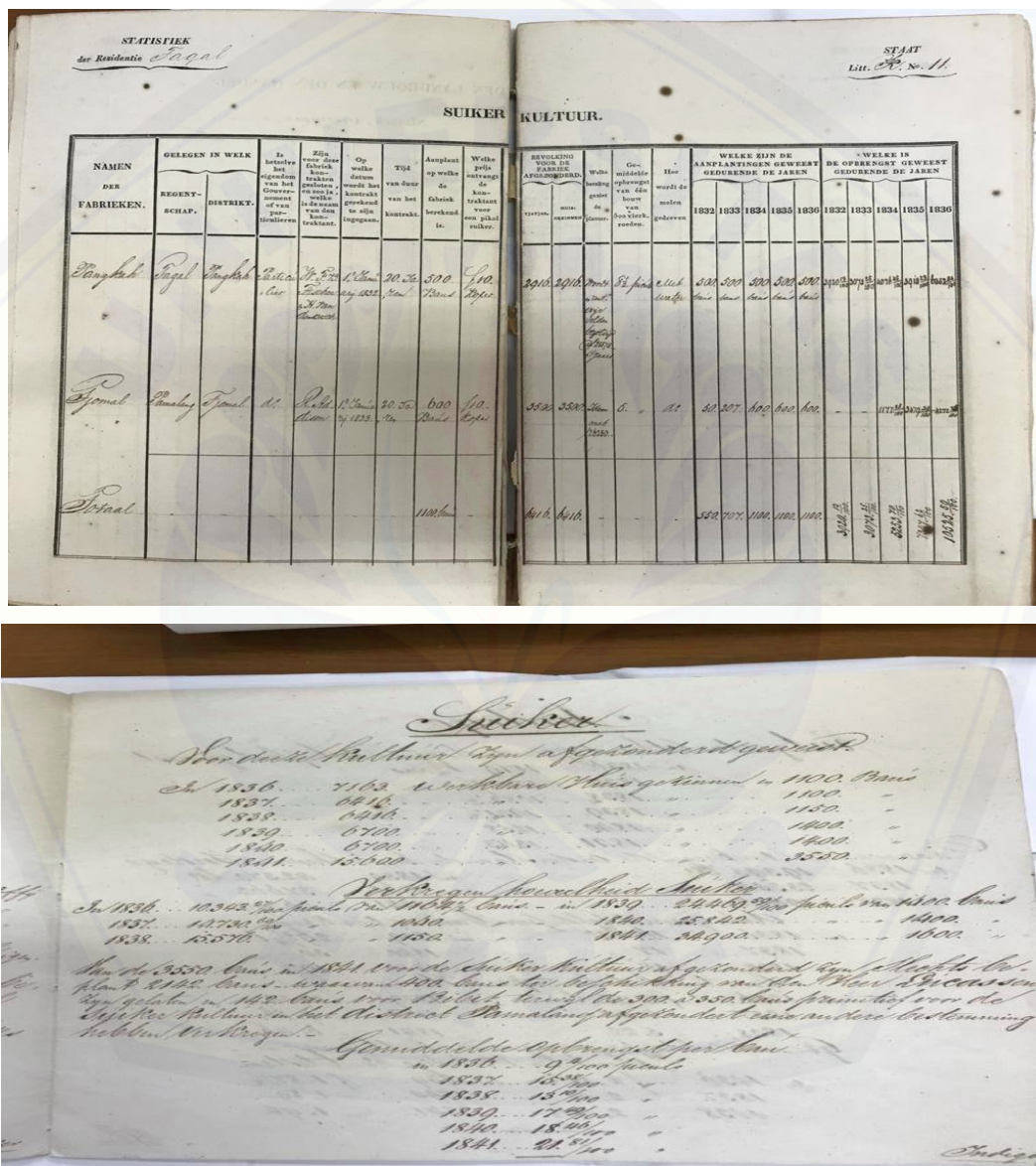
Inducting District is divided in three Regent
schappen als
Tegal hebben de een uitgestrekt
heid van 660 □ palen
Purbes hebben de een uitgestrekt
heid van 956 □ palen in
Pamalang hebben de een uitge-
strektheid van 642 □ palen
Dese regentschappen verdeelen zich
meer als
Tegal in de districten
Tegal
Kranden
Maribaja
Kali Sokka
Balamos en
Jantongan
Het regentschap Purbes in de
districten Purbes
Sibaksie en
Boerijoe
Het regentschap Pamalang in
de districten Pamalang
Jurnal
Mandiraja
Dongas en
Jurnal Kidol.
Bevolking

Sumber: Statistiek Tegal 1832, Arsip Residensi Tegal No. 211.5. ANRI.

LAMPIRAN C

STATISTIK BUDIDAYA TEBU PADA 1832-1841 DI KERESIDENAN TEGAL

Hasil gula, jumlah keluarga petani yang terlibat dalam perawatan, Luas lahan perkebunan, dan nama pabrik yang ada di keresidenan Tegal pada 1832-41



Sumber: Statistiek der Residentie Tegal 1836, Arsip Residensi Tegal No. 133. ANRI dan Statistiek der Residentie Tegal 1836-42, Arsip Residensi Tegal No.210.1. ANRI

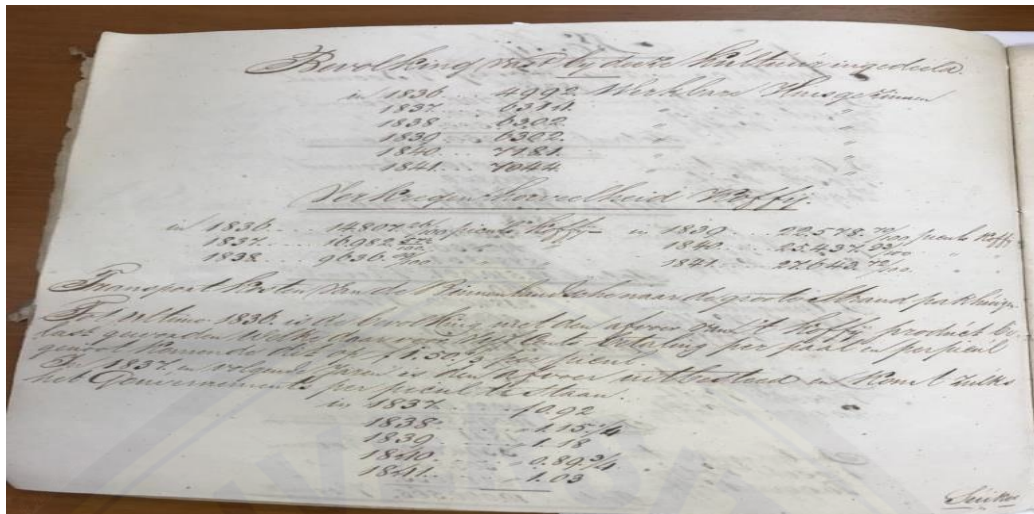
LAMPIRAN D

STATISTIK KOPI PADA 1832-1841 DI KERESIDENAN TEGAL

Pohon kopi berdasarkan tempat penanamannya meliputi *Pagger koffij*, *Bosch Koffij*, dan *Tuin Koffij* dan jumlah keluarga petani yang terlibat perawatan tahun 1832-1841.

NAMEN DER REGENT-SCHAPPEN.	Gedane oogplanting in 1831.	GEDANE AFSCHEUJINGEN GEDEUDE DE JAREN					GEDANE OORPLANTINGEN GEDEUDE DE JAREN															HOEFTELIED KOFFIE VERKRIJGEN UIT DEN COEBT VAN DE JAREN
		1832.	1833.	1834.	1835.	1836.	1832.			1833.			1834.			1835.			1836.			
							Totale			Totale			Totale			Totale			Totale			
							Inbat.	Nieuwe	TOTAAL	Inbat.	Nieuwe	TOTAAL	Inbat.	Nieuwe	TOTAAL	Inbat.	Nieuwe	TOTAAL	Inbat.	Nieuwe	TOTAAL	
Pasuruan
Tegal
Pawalong
Patih

Year	Koffij	Pagger Koffij	Bosch Koffij	Tuin Koffij
1832
1833
1834
1835
1836

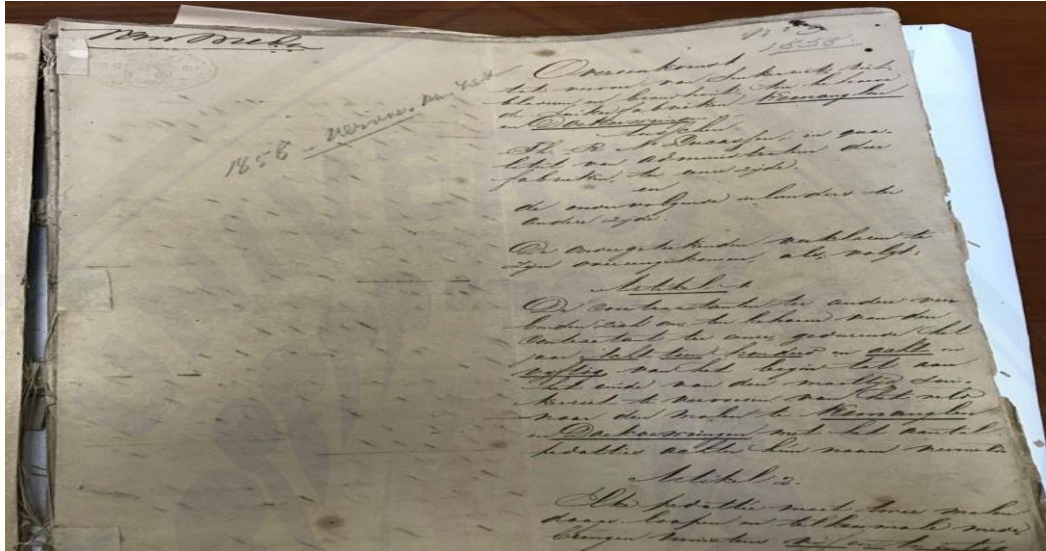


Sumber: *Statistiek der Residentie Tegal 1836-42*, Arsip Residensi Tegal No.210.1. ANRI dan *Statistiek der Residentie Tegal 1836-42*, Arsip Residensi Tegal No.210.1. ANRI

LAMPIRAN E

**KONTRAK PENDUDUK KEMANGLEN DAN DUKUHWRINGIN
DENGAN PABRIK GULA MILIK LUCASSEN PADA 1858**

Kontrak mengenai penyediaan angkutan oleh penduduk kemanglen dan
Dukuhwringin untuk mengangkut hasil tebu



Sumber: *Kontrakten met indlandsche bevoikingtahun 1858, Arsip Residensi Tegal No. 161.2. ANRI*

LAMPIRAN F

**PARA PEKERJA DAN UPAH TERHUTANG DARI KONTRAKTOR
UNTUK PENGANGKUTAN TEBU DARI LADANG KE PABRIK GULA
DUKUHWRINGIN.**

60 nama pekerja pribumi dan sejumlah upah terhutang di pabrik gula
Dukuhwringin pada tahun 1848

Stukken den suiker onderneming te Kemalang, Dukuhwringin

Deur dit transport van Tebu van de Planten naar de fabriek
te Dukuhwringin.

No	Namen	Schuld
1	Wijaya	20
2	Wijaya	20
3	Wijaya	20
4	Wijaya	20
5	Wijaya	20
6	Wijaya	20
7	Wijaya	20
8	Wijaya	20
9	Wijaya	20
10	Wijaya	20
11	Wijaya	20
12	Wijaya	20
13	Wijaya	20
14	Wijaya	20
15	Wijaya	20
16	Wijaya	20
17	Wijaya	20
18	Wijaya	20
19	Wijaya	20
20	Wijaya	20
21	Wijaya	20
22	Wijaya	20
23	Wijaya	20
24	Wijaya	20
25	Wijaya	20
26	Wijaya	20
27	Wijaya	20
28	Wijaya	20
29	Wijaya	20
30	Wijaya	20
31	Wijaya	20
32	Wijaya	20
33	Wijaya	20
34	Wijaya	20
35	Wijaya	20
36	Wijaya	20
37	Wijaya	20
38	Wijaya	20
39	Wijaya	20
40	Wijaya	20
41	Wijaya	20
42	Wijaya	20
43	Wijaya	20
44	Wijaya	20
45	Wijaya	20
46	Wijaya	20
47	Wijaya	20
48	Wijaya	20
49	Wijaya	20
50	Wijaya	20
51	Wijaya	20
52	Wijaya	20
53	Wijaya	20
54	Wijaya	20
55	Wijaya	20
56	Wijaya	20
57	Wijaya	20
58	Wijaya	20
59	Wijaya	20
60	Wijaya	20
Samudra		1200

No	Namen	Schuld
31	Wijaya	20
32	Wijaya	20
33	Wijaya	20
34	Wijaya	20
35	Wijaya	20
36	Wijaya	20
37	Wijaya	20
38	Wijaya	20
39	Wijaya	20
40	Wijaya	20
41	Wijaya	20
42	Wijaya	20
43	Wijaya	20
44	Wijaya	20
45	Wijaya	20
46	Wijaya	20
47	Wijaya	20
48	Wijaya	20
49	Wijaya	20
50	Wijaya	20
51	Wijaya	20
52	Wijaya	20
53	Wijaya	20
54	Wijaya	20
55	Wijaya	20
56	Wijaya	20
57	Wijaya	20
58	Wijaya	20
59	Wijaya	20
60	Wijaya	20
Samudra		1200

Sumber: *Stukken den suiker onderneming te Kemalang, Dukuhwringin, Adiwerna, Arsip Residensi Tegal No. 161.1. ANRI*

LAMPIRAN G

BERITA DARI *JAVA-BODE*, *NIEUWE AMSTERDAMSCH E COURAN*, DAN *OOSTPOST SOERABAJASCHE COURANT*

Berita tentang pemberontakan Singo Troeno yang ingin membebaskan petani dari sistem Cultuurstelsel.

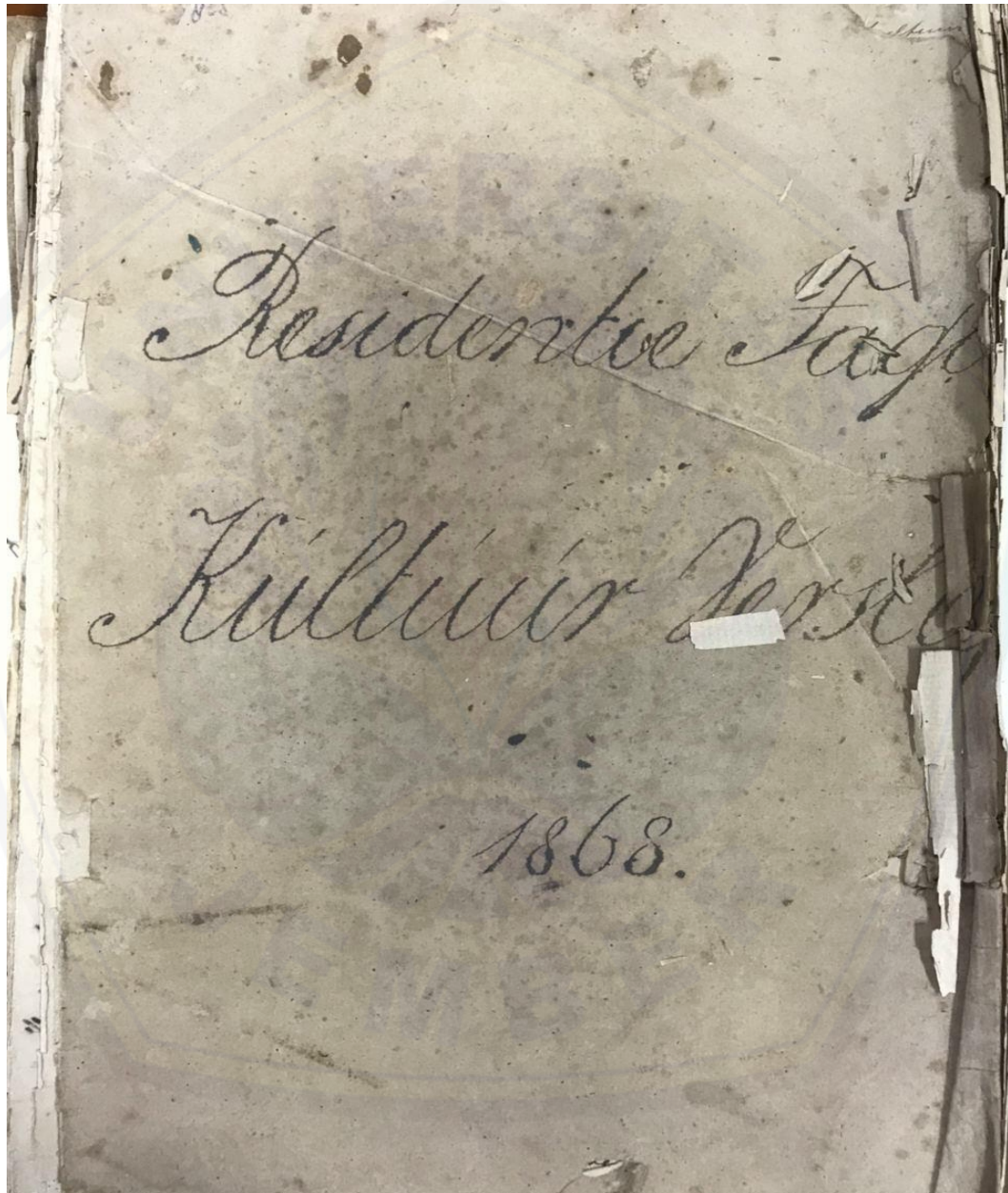


Sumber: *Nieuwe Amsterdamsche Courant*, 28 Desember 1864 No.10297, hlm. 3., *Java-Bode*. No. 88, hlm. 4., Rabu 2 November 1864 *Oostpost Soerabajasche Courant*. No. 263. Selasa 8 November 1864. hlm. 5.

LAMPIRAN H

KULTUUR VERLAG 1868

Laporan mengenai beragam budaya yang ada di Keresidenan Tegal pada tahun
1868



Sumber: Residentie Tegal Kultuur Verlag 1868. Arsip Residensi Tegal No. 18.5. ANRI.

LAMPIRAN I

SURAT IJIN PENELITIAN PRA-SKRIPSIDI ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jl. Kalimantan No. 37 - Kampus Tegal Boto Kotak Pos 185
Telp. (0331) 337818; Fax. : (0331) 332738
JEMBER 68121

Nomor : 4510/UN25.1.6/LL/2020 20 October 2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia
Jl. Ampera Raya No. 7, RW. 4, Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560

di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember berikut ini.

No.	NIM	Nama Mahasiswa
1.	170110301054	Setia Hanafi

akan melaksanakan observasi dan penelitian pra-skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan observasi dan penelitian pra skripsi guna mendapatkan informasi dan mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan skripsi. Pelaksanaan penelitian mulai tanggal: 20 Oktober s/d 31 Desember 2020

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan Sejarah,

Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum.
NIP 197108251999031001